

METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK



 **Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, M.Si.** 

METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, M.Si.

Unfari Press

METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, M.Si.

Copyright ©2026, pada penulis
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit
sebagai pemegang hak publikasi.

Cetakan I, Februari 2026

Editor:

Tata Letak/ Desain Sampul: Chrissy Wulandari, S.IP.

Diterbitkan oleh Unfari Press (Anggota IKAPI)
Jl. Cisaranten Kulon No.140 Bandung 40293
Telp. 022-7835813 e-mail:
unfaripress01@gmail.com

ISBN: xxxxx-xxxxx



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Metode Penelitian Administrasi Publik* ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3), serta bagi praktisi dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang administrasi publik dan kebijakan publik.

Perkembangan tata kelola pemerintahan, kompleksitas kebijakan publik, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti empiris menuntut kemampuan penelitian yang semakin kuat. Oleh karena itu, penguasaan metodologi penelitian tidak lagi sekadar menjadi persyaratan akademik, melainkan menjadi kompetensi strategis bagi calon birokrat, analis kebijakan, akademisi, dan peneliti sektor publik.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, paradigma, desain, teknik pengumpulan dan analisis data, etika penelitian, hingga penulisan karya ilmiah dalam konteks administrasi publik. Setiap bab dirancang secara sistematis agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan proposal penelitian, skripsi, tesis, maupun penelitian kebijakan dan evaluasi program pemerintah.

Selain membahas pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods, buku ini juga memperkenalkan perkembangan metodologi kontemporer, termasuk pemanfaatan data digital, big data, serta kecerdasan buatan dalam penelitian administrasi publik. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat menjembatani kebutuhan akademik sekaligus tantangan praktik pemerintahan modern.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, dosen, peneliti, serta praktisi sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta berkontribusi dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bandung, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN	1
BAB I.....	5
HAKIKAT METODE PENELITIAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	5
1.1 Pengertian Metode Penelitian	5
1.2 Pengertian Metode Penelitian Administrasi Publik.....	8
1.3 Hakikat dan Peran Penelitian Ilmiah.....	11
1.4 Perkembangan Metode dalam Administrasi Publik	12
1.4.1 Dominasi Pendekatan Positivistik dan Kuantitatif	13
1.4.2 Munculnya Pendekatan Interpretatif dan Kualitatif	14
1.4.3 Perkembangan Pendekatan Kritis dalam Administrasi Publik	15
1.4.4 Pendekatan Pragmatis dan Lahirnya Mixed Methods.....	16
1.4.5 Era Digital dan Inovasi Metodologis Kontemporer	17
1.4.6 Sintesis Perkembangan Metodologis	17
1.5 Ruang Lingkup dan Fungsi Penelitian Administrasi Publik	18
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian Administrasi Publik...	19
1. Kebijakan Publik dan Proses Perumusannya	19
2. Implementasi Kebijakan	19

3. Pelayanan Publik.....	20
4. Reformasi Birokrasi.....	20
5. Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>).....	20
6. Manajemen Sektor Publik.....	20
7. Partisipasi Masyarakat	21
8. Hubungan Pusat–Daerah.....	21
1.5.2 Fungsi Penelitian Administrasi Publik.....	21
1. Fungsi Deskriptif	21
2. Fungsi Eksplanatif	22
3. Fungsi Evaluatif.....	22
4. Fungsi Prediktif.....	22
5. Fungsi Preskriptif.....	23
1.6 Penelitian Akademik dan Penelitian Terapan dalam Administrasi Publik	23
1.6.1 Penelitian Akademik (<i>Basic Research</i>)	23
1.6.2 Penelitian Terapan (<i>Applied Research</i>)	25
1.6.3 Relasi dan Sinergi antara Penelitian Akademik dan Terapan.....	26
BAB II	28
PARADIGMA, PENDEKATAN, DAN DESAIN PENELITIAN.....	28
2.2 Pendekatan dalam Penelitian Administrasi Publik.....	28
2.2.1 Pendekatan Positivistik	29
2.2.2 Pendekatan Interpretatif	30
2.2.3 Pendekatan Kritis	31
2.2.4 Pendekatan Pragmatik.....	32

2.3 Desain Penelitian dalam Administrasi Publik	33
2.4 Penelitian Kuantitatif dalam Administrasi Publik.....	36
2.5 Penelitian Kualitatif dalam Administrasi Publik.....	39
2.6 Mixed Methods dalam Penelitian Administrasi Publik	43
BAB III.....	47
PERUMUSAN MASALAH DAN LANDASAN	
TEORETIK	47
3.1 Perumusan Masalah Penelitian dalam Administrasi Publik	47
3.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian dalam Administrasi Publik	51
3.3 Tinjauan Pustaka	54
3.3.1 Fungsi Akademik Tinjauan Pustaka	55
3.3.2 Landasan Teoretis Tinjauan Pustaka	56
3.3.3 Jenis-Jenis Tinjauan Pustaka	57
3.3.4 Sumber-Sumber Ilmiah dan Kredibilitas Literatur	58
3.3.5 Sintesis dan Pengembangan Kerangka Konseptual	58
3.4 Kerangka Teoretik dan Kerangka Konseptual	59
3.4.1 Kerangka Teoretik: Landasan Konseptual Berbasis Teori	59
3.4.2 Fungsi Kerangka Teoretik dalam Penelitian	61
3.4.3 Kerangka Konseptual: Operasionalisasi dalam Konteks Empiris.....	61
3.4.4 Hubungan antara Kerangka Teoretik dan Kerangka Konseptual	63

3.4.5 Pengembangan Kerangka dalam Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif	63
3.4.6 Sintesis Akademik.....	64
3.5 Hipotesis Penelitian	64
3.6 Pertanyaan Penelitian.....	67
3.7 Model Penelitian	70
BAB IV	73
DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN	73
4.1 Populasi dan Sampel	73
4.2 Variabel Penelitian	76
4.3 Definisi Operasional Variabel	78
4.4 Instrumen Penelitian	81
4.5 Teknik Pengumpulan Data	83
4.6 Prosedur Penelitian	86
4.6.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah	87
4.6.2. Penyusunan Proposal Penelitian	87
4.6.3. Pengumpulan Data	87
4.6.4. Analisis Data	88
4.6.5. Penarikan Kesimpulan dan Interpretasi Temuan.	88
4.6.6. Penyusunan Laporan Penelitian	89
4.7 Jadwal dan Anggaran Penelitian	89
4.7.1. Penyusunan Jadwal Penelitian	89
4.7.2. Penyusunan Anggaran Penelitian.....	90
4.7.3. Integrasi Jadwal dan Anggaran dalam Perencanaan Penelitian.....	91
BAB V	93

KUALITAS DATA DAN ETIKA PENELITIAN	93
5.1 Validitas dan Reliabilitas.....	93
5.1.1. Validitas Instrumen Penelitian.....	93
5.1.2. Reliabilitas Pengukuran	94
5.1.3. Relevansi bagi Penelitian Administrasi Publik ...	95
5.2 Uji Instrumen Penelitian	96
5.2.1. Uji Validitas Item	96
5.2.2. Uji Reliabilitas dengan <i>Cronbach's Alpha</i>	97
5.2.3. Analisis Faktor Eksploratori.....	97
5.3 Trustworthiness dalam Penelitian Kualitatif.....	98
5.3.1. <i>Credibility</i>	99
5.2.2. <i>Transferability</i>	99
5.3.3. <i>Dependability</i>	100
5.3.4. <i>Confirmability</i>	100
5.3.5 Strategi Meningkatkan Trustworthiness.....	101
5.4 Etika Penelitian Administrasi Publik	101
5.5 Perlindungan Subjek Penelitian	105
5.6 Integritas Akademik dan Pencegahan Plagiarisme ...	108
BAB VI.....	112
TEKNIK ANALISIS DATA	112
6.1 Analisis Data Kuantitatif.....	112
6.1.1 Statistik Deskriptif	114
6.1.2 Statistik Inferensial	117
6.1.3 Regresi dan Analisis Multivariat.....	120
6.2 Analisis Data Kualitatif.....	123

6.2.1 Analisis Tematik.....	126
6.2.2 Analisis Naratif	128
6.3 Integrasi Data dalam <i>Mixed Methods</i>	131
6.4 Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan	134
BAB VII	137
PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	137
7.1 Penulisan Proposal Penelitian	137
7.2 Penyusunan Skripsi	141
7.3 Penyusunan Tesis	144
7.4 Penyusunan Disertasi	147
7.5 Teknik Sitasi dan Referensi.....	148
7.6 Publikasi Ilmiah	150
7.7 Etika Publikasi	153
BAB VIII.....	156
PENDEKATAN DAN TREN METODOLOGI PENELITIAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	156
8.1 Penelitian Kebijakan Publik.....	156
8.2 Evaluasi Program Pemerintah.....	159
8.3 Penelitian Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>) .	162
8.4 Metodologi Partisipatif	165
8.5 Penelitian Digital dan Big Data dalam Administrasi Publik	168
8.6 Artificial Intelligence dalam Penelitian Kebijakan ...	170
8.7 Tren Metodologi Penelitian Kontemporer	173

PENUTUP.....	177
DAFTAR PUSTAKA	179

PENDAHULUAN

Ilmu administrasi publik memiliki peran strategis dalam memahami dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan publik, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks negara modern yang dihadapkan pada kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, kebijakan publik tidak lagi dapat disusun hanya berdasarkan intuisi, pengalaman semata, atau pertimbangan normatif, melainkan harus bertumpu pada analisis ilmiah yang sistematis dan berbasis bukti empiris.

Penelitian menjadi fondasi utama dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus relevan bagi praktik pemerintahan. Melalui penelitian, berbagai fenomena administrasi publik mulai dari kinerja birokrasi, implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, hingga inovasi pelayanan publik—dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif. Oleh sebab itu, penguasaan metode penelitian merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa, peneliti, serta praktisi di bidang administrasi publik.

Buku *Metode Penelitian Administrasi Publik* ini disusun sebagai buku ajar yang memberikan panduan menyeluruh mengenai cara melakukan penelitian secara ilmiah dalam konteks sektor publik. Pembahasan tidak hanya mencakup aspek konseptual dan filosofis, seperti paradigma dan pendekatan penelitian, tetapi juga aspek teknis-operasional, termasuk perumusan masalah,

penyusunan kerangka teoretik, desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis kuantitatif dan kualitatif, hingga penulisan karya ilmiah dan publikasi.

Selain itu, buku ini juga menempatkan penelitian administrasi publik dalam dinamika kontemporer yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, keterbukaan data pemerintah, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis kebijakan. Fenomena-fenomena tersebut mengubah cara pemerintah bekerja sekaligus membuka peluang baru bagi penelitian kebijakan yang lebih presisi, cepat, dan berbasis data besar. Oleh karena itu, pengenalan terhadap tren metodologi mutakhir menjadi bagian penting dalam buku ini agar pembaca mampu merespons tantangan masa depan.

Secara sistematis, buku ini disusun dalam delapan bab utama. Bab pertama membahas hakikat metode penelitian dalam administrasi publik, termasuk perkembangan historis dan peran strategis penelitian ilmiah. Bab kedua mengulas paradigma, pendekatan, serta desain penelitian. Bab ketiga memfokuskan pada perumusan masalah dan landasan teoretik. Bab keempat membahas desain operasional penelitian, meliputi populasi, sampel, variabel, instrumen, serta teknik pengumpulan data. Bab kelima menguraikan kualitas data dan etika penelitian. Bab keenam menyajikan teknik analisis data kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Bab ketujuh membahas penulisan proposal, skripsi, tesis, serta publikasi ilmiah. Bab kedelapan menutup buku dengan pembahasan

mengenai penelitian kebijakan publik, evaluasi program, dan tren metodologi kontemporer.

Buku ini ditujukan terutama bagi mahasiswa program sarjana dan magister administrasi publik, kebijakan publik, serta bidang ilmu sosial yang relevan. Namun demikian, isinya juga diharapkan bermanfaat bagi aparatur sipil negara, analis kebijakan, peneliti lembaga pemerintah, maupun pemerhati tata kelola pemerintahan yang ingin memperkuat kapasitas risetnya.

Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam perkuliahan metodologi penelitian administrasi publik serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berkontribusi nyata bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

BAB I

HAKIKAT METODE PENELITIAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

1.1 Pengertian Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji teori yang telah ada, atau memecahkan masalah praktis berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kerlinger (1973) mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai *systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena*. Definisi ini menekankan empat unsur utama, yaitu sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis.

Sejalan dengan itu, Creswell (2014) menjelaskan penelitian sebagai proses langkah-demi-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau isu tertentu. Dalam perspektif metodologi ilmu sosial, Neuman (2014) memandang penelitian sebagai aktivitas terencana yang bertujuan menjawab pertanyaan ilmiah melalui pengumpulan data yang dapat diverifikasi serta penalaran logis.

Dalam konteks akademik, penelitian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis pengumpulan data, melainkan suatu proses berpikir kritis yang mencakup perumusan masalah, pembangunan kerangka konseptual, pemilihan desain penelitian, pengujian empiris terhadap proposisi atau pertanyaan penelitian, serta penarikan kesimpulan secara argumentatif. Popper (1959), melalui teori falsifikasinya, menekankan bahwa penelitian ilmiah harus membuka peluang bagi pengujian dan penyangkalan (refutation) terhadap teori, sehingga pengetahuan berkembang melalui kritik dan pembuktian empiris.

Metode penelitian, sebagai bagian integral dari kegiatan ilmiah tersebut, merujuk pada seperangkat prosedur, teknik, dan strategi yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2019) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa metode penelitian harus bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Sementara itu, Sekaran dan Bougie (2016) menyebut metode penelitian sebagai keseluruhan proses terstruktur mulai dari identifikasi masalah, pengembangan hipotesis, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi hasil.

Dalam pandangan Denzin dan Lincoln (2018), metode penelitian tidak dapat dilepaskan dari paradigma epistemologis yang dianut peneliti, karena pilihan metode mencerminkan asumsi tentang realitas sosial (ontologi), cara memperoleh pengetahuan (epistemologi), serta nilai-nilai yang melekat dalam proses penelitian (aksiologi).

Oleh sebab itu, metode penelitian bukan sekadar teknik, melainkan suatu kerangka filosofis yang membimbing seluruh proses riset.

Secara operasional, metode penelitian mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pemilihan objek dan fokus penelitian, yang berkaitan dengan identifikasi masalah dan batasan studi (Creswell, 2014).
2. Penentuan desain penelitian, seperti desain deskriptif, eksplanatif, atau evaluatif (Yin, 2018).
3. Teknik pengumpulan data, meliputi survei, wawancara, observasi, dan studi dokumen (Neuman, 2014).
4. Teknik analisis data, baik statistik dalam penelitian kuantitatif maupun analisis tematik dalam penelitian kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).
5. Pelaporan hasil penelitian, yang disusun secara sistematis agar dapat dikritisi dan direplikasi oleh peneliti lain (APA, 2020).

Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai “peta jalan ilmiah” yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara logis, transparan, sistematis, dan dapat diuji ulang. Fungsi ini sejalan dengan prinsip *replicability* dan *transparency* dalam ilmu pengetahuan modern yang ditekankan oleh Open Science Framework sejak dekade 2010-an.

Dalam bidang ilmu sosial dan administrasi publik, metode penelitian juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik. Dunn (2018) menegaskan bahwa penelitian kebijakan publik memerlukan metode yang mampu mengaitkan analisis empiris dengan rekomendasi normatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga relevan bagi pengambilan keputusan pemerintahan.

1.2 Pengertian Metode Penelitian Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, organisasi birokrasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Karena objek kajiannya bersifat kompleks, multidimensional, dan sarat dengan nilai serta kepentingan politik, metode penelitian dalam administrasi publik memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan disiplin ilmu lain.

Denhardt dan Denhardt (2015) memandang administrasi publik sebagai bidang yang berfokus pada pelayanan publik (*public service*) dan tata kelola demokratis, sehingga penelitian di dalamnya tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai publik, partisipasi warga, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, metode penelitian administrasi publik harus mampu menangkap aspek empiris sekaligus normatif dari praktik pemerintahan.

Menurut Frederickson et al. (2018), penelitian administrasi publik merupakan upaya sistematis untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan, bagaimana organisasi publik bekerja, serta bagaimana dampak tindakan pemerintah terhadap masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa metode penelitian di bidang ini bersifat problem-oriented dan policy-relevant.

Di Indonesia, Dwiyanto (2011) menekankan bahwa penelitian administrasi publik berperan penting dalam mengkaji kinerja pelayanan publik, akuntabilitas birokrasi, serta reformasi sektor publik. Oleh karena itu, metode penelitian administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional, politik, dan sosial yang melingkupi birokrasi.

Secara konseptual, metode penelitian administrasi publik dapat didefinisikan sebagai:

“seperangkat prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, menjelaskan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik berdasarkan data empiris yang valid serta analisis yang sistematis.”

Definisi ini sejalan dengan pandangan O’Toole (2000) yang menyatakan bahwa penelitian administrasi publik harus memperhatikan dinamika implementasi kebijakan,

interaksi antaraktor, serta faktor lingkungan yang memengaruhi kinerja program pemerintah.

Dalam perspektif metodologi ilmu sosial, Raadschelders (2011) menegaskan bahwa administrasi publik bersifat interdisipliner, sehingga metode penelitian yang digunakan sering mengadopsi pendekatan dari sosiologi, ilmu politik, ekonomi, dan manajemen. Hal ini menjadikan penelitian administrasi publik kaya akan variasi metode, mulai dari survei kuantitatif hingga studi kasus kualitatif mendalam, serta desain eksperimental dan mixed methods.

Secara historis, perkembangan metode penelitian administrasi publik dapat ditelusuri dari paradigma klasik yang menekankan efisiensi organisasi (Wilson, 1887), pendekatan perilaku (*behavioral approach*) pada pertengahan abad ke-20 (Simon, 1947), hingga munculnya perspektif tata kelola (*governance*) dan jaringan kebijakan pada akhir abad ke-20 (Rhodes, 1997).

Dalam praktiknya, metode penelitian administrasi publik memiliki beberapa karakter utama:

1. Berorientasi pada kebijakan dan pelayanan publik, sebagaimana ditegaskan oleh Dunn (2018) dalam analisis kebijakan publik berbasis bukti.
2. Kontekstual, karena hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan kelembagaan lokal (Yin, 2018).

3. Multimetode, memadukan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan partisipatif (Creswell & Plano Clark, 2018).
4. Normatif sekaligus empiris, karena penelitian sering melibatkan pertimbangan nilai publik, etika, dan keadilan sosial (Denhardt & Denhardt, 2015).

Dengan karakter tersebut, metode penelitian administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan dan reformasi birokrasi. Weiss (1998) menekankan bahwa penelitian kebijakan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah, meskipun penggunaannya sering dipengaruhi oleh dinamika politik.

Dalam era pemerintahan digital, metode penelitian administrasi publik juga berkembang dengan memanfaatkan data administrasi pemerintah, *open data*, media sosial, serta analisis berbasis kecerdasan buatan. Janssen et al. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan big data dalam sektor publik membuka peluang baru bagi penelitian kebijakan yang lebih presisi, namun juga menimbulkan tantangan etika dan privasi yang perlu dikelola secara serius.

1.3 Hakikat dan Peran Penelitian Ilmiah

Penelitian ilmiah merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan praktik

sosial, termasuk dalam bidang administrasi publik. Hakikat penelitian ilmiah tidak hanya terletak pada aktivitas teknis pengumpulan data, tetapi juga pada proses berpikir sistematis dan reflektif yang mengikuti kaidah epistemologis tertentu.

Menurut Kerlinger (1973), penelitian ilmiah adalah suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap proposisi-proposisi hipotetik tentang hubungan antarfenomena. Definisi ini menekankan bahwa penelitian harus dilakukan secara terencana, menggunakan prosedur yang jelas, serta terbuka terhadap pengujian ulang. Senada dengan itu, Creswell (2014) memandang penelitian sebagai proses bertahap yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu masalah atau isu tertentu.

Dalam tradisi filsafat ilmu, Popper (1959) melalui teori falsifikasinya menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah berkembang bukan melalui pembuktian mutlak, melainkan melalui pengujian kritis terhadap teori-teori yang ada. Oleh karena itu, suatu hasil penelitian harus selalu terbuka untuk dipertanyakan dan diuji kembali oleh peneliti lain. Pandangan ini memperkuat karakter penelitian ilmiah sebagai proses dinamis dan kumulatif.

1.4 Perkembangan Metode dalam Administrasi Publik

Perkembangan metode penelitian dalam administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma

besar dalam ilmu sosial. Setiap paradigma membawa asumsi filosofis yang berbeda mengenai realitas sosial (ontologi), cara memperoleh pengetahuan (epistemologi), serta tujuan penelitian (aksiologi). Seiring meningkatnya kompleksitas persoalan pemerintahan, metode penelitian administrasi publik mengalami pergeseran dari dominasi pendekatan positivistik menuju pendekatan interpretatif, kritis, pragmatik, serta inovasi metodologis berbasis teknologi digital.

Raadschelders (2011) menegaskan bahwa administrasi publik merupakan disiplin yang bersifat pluralistik secara metodologis karena meminjam konsep dan teknik dari ilmu politik, sosiologi, ekonomi, serta manajemen publik. Keragaman tersebut menjadikan bidang ini terus berkembang dalam hal strategi penelitian dan teknik analisis.

1.4.1 Dominasi Pendekatan Positivistik dan Kuantitatif

Pada tahap awal perkembangan administrasi publik, khususnya pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, penelitian sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik yang menekankan objektivitas, pengukuran, dan pencarian hukum-hukum umum.

Akar pendekatan ini dapat ditelusuri pada tulisan Woodrow Wilson (1887) yang memisahkan administrasi dari politik dan menekankan efisiensi pemerintahan. Gagasan ini diperkuat oleh Frederick W. Taylor (1911) melalui *scientific management*, yang mengedepankan

standar kerja, pengukuran produktivitas, dan rasionalisasi organisasi.

Dalam kajian pengambilan keputusan, Herbert A. Simon (1947) melalui karya *Administrative Behavior* mengembangkan pendekatan empiris terhadap perilaku birokrasi, meskipun mengkritik asumsi rasionalitas sempurna. Tradisi positivistik ini kemudian diwujudkan dalam penggunaan survei skala besar, eksperimen kebijakan, analisis statistik inferensial, serta model ekonometrik untuk menguji hubungan sebab-akibat dalam sektor publik.

King, Keohane, dan Verba (1994) turut memperkuat tradisi ini dengan argumen bahwa penelitian sosial—baik kuantitatif maupun kualitatif—harus mengikuti prinsip inferensi ilmiah yang ketat agar menghasilkan generalisasi yang sah.

1.4.2 Munculnya Pendekatan Interpretatif dan Kualitatif

Sejak dekade 1970-an, kritik terhadap positivisme semakin berkembang, terutama karena pendekatan kuantitatif dianggap kurang mampu menangkap dimensi subjektif, nilai, serta makna yang melekat dalam tindakan aktor birokrasi.

Pendekatan interpretatif berakar pada konsep *verstehen* yang dikembangkan oleh Max Weber (1922), yang menekankan pentingnya memahami tindakan sosial dari perspektif pelaku. Dalam metodologi

ilmu sosial, Clifford Geertz (1973) melalui gagasan *thick description* memperkuat penggunaan etnografi dan observasi partisipatif untuk menggali konteks budaya organisasi.

Dalam administrasi publik, pendekatan ini banyak digunakan untuk meneliti budaya birokrasi, proses implementasi kebijakan, serta interaksi antara aparat pemerintah dan masyarakat. Yin (2018) mengembangkan studi kasus sebagai strategi penelitian yang relevan untuk memahami fenomena kebijakan dalam konteks kehidupan nyata, sedangkan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) memperkenalkan teknik analisis data kualitatif yang sistematis.

1.4.3 Perkembangan Pendekatan Kritis dalam Administrasi Publik

Seiring berkembangnya teori kritis dalam ilmu sosial, pendekatan kritis juga masuk ke dalam penelitian administrasi publik dengan fokus pada relasi kekuasaan, ideologi, ketimpangan sosial, dan struktur dominasi dalam birokrasi.

Landasan filosofis pendekatan ini berasal dari pemikiran Sekolah Frankfurt, khususnya Horkheimer (1937) yang membedakan teori tradisional dan teori kritis, serta Habermas (1984) yang menekankan rasionalitas komunikatif dan emansipasi sosial.

Dalam konteks administrasi publik, pendekatan kritis digunakan untuk mengkaji isu-isu partisipasi publik,

eksklusi sosial, bias kebijakan, dan akuntabilitas demokratis. Denhardt dan Denhardt (2015) melalui paradigma *New Public Servicemenggarisbawahi* pentingnya nilai demokrasi, pelayanan publik, dan keterlibatan warga, yang sejalan dengan semangat penelitian kritis.

Metode seperti *participatory action research*, analisis wacana kritis, dan studi kebijakan berbasis komunitas menjadi semakin menonjol dalam tradisi ini.

1.4.4 Pendekatan Pragmatis dan Lahirnya Mixed Methods

Memasuki akhir abad ke-20, muncul paradigma pragmatik yang berfokus pada pemecahan masalah konkret dibandingkan perdebatan filosofis semata. Paradigma ini membuka ruang bagi penggunaan berbagai metode secara fleksibel sesuai dengan tujuan penelitian.

Tokoh penting dalam pengembangan pendekatan ini adalah Tashakkori dan Teddlie (1998; 2010), yang memformulasikan *mixed methods research* sebagai integrasi sistematis antara data kuantitatif dan kualitatif. Creswell dan Plano Clark (2018) kemudian mengembangkan berbagai desain *mixed methods*, seperti *convergent*, *explanatory* *sequential*, dan *exploratory sequential*.

Dalam administrasi publik, pendekatan ini sangat relevan untuk evaluasi kebijakan dan program pemerintah karena memungkinkan pengukuran dampak secara statistik

sekaligus pemahaman mendalam tentang proses implementasi dan pengalaman para pemangku kepentingan.

1.4.5 Era Digital dan Inovasi Metodologis Kontemporer

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah merevolusi metode penelitian administrasi publik. Pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar melalui sistem e-government, *open government data*, dan platform media sosial.

Janssen et al. (2017) menunjukkan bahwa big data dalam sektor publik menciptakan peluang untuk analisis kebijakan berbasis waktu nyata, tetapi juga memunculkan tantangan serius terkait privasi, keamanan, dan etika penggunaan data. Analisis jaringan kebijakan (*policy network analysis*) semakin berkembang untuk memetakan kolaborasi antaraktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (Provan & Kenis, 2008).

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan dan *machine learning* dalam administrasi publik mulai dikaji secara luas untuk mendukung prediksi kebutuhan layanan, perencanaan kebijakan adaptif, serta pengawasan kinerja (Wirtz et al., 2019).

1.4.6 Sintesis Perkembangan Metodologis

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan metode dalam administrasi publik dapat disarikan ke dalam lima fase utama:

1. Dominasi positivistik-kuantitatif,
2. Penguatan pendekatan interpretatif-kualitatif,
3. Masuknya perspektif kritis,
4. Integrasi pragmatis melalui mixed methods,
5. Inovasi berbasis teknologi digital dan analitik canggih.

Evolusi ini mencerminkan tuntutan terhadap metode penelitian yang semakin adaptif, kontekstual, etis, dan relevan bagi pengambilan keputusan publik di era pemerintahan modern.

1.5 Ruang Lingkup dan Fungsi Penelitian Administrasi Publik

Penelitian administrasi publik merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan memahami, menjelaskan, dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner, administrasi publik mengintegrasikan perspektif ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum, dan manajemen dalam mengkaji organisasi publik dan kebijakan pemerintah.

Raadschelders (2011) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup studi tentang institusi pemerintahan, proses kebijakan, hubungan antarpemerintah, serta interaksi negara dan masyarakat. Sementara itu,

Frederickson et al. (2018) menekankan bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi desain organisasi publik, kepemimpinan, etika, kinerja pelayanan, serta tata kelola demokratis.

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian Administrasi Publik

Ruang lingkup penelitian administrasi publik berkembang seiring perubahan peran negara dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif.

1. Kebijakan Publik dan Proses Perumusannya

Penelitian kebijakan publik mencakup agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Lasswell (1956) memandang analisis kebijakan sebagai pendekatan multidisipliner untuk membantu pengambilan keputusan publik. Dunn (2018) kemudian mengembangkan kerangka analisis kebijakan berbasis masalah dan bukti empiris.

2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi meneliti bagaimana kebijakan dilaksanakan oleh birokrasi dan aktor nonnegara. Pressman dan Wildavsky (1973) melalui studi klasiknya menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan sering terjadi bukan pada tahap perumusan, melainkan pada proses implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) kemudian mengembangkan model implementasi yang

memperhatikan faktor hukum, organisasi, dan lingkungan sosial.

3. Pelayanan Publik

Penelitian pelayanan publik menitikberatkan pada kualitas layanan, kepuasan pengguna, serta inovasi pelayanan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) mengembangkan model SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan, yang banyak diadaptasi dalam sektor publik. Di sisi lain, Osborne (2010) memperkenalkan konsep *public service-dominant logic* yang memandang warga sebagai co-producer layanan.

4. Reformasi Birokrasi

Penelitian reformasi birokrasi mengkaji perubahan struktur, budaya organisasi, dan sistem manajemen publik. Pollitt dan Bouckaert (2017) menganalisis reformasi manajemen publik di berbagai negara, termasuk pergeseran menuju *New Public Management* dan *post-NPM reforms*.

5. Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Kajian tata kelola meneliti jaringan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta peran aktor nonnegara. Rhodes (1997) memperkenalkan konsep *policy networks*, sedangkan Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model *collaborative governance*.

6. Manajemen Sektor Publik

Ruang lingkup ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan publik, dan kinerja organisasi pemerintah. Hood (1991) mengemukakan prinsip-prinsip *New Public Management*, sementara Moynihan dan Pandey (2007) meneliti pengaruh sistem manajemen kinerja terhadap motivasi pegawai publik.

7. Partisipasi Masyarakat

Penelitian partisipasi publik mengkaji keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan. Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation* menjadi rujukan klasik dalam memahami tingkat-tingkat partisipasi masyarakat.

8. Hubungan Pusat–Daerah

Kajian ini meneliti desentralisasi, otonomi daerah, serta koordinasi antarpemerintah. Rondinelli (1981) membahas desentralisasi administratif dan fiskal, sedangkan Faguet (2014) meneliti dampak desentralisasi terhadap responsivitas pemerintah lokal.

1.5.2 Fungsi Penelitian Administrasi Publik

Selain memiliki ruang lingkup yang luas, penelitian administrasi publik menjalankan sejumlah fungsi utama dalam pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan.

1. Fungsi Deskriptif

Fungsi deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena administrasi publik secara sistematis dan faktual. Babbie (2016) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif membantu memetakan karakteristik organisasi publik, pola pelayanan, atau perilaku birokrasi tanpa terlebih dahulu menguji hubungan kausal.

2. Fungsi Eksplanatif

Penelitian eksplanatif berfokus pada penjelasan hubungan sebab-akibat antarvariabel, misalnya antara desain kebijakan dan kinerja implementasi. King, Keohane, dan Verba (1994) menekankan pentingnya inferensi kausal dalam penelitian sosial agar dapat menghasilkan teori yang lebih kuat.

3. Fungsi Evaluatif

Penelitian evaluatif menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak program pemerintah. Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) menegaskan bahwa evaluasi program merupakan komponen penting dalam akuntabilitas publik dan pembelajaran kebijakan.

4. Fungsi Prediktif

Fungsi prediktif bertujuan memproyeksikan kemungkinan dampak suatu kebijakan sebelum atau sesudah diimplementasikan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa analisis kebijakan sering melibatkan teknik peramalan (*forecasting*) untuk memperkirakan konsekuensi alternatif kebijakan.

5. Fungsi Preskriptif

Fungsi preskriptif berorientasi pada pemberian rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis ilmiah. Lasswell (1956) memandang ilmu kebijakan sebagai *policy sciences of democracy* yang tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga membantu memilih tindakan publik yang paling tepat.

1.6 Penelitian Akademik dan Penelitian Terapan dalam Administrasi Publik

Dalam disiplin administrasi publik, penelitian dapat dibedakan berdasarkan orientasi dan tujuannya menjadi dua kategori besar, yaitu penelitian akademik (*basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*). Keduanya memiliki fokus, karakteristik, serta kontribusi yang berbeda, namun tidak bersifat saling meniadakan. Justru, dalam praktik pengembangan ilmu dan kebijakan publik modern, kedua orientasi ini dipahami sebagai spektrum yang saling melengkapi.

Menurut Neuman (2014), penelitian dasar bertujuan memperluas pemahaman teoritis tentang fenomena sosial, sedangkan penelitian terapan diarahkan untuk menghasilkan solusi praktis terhadap persoalan nyata yang dihadapi oleh organisasi atau masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, kedua jenis penelitian tersebut berperan penting dalam menjembatani teori dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

1.6.1 Penelitian Akademik (*Basic Research*)

Penelitian akademik dalam administrasi publik berfokus pada pengembangan teori, pengujian konsep, serta kontribusi terhadap perdebatan ilmiah dalam literatur internasional maupun nasional. Orientasi utama penelitian ini adalah peningkatan pemahaman konseptual tentang bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, serta bagaimana nilai-nilai publik dibentuk dan dipertahankan.

Merton (1968) menjelaskan bahwa penelitian dasar berkontribusi terhadap pembangunan teori melalui pengembangan konsep-konsep tingkat menengah (*middle-range theories*) yang dapat diuji secara empiris. Dalam administrasi publik, pendekatan ini tampak dalam studi tentang perilaku birokrasi (Simon, 1947), teori implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983), serta konsep tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Penelitian akademik juga sering menggunakan desain penelitian yang ketat secara metodologis, seperti eksperimen, survei longitudinal, analisis komparatif lintas negara, atau pemodelan statistik lanjutan, dengan tujuan menghasilkan generalisasi teoretis. King, Keohane, dan Verba (1994) menekankan bahwa penelitian akademik yang kuat harus mampu menarik inferensi kausal yang sah dari data empiris.

Selain itu, Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian akademik umumnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau prosiding konferensi, sehingga

berkontribusi pada akumulasi pengetahuan kolektif dalam disiplin ilmu.

1.6.2 Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Berbeda dengan orientasi akademik, penelitian terapan dalam administrasi publik diarahkan pada pemecahan masalah konkret yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Fokus utamanya adalah penyediaan informasi empiris yang dapat digunakan langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan, perbaikan layanan publik, atau reformasi organisasi pemerintah.

Patton (2015) menyebut penelitian terapan sebagai *utilization-focused evaluation*, yaitu penelitian yang dirancang sejak awal agar hasilnya relevan dan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan. Dalam tradisi analisis kebijakan, Dunn (2018) menjelaskan bahwa penelitian terapan sering berbentuk evaluasi program, analisis biaya-manfaat, studi dampak kebijakan, serta peramalan konsekuensi alternatif kebijakan.

Contoh penelitian terapan dalam administrasi publik meliputi evaluasi program bantuan sosial, pengukuran kualitas pelayanan kesehatan, analisis efektivitas reformasi birokrasi daerah, atau studi implementasi kebijakan desentralisasi. Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) menegaskan bahwa evaluasi program merupakan salah satu bentuk utama penelitian terapan dalam sektor publik karena menyediakan dasar empiris untuk memperbaiki atau menghentikan kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian terapan cenderung pragmatis dan kontekstual, sering kali memanfaatkan *mixed methods* (Tashakkori & Teddlie, 2010) agar dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan mudah diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan.

1.6.3 Relasi dan Sinergi antara Penelitian Akademik dan Terapan

Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, penelitian akademik dan terapan tidak bersifat dikotomis. Dalam praktiknya, keduanya berada dalam hubungan timbal balik yang saling memperkaya.

Weiss (1998) menjelaskan bahwa hasil penelitian akademik dapat memengaruhi kebijakan secara tidak langsung melalui proses konseptual, yakni dengan membentuk cara berpikir para pembuat kebijakan tentang suatu masalah. Sebaliknya, persoalan nyata dalam praktik pemerintahan sering menjadi sumber inspirasi bagi penelitian akademik dan pengembangan teori baru.

Stokes (1997) dalam kerangka *Pasteur's Quadrant* menawarkan perspektif bahwa penelitian dapat sekaligus berorientasi pada pengembangan teori dan pemecahan masalah praktis. Dalam administrasi publik, banyak studi yang berada dalam kuadran ini, misalnya penelitian tentang tata kelola kolaboratif atau inovasi pelayanan publik yang mengembangkan konsep teoretis sekaligus memberikan implikasi kebijakan konkret.

Denhardt dan Denhardt (2015) juga menekankan bahwa administrasi publik sebagai disiplin normatif memerlukan keseimbangan antara analisis akademik yang ketat dan orientasi praktis terhadap pelayanan publik serta nilai-nilai demokrasi.

BAB II

PARADIGMA, PENDEKATAN, DAN DESAIN PENELITIAN

2.2 Pendekatan dalam Penelitian Administrasi Publik

Pendekatan penelitian menunjukkan orientasi strategis yang digunakan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mengonstruksi pengetahuan ilmiah. Berbeda dengan paradigma yang berakar pada asumsi filosofis tentang realitas dan pengetahuan, pendekatan berada pada tingkat metodologis yang lebih operasional dan memengaruhi jenis data yang dikumpulkan, teknik analisis yang dipilih, serta bentuk kesimpulan yang dihasilkan.

Creswell (2014) menegaskan bahwa pendekatan penelitian mencerminkan posisi epistemologis peneliti sekaligus tujuan praktis dari penelitian. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini memiliki signifikansi khusus karena fenomena yang dikaji seperti kebijakan publik, birokrasi, pelayanan masyarakat, serta hubungan negara—warga—bersifat multidimensional dan sarat kepentingan politik serta nilai normatif (Frederickson, Smith, Larimer, & Licari, 2018). Oleh sebab itu, administrasi publik tidak dapat dikaji hanya melalui satu sudut pandang metodologis, melainkan memerlukan keberagaman pendekatan yang saling melengkapi.

Empat pendekatan utama yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik adalah pendekatan positivistik, interpretatif, kritis, dan pragmatik, sebagaimana dirumuskan dalam tipologi paradigma penelitian sosial oleh Guba dan Lincoln (2005) serta dikembangkan lebih lanjut dalam metodologi kontemporer oleh Creswell dan Plano Clark (2018).

2.2.1 Pendekatan Positivistik

Pendekatan positivistik berpijak pada asumsi bahwa realitas sosial bersifat objektif dan tunduk pada hukum-hukum kausal yang dapat diamati melalui pengukuran empiris. Akar historis pendekatan ini berasal dari positivisme Auguste Comte pada abad ke-19 (1830), yang kemudian berkembang menjadi *post-positivism* pada paruh kedua abad ke-20, sebagaimana dirumuskan oleh Phillips dan Burbules (2000). Dalam versi modernnya, pendekatan ini mengakui bahwa pengetahuan ilmiah bersifat probabilistik, tetapi tetap menempatkan pengujian hipotesis dan analisis statistik sebagai instrumen utama.

Dalam penelitian administrasi publik, pendekatan positivistik lazim digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan publik, kinerja organisasi pemerintah, kualitas pelayanan, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program. King, Keohane, dan Verba (1994) menekankan bahwa penelitian kuantitatif berorientasi positivistik bertujuan menghasilkan penjelasan kausal melalui desain penelitian yang sistematis, valid, dan dapat direplikasi.

Dalam praktik kontemporer, pendekatan ini semakin diperkaya oleh pemanfaatan data administratif pemerintah, eksperimen kebijakan, dan analisis statistik lanjutan dalam kerangka *evidence-based policy* (Dunn, 2018; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dengan berkembangnya pemerintahan digital, penggunaan *big data* sektor publik juga memperluas cakupan pendekatan positivistik dalam menganalisis perilaku birokrasi dan respons masyarakat terhadap kebijakan.

2.2.2 Pendekatan Interpretatif

Berbeda dari positivisme, pendekatan interpretatif memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibangun melalui interaksi manusia. Penelitian dalam kerangka ini tidak bertujuan utama untuk mengukur, melainkan memahami bagaimana aktor-aktor administrasi publik seperti pejabat pemerintah, pelaksana kebijakan, maupun warga untuk menafsirkan aturan, prosedur, dan kebijakan yang mereka jalani.

Pendekatan ini berakar pada konsep *verstehen* yang dikemukakan Max Weber dalam *Economy and Society* (1922), serta dikembangkan lebih lanjut melalui fenomenologi sosial Alfred Schutz (1967) dan antropologi simbolik Clifford Geertz (1973). Dalam metodologi kualitatif modern, orientasi interpretatif diperkuat oleh karya Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta Yin (2018), yang menempatkan studi kasus dan analisis tematik sebagai strategi utama untuk memahami fenomena kebijakan dalam konteks nyata.

Dalam administrasi publik, pendekatan interpretatif banyak digunakan untuk mengkaji budaya organisasi birokrasi, gaya kepemimpinan publik, dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta relasi antara aparat dan masyarakat dalam pelayanan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas praktik administrasi yang sering kali tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif semata.

2.2.3 Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis berpijak pada pandangan bahwa realitas sosial tidak netral, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur sosial yang timpang. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga untuk mengungkap ketidakadilan dan berkontribusi pada perubahan sosial.

Landasan teoretis pendekatan ini berasal dari teori kritis Sekolah Frankfurt, khususnya karya Horkheimer (1937) dan Habermas (1984) mengenai rasionalitas komunikatif dan emansipasi sosial. Dalam perkembangan mutakhir, pendekatan kritis juga diperkaya oleh perspektif feminis, pascakolonial, dan teori kebijakan berbasis kekuasaan, seperti yang dirumuskan oleh Flyvbjerg (2001) dalam analisis politik perencanaan publik.

Dalam kajian administrasi publik, pendekatan kritis digunakan untuk meneliti isu-isu seperti marginalisasi kelompok masyarakat dalam pelayanan publik, bias kebijakan terhadap wilayah tertentu, korupsi struktural

dalam birokrasi, serta politik distribusi sumber daya negara. Denhardt dan Denhardt (2015), melalui konsep *New Public Service*, menegaskan pentingnya orientasi normatif dalam administrasi publik dengan menempatkan keadilan sosial, demokrasi, dan kepentingan publik sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.4 Pendekatan Pragmatik

Pendekatan pragmatik tidak mengikatkan diri secara ketat pada satu paradigma filosofis tertentu, melainkan berfokus pada pemecahan masalah konkret dalam praktik kebijakan dan administrasi publik. Prinsip dasarnya adalah memilih metode yang paling efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian, tanpa dikotomi kaku antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Akar filosofis pragmatisme berasal dari pemikiran William James (1907) dan John Dewey (1938), yang menilai kebenaran pengetahuan berdasarkan manfaat praktisnya dalam kehidupan sosial. Dalam metodologi modern, pendekatan ini menjadi fondasi berkembangnya *mixed methods research*, sebagaimana dirumuskan oleh Tashakkori dan Teddlie (2010) serta Creswell dan Plano Clark (2018).

Dalam administrasi publik kontemporer, pendekatan pragmatik sangat relevan dalam penelitian evaluasi program pemerintah, analisis kebijakan berbasis bukti, studi dampak reformasi birokrasi, serta inovasi pelayanan publik berbasis data digital. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti mengintegrasikan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga aplikatif bagi pengambil keputusan.

2.3 Desain Penelitian dalam Administrasi Publik

Desain penelitian merupakan kerangka strategis yang mengarahkan keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, pemilihan metode pengumpulan data, teknik analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dalam metodologi ilmu sosial, desain penelitian berfungsi sebagai “arsitektur” penelitian yang memastikan keterkaitan logis antara tujuan studi, data empiris, dan klaim ilmiah yang dihasilkan (Creswell, 2014; Maxwell, 2012).

Dalam konteks administrasi publik, desain penelitian memiliki peran yang sangat penting karena fenomena yang dikaji seperti kebijakan publik, kinerja birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan masyarakat—bersifat kompleks, kontekstual, serta dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan. Pollitt dan Bouckaert (2017) menegaskan bahwa penelitian sektor publik menuntut desain yang sensitif terhadap perbedaan institusional, struktur pemerintahan, dan dinamika reformasi administrasi di berbagai negara atau daerah.

Secara umum, desain penelitian yang digunakan dalam administrasi publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa orientasi utama, yang tidak berdiri secara

terpisah, melainkan sering saling beririsan sesuai dengan tujuan analitis penelitian.

Desain eksploratif digunakan ketika pengetahuan tentang suatu fenomena masih terbatas atau ketika peneliti berupaya mengidentifikasi pola, konsep, serta variabel penting yang belum terdefinisi secara jelas. Yin (2018) dan Stebbins (2001) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif lazim memanfaatkan studi kasus awal, wawancara terbuka, serta analisis dokumen untuk membangun pemahaman awal terhadap suatu masalah kebijakan atau praktik administratif. Dalam administrasi publik, desain ini kerap digunakan untuk mengkaji inovasi pelayanan publik, kebijakan baru yang sedang diuji coba, atau dinamika implementasi program di tingkat lokal sebelum dilakukan penelitian yang lebih terstruktur.

Desain deskriptif berfokus pada upaya menggambarkan secara sistematis karakteristik suatu fenomena, populasi, atau proses administratif tertentu. Menurut Neuman (2014), penelitian deskriptif bertujuan menyajikan potret empiris mengenai “apa yang terjadi” tanpa secara langsung menguji hubungan sebab-akibat. Dalam administrasi publik, desain ini sering digunakan untuk memetakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, struktur organisasi birokrasi, pola distribusi anggaran, atau praktik koordinasi antarinstansi. Data yang digunakan dapat berupa survei, statistik administrasi, maupun observasi lapangan, yang dianalisis untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual sektor publik.

Desain eksplanatif diarahkan untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel dan menguji hipotesis yang diturunkan dari teori. King, Keohane, dan Verba (1994) menekankan bahwa desain eksplanatif dalam ilmu sosial bertujuan menghasilkan inferensi kausal yang sah melalui pengendalian variabel, perbandingan sistematis, atau penggunaan teknik statistik lanjutan. Dalam administrasi publik, desain ini banyak diterapkan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, hubungan antara kepemimpinan birokrasi dan kinerja organisasi, atau dampak desentralisasi fiskal terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam perkembangan mutakhir, desain eksplanatif juga memanfaatkan eksperimen kebijakan dan *quasi-experimental designs* untuk memperkuat klaim sebab-akibat (Shadish, Cook, & Campbell, 2002).

Desain evaluatif berorientasi pada penilaian nilai, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan atau program pemerintah. Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004) mendefinisikan evaluasi program sebagai penerapan metode ilmiah untuk menilai apakah suatu intervensi publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Dalam administrasi publik, desain evaluatif sering digunakan dalam studi bantuan sosial, reformasi birokrasi, kebijakan pendidikan atau kesehatan, serta inovasi pelayanan digital. Weiss (1998) menambahkan bahwa penelitian evaluatif tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen politik dan administratif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Desain komparatif menempatkan perbandingan sebagai strategi utama analisis, baik antarwilayah, antarorganisasi, antarperiode waktu, maupun antarnegara. Lijphart (1971) memandang metode komparatif sebagai pendekatan penting dalam ilmu sosial untuk menguji teori dalam konteks jumlah kasus yang terbatas. Dalam administrasi publik, desain ini digunakan untuk membandingkan kebijakan desentralisasi di berbagai daerah, variasi kinerja pelayanan publik antarprovinsi, atau perbedaan hasil reformasi administrasi lintas negara. Pollitt (2013) menekankan bahwa studi komparatif sektor publik harus mempertimbangkan perbedaan institusional dan budaya administratif agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat simplistik.

Pemilihan desain penelitian tidak dapat dilakukan secara arbitrer, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, pertanyaan riset, ketersediaan data, serta paradigma yang dianut peneliti. Maxwell (2012) menekankan bahwa koherensi antara tujuan penelitian, desain, metode, dan interpretasi temuan merupakan syarat utama validitas dalam penelitian sosial. Dalam administrasi publik, kesesuaian tersebut menjadi semakin penting karena hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan reformasi birokrasi, sehingga tuntutan terhadap ketepatan metodologis dan relevansi praktis menjadi sangat tinggi.

2.4 Penelitian Kuantitatif dalam Administrasi Publik

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan metodologis yang berfokus pada pengukuran fenomena sosial melalui

data numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel atau mengevaluasi dampak suatu intervensi kebijakan. Dalam tradisi metodologi ilmu sosial, pendekatan ini berakar pada paradigma post-positivistik yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dapat diamati secara empiris, meskipun selalu terbuka terhadap kesalahan pengukuran dan keterbatasan inferensi (Phillips & Burbules, 2000; Creswell, 2014).

Secara konseptual, penelitian kuantitatif biasanya mengikuti alur deduktif, yakni berangkat dari teori atau temuan sebelumnya, kemudian merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan instrumen terstandar, dan diakhiri dengan analisis statistik untuk menarik kesimpulan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas (Neuman, 2014). Dalam administrasi publik, alur ini memungkinkan peneliti menghubungkan konsep-konsep teoretis seperti akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, atau kualitas pelayanan dengan indikator empiris yang terukur. King, Keohane, dan Verba (1994) menegaskan bahwa tujuan utama penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial adalah menghasilkan inferensi yang sahih mengenai pola dan hubungan kausal, baik melalui perbandingan antarunit analisis maupun melalui pengendalian statistik terhadap variabel pengganggu. Prinsip ini sangat relevan dalam administrasi publik, di mana peneliti sering dihadapkan pada kebutuhan untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar menyebabkan perubahan tertentu dalam perilaku birokrasi atau kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik kontemporer, penelitian kuantitatif sektor publik semakin berkembang dengan pemanfaatan desain *quasi-experimental* dan eksperimental lapangan untuk mengevaluasi program pemerintah. Shadish, Cook, dan Campbell (2002) menguraikan berbagai desain kausal seperti *difference in differences*, *regression discontinuity*, dan *matching techniques* yang kini banyak digunakan dalam evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini diperkuat oleh gerakan *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya keputusan pemerintah didasarkan pada temuan empiris yang dapat diverifikasi (Dunn, 2018; Pollitt & Bouckaert, 2017).

Karakteristik utama penelitian kuantitatif dalam administrasi publik tercermin dalam penggunaan variabel yang didefinisikan secara operasional dan diukur melalui indikator numerik. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat kepuasan masyarakat, waktu penyelesaian layanan, rasio anggaran, atau indeks partisipasi publik. Agar hasil penelitian memiliki validitas eksternal, pengambilan sampel dilakukan secara sistematis dan representatif, misalnya melalui *probability sampling*, sebagaimana dijelaskan oleh Fowler (2014) dalam metodologi survei modern.

Instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, skala sikap, atau format pencatatan administratif disusun secara terstandar untuk meminimalkan bias pengukuran dan memungkinkan replikasi penelitian. Dalam tahap analisis, teknik statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola data, sementara statistik inferensial seperti regresi multivariat, analisis jalur, atau *structural*

equation modeling digunakan untuk menguji hipotesis dan model teoretis (Hair et al., 2019).

Dalam administrasi publik, penelitian kuantitatif banyak diterapkan untuk mengukur kinerja pelayanan publik, menilai efektivitas program bantuan sosial, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan aparatur terhadap regulasi, serta mengkaji hubungan antara partisipasi warga dan legitimasi kebijakan. Frederickson et al. (2018) menekankan bahwa pendekatan kuantitatif memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengelolaan sektor publik berbasis hasil (*performance-based management*) dan akuntabilitas publik.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas cakupan penelitian kuantitatif dalam administrasi publik. Data administratif pemerintah, *open government data*, serta jejak digital dari platform pelayanan publik kini menjadi sumber data penting bagi analisis kebijakan skala besar. Janssen et al. (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan *big data* sektor publik membuka peluang bagi analisis prediktif dan pemantauan kebijakan secara real time, meskipun juga menimbulkan tantangan serius terkait privasi, keamanan data, dan etika penelitian.

Dengan demikian, penelitian kuantitatif dalam administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengujian teori, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, evaluasi program pemerintah, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam era pemerintahan digital.

2.5 Penelitian Kualitatif dalam Administrasi Publik

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif para aktor yang terlibat. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran dan generalisasi statistik, penelitian kualitatif berakar pada paradigma interpretatif dan konstruktivistik yang memandang realitas sosial sebagai hasil interaksi dan penafsiran manusia (Denzin & Lincoln, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Dalam kerangka ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan dan interpretasi data. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan maupun non-partisipan, diskusi kelompok terarah (*focus group discussions*), serta analisis dokumen kebijakan dan arsip organisasi. Yin (2018) menekankan bahwa pendekatan kualitatif sangat efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*), khususnya dalam konteks kebijakan publik dan proses administratif yang kompleks.

Secara epistemologis, penelitian kualitatif biasanya mengikuti logika induktif, yakni membangun konsep, kategori, dan proposisi teoretis dari data lapangan, bukan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya secara ketat. Charmaz (2014), melalui pendekatan *constructivist grounded theory*, menjelaskan bahwa teori dapat dikembangkan secara sistematis dari proses pengodean data dan refleksi analitis yang berulang. Dalam administrasi publik, pendekatan ini

memungkinkan lahirnya pemahaman baru tentang praktik birokrasi, relasi kekuasaan dalam implementasi kebijakan, serta respons masyarakat terhadap pelayanan publik.

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah perhatian terhadap konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang mbingkai tindakan para aktor. Maxwell (2012) menegaskan bahwa makna tindakan administratif tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan institusionalnya, seperti struktur organisasi pemerintah, regulasi yang berlaku, maupun budaya birokrasi setempat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering menggunakan desain yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan peneliti menyesuaikan fokus penelitian seiring berkembangnya pemahaman di lapangan.

Dalam kajian administrasi publik, metode kualitatif banyak digunakan untuk menelaah proses implementasi kebijakan, konflik antaraktor dalam jaringan kebijakan, praktik kepemimpinan publik, serta dinamika koordinasi lintas sektor. Lipsky (1980), melalui konsep *street-level bureaucracy*, menunjukkan bagaimana wawancara dan observasi terhadap aparat pelaksana di garis depan dapat mengungkap bagaimana kebijakan publik sesungguhnya dibentuk dalam praktik sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen resmi. Kajian semacam ini tetap relevan hingga kini dan terus dikembangkan dalam studi kebijakan kontemporer.

Perkembangan mutakhir metodologi kualitatif juga ditandai oleh penggunaan analisis tematik

sistematis, *process tracing*, dan etnografi organisasi dalam studi sektor publik. Saldaña (2016) menguraikan teknik pengodean kualitatif yang memungkinkan peneliti mengorganisasi data secara transparan dan analitis, sementara Beach dan Pedersen (2019) mengembangkan *process tracing* sebagai strategi untuk menelusuri mekanisme kausal dalam kebijakan publik secara mendalam.

Di era pemerintahan digital, penelitian kualitatif dalam administrasi publik turut memanfaatkan sumber data baru, seperti arsip daring pemerintah, forum partisipasi publik digital, serta interaksi di platform pelayanan elektronik. Namun demikian, Denzin dan Lincoln (2018) menegaskan bahwa prinsip etika penelitian—seperti persetujuan partisipan, kerahasiaan, dan sensitivitas terhadap relasi kekuasaan—tetap menjadi fondasi utama dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti berhadapan dengan isu-isu sensitif dalam birokrasi dan kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian kualitatif memainkan peran strategis dalam administrasi publik tidak hanya sebagai sarana eksplorasi fenomena dan pengembangan teori, tetapi juga sebagai alat refleksi kritis terhadap praktik pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas dunia kebijakan dan birokrasi yang sering kali luput dari analisis kuantitatif, sekaligus menyediakan dasar konseptual yang kuat bagi reformasi administrasi dan inovasi pelayanan publik.

2.6 Mixed Methods dalam Penelitian Administrasi Publik

Pendekatan *mixed methods* merujuk pada strategi penelitian yang secara sistematis mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu desain studi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan penggunaan satu metode tunggal dalam menjelaskan kompleksitas realitas sosial, khususnya dalam bidang administrasi publik yang sarat dengan dimensi institusional, politik, dan normatif.

Tashakkori dan Teddlie (2010) mendefinisikan *mixed methods research* sebagai integrasi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kuantitatif serta kualitatif dalam satu penelitian atau rangkaian studi yang saling berhubungan. Definisi ini kemudian diperkaya oleh Creswell dan Plano Clark (2018) yang menekankan bahwa integrasi kedua pendekatan tersebut bukan sekadar penempatan dua jenis data secara paralel, melainkan harus dilakukan secara eksplisit pada tahap desain, pengumpulan data, analisis, maupun interpretasi hasil.

Secara filosofis, *mixed methods* sering dikaitkan dengan paradigma pragmatik yang menempatkan pemecahan masalah praktis sebagai tujuan utama penelitian dan membebaskan peneliti dari dikotomi kaku antara positivisme dan interpretivisme (Morgan, 2014). Dalam administrasi publik, orientasi pragmatik ini sangat relevan karena penelitian sering dituntut menghasilkan

rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris sekaligus sensitif terhadap konteks sosial dan kelembagaan.

Dalam praktik metodologis, terdapat beberapa pola desain utama dalam *mixed methods*. Salah satu yang paling sering digunakan adalah desain *sequential explanatory*, di mana penelitian dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan studi kualitatif untuk menjelaskan, memperdalam, atau menafsirkan temuan statistik. Creswell dan Plano Clark (2018) menunjukkan bahwa desain ini sangat efektif dalam evaluasi kebijakan publik, misalnya ketika survei menunjukkan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan dan wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap penyebab di balik temuan tersebut.

Sebaliknya, desain *sequential exploratory* memulai penelitian dengan eksplorasi kualitatif guna mengidentifikasi konsep, pola, atau variabel penting, yang kemudian diikuti dengan pengukuran kuantitatif dalam skala lebih luas untuk menguji generalisasi temuan awal. Model ini kerap digunakan dalam administrasi publik ketika suatu inovasi kebijakan atau praktik birokrasi masih relatif baru dan belum banyak dikaji secara empiris.

Desain lain yang banyak diterapkan adalah *concurrent triangulation* disebut pula *convergent design* di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara simultan, dianalisis secara terpisah, lalu dibandingkan atau diintegrasikan untuk melihat konsistensi maupun

perbedaan hasil. Menurut Greene, Caracelli, dan Graham (1989), strategi triangulasi ini bertujuan meningkatkan validitas temuan melalui pemeriksaan silang antarjenis data, sekaligus memperkaya interpretasi hasil penelitian.

Dalam administrasi publik, pendekatan *mixed methods* sangat relevan untuk penelitian evaluasi program pemerintah, studi kualitas pelayanan publik, analisis reformasi birokrasi, serta kajian implementasi kebijakan lintas sektor. Pollitt dan Bouckaert (2017) menegaskan bahwa evaluasi reformasi sektor publik membutuhkan kombinasi indikator kinerja kuantitatif dengan pemahaman kualitatif mengenai proses organisasi dan resistensi aktor birokrasi. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil, tetapi juga bagaimana dan mengapa hasil tersebut tercapai.

Perkembangan mutakhir juga menunjukkan bahwa *mixed methods* semakin penting dalam penelitian administrasi publik berbasis data digital. Analisis statistik terhadap *big data* pelayanan publik dapat dipadukan dengan wawancara atau etnografi digital untuk memahami pengalaman pengguna dan implikasi kebijakan secara lebih mendalam (Janssen et al., 2017). Integrasi semacam ini memperluas kapasitas peneliti dalam menjawab pertanyaan kebijakan yang kompleks di era pemerintahan elektronik.

Dengan demikian, *mixed methods* tidak sekadar merupakan kompromi antara dua tradisi metodologis, melainkan sebuah strategi penelitian yang kuat untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih utuh, relevan, dan

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan publik. Dalam administrasi publik kontemporer, pendekatan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap kebijakan berbasis bukti, akuntabilitas pemerintah, serta tata kelola yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

BAB III

PERUMUSAN MASALAH DAN LANDASAN TEORETIK

3.1 Perumusan Masalah Penelitian dalam Administrasi Publik

Perumusan masalah penelitian merupakan tahap fundamental yang menentukan arah, kedalaman, serta kualitas keseluruhan proses penelitian ilmiah. Dalam metodologi ilmu sosial, masalah penelitian berfungsi sebagai titik tolak bagi penyusunan tujuan penelitian, pengembangan kerangka teoretik, pemilihan desain metodologis, hingga interpretasi hasil temuan empiris. Maxwell (2012) menegaskan bahwa kejelasan perumusan masalah merupakan prasyarat utama bagi validitas konseptual suatu penelitian, karena menentukan apa yang sebenarnya ingin dijelaskan, dipahami, atau dievaluasi oleh peneliti.

Secara konseptual, masalah penelitian umumnya muncul dari adanya kesenjangan (*research gap*) antara kondisi ideal yang dirumuskan dalam teori atau kebijakan dengan realitas empiris di lapangan, antara temuan penelitian sebelumnya dengan fakta terbaru, atau antara tujuan kebijakan publik dengan hasil implementasinya. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa masalah penelitian juga dapat bersumber dari kontroversi teoretis,

inkonsistensi hasil studi terdahulu, atau fenomena sosial baru yang belum banyak dikaji secara sistematis.

Dalam bidang administrasi publik, sumber masalah penelitian sangat beragam karena objek kajiannya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta hubungan antara negara dan warga. Frederickson, Smith, Larimer, dan Licari (2018) menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik yang tidak merata, lemahnya akuntabilitas birokrasi, kegagalan implementasi kebijakan, serta konflik kepentingan dalam tata kelola merupakan isu klasik yang terus memunculkan agenda penelitian baru. Sementara itu, Pollitt dan Bouckaert (2017) menambahkan bahwa reformasi sektor publik sering menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, sehingga memerlukan kajian empiris berkelanjutan untuk menilai efektivitas dan dampaknya.

Masalah penelitian yang dirumuskan dengan baik harus memenuhi sejumlah kriteria ilmiah agar layak untuk diteliti. Pertama, masalah harus bersifat spesifik dan terfokus, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam dan terkontrol. Neuman (2014) menekankan bahwa perumusan masalah yang terlalu luas akan menyulitkan peneliti dalam menentukan variabel, unit analisis, serta teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam administrasi publik, fokus dapat diarahkan pada jenis layanan tertentu, kelompok sasaran kebijakan, wilayah administratif tertentu, atau periode waktu yang jelas.

Kedua, masalah penelitian harus dapat diteliti secara empiris, artinya fenomena yang dikaji dapat diamati, diukur, atau ditelusuri melalui data lapangan maupun dokumen kebijakan. King, Keohane, dan Verba (1994) menegaskan bahwa penelitian ilmiah menuntut keterkaitan antara klaim teoretis dan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Dalam konteks administrasi publik, hal ini berarti bahwa konsep-konsep seperti akuntabilitas, partisipasi publik, atau kinerja birokrasi perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau data administratif.

Ketiga, masalah penelitian harus relevan baik secara akademik maupun praktis. Relevansi akademik tercermin dari kontribusinya terhadap pengembangan teori atau pengayaan literatur ilmiah, sedangkan relevansi praktis terlihat dari potensi temuan penelitian untuk memperbaiki kebijakan atau praktik pemerintahan. Dunn (2018) menekankan bahwa penelitian kebijakan publik idealnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*).

Keempat, masalah penelitian perlu memiliki potensi kontribusi ilmiah yang jelas, baik dalam bentuk pengujian teori yang sudah ada, pengembangan konsep baru, maupun penjelasan empiris dalam konteks yang belum banyak dikaji. Raadschelders (2011) menyoroti bahwa administrasi publik sebagai disiplin interdisipliner membutuhkan penelitian yang mampu menjembatani

teori dan praktik serta memperkaya pemahaman tentang dinamika tata kelola kontemporer.

Kelima, masalah penelitian harus layak secara metodologis, yakni dapat diteliti dengan sumber daya, waktu, dan akses data yang tersedia. Maxwell (2012) mengingatkan bahwa keterbatasan praktis seperti akses ke lembaga pemerintah, ketersediaan responden, dan sensitivitas politik harus dipertimbangkan sejak tahap perumusan masalah agar penelitian tidak berhenti di tengah jalan.

Rumusan masalah dalam administrasi publik umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research questions*) atau pernyataan masalah yang eksplisit dan operasional. Creswell (2014) menjelaskan bahwa pertanyaan penelitian berfungsi sebagai jembatan antara masalah umum dengan strategi metodologis yang akan digunakan, sekaligus memandu peneliti dalam menentukan jenis data yang diperlukan. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah sering diterjemahkan menjadi hipotesis yang dapat diuji secara statistik, sedangkan dalam penelitian kualitatif dirumuskan sebagai pertanyaan terbuka yang mengeksplorasi proses, makna, dan dinamika sosial.

Dengan demikian, perumusan masalah penelitian dalam administrasi publik tidak hanya merupakan langkah awal yang bersifat teknis, tetapi juga proses intelektual yang menuntut kepekaan terhadap teori, konteks kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan masalah menjadi fondasi utama bagi

lahirnya penelitian yang valid secara ilmiah sekaligus relevan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian dalam Administrasi Publik

Tujuan penelitian merupakan pernyataan eksplisit mengenai capaian yang hendak diwujudkan melalui proses penelitian ilmiah. Dalam metodologi penelitian sosial, tujuan berfungsi sebagai jembatan antara rumusan masalah dengan strategi metodologis yang digunakan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan jenis data yang dikumpulkan, teknik analisis yang diterapkan, serta bentuk kesimpulan yang dihasilkan. Creswell (2014) menegaskan bahwa tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional agar dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah penelitian yang sistematis.

Dalam administrasi publik, tujuan penelitian memiliki signifikansi khusus karena hasil studi sering digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, evaluasi program pemerintah, serta reformasi tata kelola. Pollitt dan Bouckaert (2017) menyatakan bahwa penelitian sektor publik idealnya tidak hanya berorientasi pada pemahaman akademik, tetapi juga menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi praktik pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.

Secara substantif, tujuan penelitian dalam administrasi publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa orientasi utama. Tujuan deskriptif diarahkan untuk

menggambarkan secara sistematis kondisi empiris tertentu, seperti pola pelayanan publik di suatu daerah, struktur organisasi birokrasi, atau tingkat partisipasi warga dalam proses kebijakan. Menurut Neuman (2014), penelitian deskriptif berfungsi menyediakan potret faktual yang dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang lebih analitis atau evaluatif.

Tujuan eksplanatif berfokus pada upaya menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel dan menguji proposisi teoretis yang telah dirumuskan sebelumnya. King, Keohane, dan Verba (1994) menekankan bahwa penelitian eksplanatif bertujuan menghasilkan inferensi kausal yang sah melalui desain penelitian yang ketat dan penggunaan teknik analisis yang sesuai. Dalam administrasi publik, tujuan ini sering diwujudkan dalam studi tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, hubungan antara kepemimpinan publik dan kinerja organisasi, atau dampak desentralisasi terhadap kualitas pelayanan.

Tujuan evaluatif diarahkan untuk menilai nilai, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan atau program pemerintah. Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004) mendefinisikan evaluasi program sebagai penerapan metode ilmiah untuk menilai apakah suatu intervensi publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Dalam konteks administrasi publik, tujuan evaluatif menjadi sangat penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik dan penggunaan anggaran negara yang berbasis kinerja.

Tujuan rekomendatif atau preskriptif berkaitan dengan penyusunan saran kebijakan yang berbasis bukti empiris dan analisis ilmiah. Dunn (2018) menekankan bahwa analisis kebijakan publik tidak berhenti pada diagnosis masalah, tetapi harus dilanjutkan dengan perumusan alternatif kebijakan dan penilaian konsekuensinya. Dalam penelitian administrasi publik, tujuan ini diwujudkan melalui rekomendasi reformasi birokrasi, perbaikan mekanisme pelayanan publik, atau desain ulang program sosial.

Selain tujuan, penelitian juga diharapkan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Manfaat teoretis merujuk pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, baik melalui pengujian teori yang telah ada, pengayaan konsep, maupun pengembangan kerangka analitis baru. Raadschelders (2011) menekankan bahwa kemajuan disiplin administrasi publik sangat bergantung pada penelitian yang mampu mengintegrasikan refleksi teoretis dengan temuan empiris dalam berbagai konteks kelembagaan.

Manfaat praktis mencakup kegunaan hasil penelitian bagi pemerintah, organisasi publik, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas. Temuan empiris dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat mekanisme akuntabilitas, memperbaiki desain program pemerintah, atau mendorong partisipasi warga dalam proses kebijakan. Frederickson et al. (2018) menegaskan bahwa administrasi publik sebagai disiplin terapan memiliki tanggung jawab normatif untuk berkontribusi

pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat penelitian dalam administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari misi ganda disiplin ini sebagai bidang akademik dan praktik pemerintahan. Perumusan tujuan yang jelas dan manfaat yang terartikulasikan dengan baik menjadi fondasi bagi penelitian yang tidak hanya kuat secara metodologis, tetapi juga relevan secara sosial dan institusional.

3.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature review*) merupakan komponen fundamental dalam penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan konseptual dan empiris bagi perumusan masalah serta desain metodologis penelitian. Secara klasik, tinjauan pustaka dipahami sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah diproduksi sebelumnya terkait suatu fenomena tertentu (Cooper, 1988). Dalam tradisi metodologi modern, Creswell (2018) menegaskan bahwa tinjauan pustaka tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan harus bersifat kritis, analitis, dan argumentatif, sehingga mampu menunjukkan posisi riset baru dalam peta keilmuan yang lebih luas.

Dalam ilmu sosial dan administrasi publik, tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik kebijakan, karena memperlihatkan bagaimana konsep-konsep abstrak telah diuji secara empiris dalam berbagai konteks pemerintahan dan masyarakat.

3.3.1 Fungsi Akademik Tinjauan Pustaka

Secara akademis, tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi utama.

Pertama, memetakan posisi penelitian dalam literatur yang ada. Menurut Ridley (2012), peneliti harus mampu menunjukkan bagaimana penelitiannya berelasi dengan studi-studi sebelumnya apakah memperluas, menguji ulang, mengkritik, atau mengembangkan teori tertentu. Pemetaan ini dilakukan melalui klasifikasi pendekatan, konteks, variabel, dan temuan utama penelitian terdahulu.

Kedua, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*). Boote dan Beile (2005) menyatakan bahwa kualitas disertasi atau tesis sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menemukan ruang kosong dalam literatur, baik berupa:

1. keterbatasan metodologis,
2. konteks geografis yang belum dikaji,
3. variabel yang diabaikan,
4. inkonsistensi temuan empiris,
5. atau perubahan kondisi sosial yang belum tercermin dalam riset sebelumnya.

Ketiga, memperkuat argumentasi teoritis. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memilih dan mengelaborasi teori yang paling relevan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka konseptual yang kuat dibangun dari dialog antara teori klasik dan

kontemporer, misalnya teori implementasi kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1973), street-level bureaucracy (Lipsky, 1980), atau governance jaringan (Rhodes, 1997).

Keempat, menghindari duplikasi penelitian. Melalui telaah komprehensif terhadap publikasi terdahulu, peneliti dapat memastikan bahwa topik yang dipilih tidak sekadar mengulang penelitian lama, melainkan menawarkan kontribusi orisinal, baik secara empiris maupun konseptual (Hart, 1998).

3.3.2 Landasan Teoretis Tinjauan Pustaka

Konsep tinjauan pustaka berakar pada tradisi kumulatif ilmu pengetahuan, sebagaimana dikemukakan oleh Merton (1973), bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui akumulasi temuan yang saling merujuk dan diuji ulang. Dalam kerangka ini, penelitian baru dipandang sebagai bagian dari dialog akademik yang berkelanjutan.

Dari perspektif filsafat ilmu, Kuhn (1962) dalam *The Structure of Scientific Revolutions* menyoroti bahwa perkembangan ilmu tidak hanya bersifat kumulatif, tetapi juga mengalami pergeseran paradigma. Oleh karena itu, tinjauan pustaka juga harus sensitif terhadap perubahan paradigma dan debat teoretis yang terjadi dalam suatu disiplin.

Pendekatan kontemporer terhadap literature review semakin diperkaya dengan metode systematic review dan meta-analisis, sebagaimana dikembangkan dalam ilmu kesehatan dan kemudian diadopsi dalam ilmu

sosial (Tranfield, Denyer & Smart, 2003; Petticrew & Roberts, 2006). Pendekatan ini menekankan transparansi prosedur pencarian literatur, kriteria inklusi–eksklusi, serta teknik sintesis temuan.

3.3.3 Jenis-Jenis Tinjauan Pustaka

Dalam metodologi modern, tinjauan pustaka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk:

1. Narrative Review
Bersifat deskriptif-analitis, umum digunakan dalam penelitian eksploratif.
2. Systematic Literature Review (SLR)
Menggunakan protokol pencarian yang eksplisit dan replikabel (Tranfield et al., 2003).
3. Meta-Analysis
Menggabungkan hasil kuantitatif dari berbagai studi untuk memperoleh estimasi efek yang lebih kuat (Glass, 1976).
4. Scoping Review
Bertujuan memetakan keluasan literatur dalam bidang yang relatif baru (Arksey & O'Malley, 2005).
5. Integrative Review
Menggabungkan temuan teoretis dan empiris lintas metode (Whittemore & Knafl, 2005).

Dalam penelitian administrasi publik, systematic review semakin digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan, inovasi pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.

3.3.4 Sumber-Sumber Ilmiah dan Kredibilitas Literatur

Tinjauan pustaka harus dibangun dari sumber yang memiliki legitimasi akademik tinggi, antara lain:

1. jurnal bereputasi internasional (misalnya *Public Administration Review*, *Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*),
2. buku akademik dari penerbit universitas,
3. laporan organisasi internasional (OECD, World Bank),
4. disertasi dari perguruan tinggi terkemuka.

Menurut Kitchenham dan Charters (2007), kualitas tinjauan pustaka sangat dipengaruhi oleh ketepatan strategi pencarian basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, serta evaluasi kritis terhadap metodologi studi yang direview.

3.3.5 Sintesis dan Pengembangan Kerangka Konseptual

Tahap akhir tinjauan pustaka bukan sekadar ringkasan penelitian terdahulu, melainkan sintesis teoretis yang menghasilkan:

1. proposisi penelitian,
2. hipotesis,
3. pertanyaan riset,
4. dan model konseptual.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), sintesis ini dilakukan melalui pengelompokan tema, perbandingan temuan, serta penarikan pola hubungan antarvariabel.

Dengan demikian, tinjauan pustaka menjadi fondasi utama dalam membangun desain penelitian yang koheren, valid secara teoretis, dan relevan secara empiris.

3.4 Kerangka Teoretik dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoretik (*theoretical framework*) dan kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan komponen sentral dalam rancangan penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai fondasi intelektual dalam menjelaskan fenomena yang dikaji, mengarahkan perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta menentukan strategi pengumpulan dan analisis data. Keduanya tidak bersifat identik, meskipun saling berkaitan erat.

Creswell (2018) menegaskan bahwa kerangka teoretik menyediakan basis epistemologis dan konseptual penelitian, sedangkan kerangka konseptual merupakan representasi analitis yang lebih spesifik terhadap hubungan antarvariabel atau konsep dalam konteks studi tertentu. Dengan demikian, kerangka teoretik berangkat dari teori umum, sementara kerangka konseptual berfungsi sebagai adaptasi teoritis terhadap masalah empiris yang diteliti.

3.4.1 Kerangka Teoretik: Landasan Konseptual Berbasis Teori

Kerangka teoretik merujuk pada seperangkat teori, model, dan proposisi ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial atau kebijakan publik. Dalam tradisi metodologi ilmu sosial, konsep ini berakar pada gagasan teori sebagai sistem proposisi yang saling berhubungan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena (Kerlinger, 1973).

Dalam filsafat ilmu, Popper (1959) memandang teori sebagai konstruksi hipotetis yang harus dapat diuji dan dipatahkan (*falsifiable*), sementara Merton (1968) memperkenalkan konsep teori tingkat menengah (*middle-range theories*)—yakni teori yang cukup abstrak untuk bersifat general, namun cukup dekat dengan realitas empiris untuk diuji melalui penelitian lapangan. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam riset administrasi publik dan kebijakan.

Kerangka teoretik biasanya dibangun dari:

1. teori besar (*grand theories*),
2. teori tingkat menengah,
3. model konseptual dalam literatur,
4. temuan empiris yang telah direplikasi.

Sebagai contoh, dalam penelitian implementasi kebijakan, kerangka teoretik dapat merujuk pada:

1. model top-down Pressman & Wildavsky (1973),
2. model bottom-up Lipsky (1980),
3. model integratif Sabatier & Mazmanian (1980).

Teori-teori tersebut menyediakan lensa analitis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik.

3.4.2 Fungsi Kerangka Teoretik dalam Penelitian

Secara metodologis, kerangka teoretik memiliki beberapa fungsi utama:

1. Menjelaskan fenomena yang diteliti melalui konsep-konsep abstrak yang telah diuji secara ilmiah.
2. Mengarahkan perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian (Babbie, 2016).
3. Menentukan variabel atau kategori analisis yang relevan.
4. Menjadi dasar interpretasi temuan empiris.
5. Menjaga koherensi logis antara teori, metode, dan analisis.

Dalam penelitian kuantitatif, kerangka teoretik biasanya dinyatakan secara eksplisit sejak awal. Dalam penelitian kualitatif, kerangka ini dapat bersifat awal (*sensitizing concepts* menurut Blumer, 1954) dan berkembang selama proses pengumpulan data.

3.4.3 Kerangka Konseptual: Operasionalisasi dalam Konteks Empiris

Berbeda dari kerangka teoretik yang bersifat abstrak, kerangka konseptual merupakan adaptasi operasional teori ke dalam desain penelitian tertentu. Maxwell (2012)

menyebut kerangka konseptual sebagai sistem ide, asumsi, dan hubungan yang membentuk fokus studi dan menghubungkan teori dengan data empiris.

Kerangka konseptual biasanya diwujudkan dalam:

- diagram hubungan variabel,
- model proses,
- peta konseptual,
- atau bagan kausal.

Dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual menampilkan hubungan antara:

- variabel independen,
- variabel dependen,
- variabel mediator/intervening,
- variabel moderator/kontrol.

Misalnya, penelitian tentang kinerja pelayanan publik dapat memodelkan hubungan antara kapasitas organisasi (independen), kualitas layanan (dependen), dengan kepemimpinan sebagai variabel mediator.

Dalam penelitian kualitatif, kerangka konseptual bersifat lebih fleksibel dan heuristik. Ia berfungsi sebagai panduan awal yang dapat direvisi seiring berkembangnya temuan lapangan, sejalan dengan prinsip theoretical sampling dalam grounded theory (Glaser & Strauss, 1967).

3.4.4 Hubungan antara Kerangka Teoretik dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoretik dan kerangka konseptual berhubungan secara hierarkis dan fungsional. Kerangka teoretik menyediakan arsitektur konseptual umum, sedangkan kerangka konseptual menyusun penerjemahan spesifik teori tersebut ke dalam fokus penelitian.

Miles dan Huberman (1994) menyebut kerangka konseptual sebagai “*explanatory model*” yang membantu peneliti memvisualisasikan alur sebab-akibat dan proses sosial yang dikaji. Dalam hal ini, kerangka konseptual menjadi jembatan antara abstraksi teoretis dan operasionalisasi metodologis.

3.4.5 Pengembangan Kerangka dalam Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual bersifat deduktif: teori → hipotesis → variabel → pengukuran → analisis statistik (Neuman, 2014). Hubungan antarvariabel dirumuskan secara eksplisit dan diuji secara empiris.

Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, kerangka sering berkembang secara induktif: data → kategori → konsep → proposisi teoritis (Charmaz, 2014). Kerangka awal dapat direvisi untuk mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena.

Dalam pendekatan mixed methods, Creswell dan Plano Clark (2018) menunjukkan bahwa kerangka konseptual dapat mengintegrasikan jalur deduktif dan induktif sekaligus, sehingga teori dan data saling memperkaya.

3.4.6 Sintesis Akademik

Secara keseluruhan, kerangka teoretik dan kerangka konseptual merupakan perangkat epistemologis dan metodologis yang memastikan bahwa penelitian tidak bersifat spekulatif, melainkan terikat pada tradisi keilmuan yang mapan serta relevan dengan realitas empiris.

Kerangka teoretik menyediakan landasan penjelasan ilmiah, sementara kerangka konseptual menerjemahkan teori tersebut ke dalam model analitis yang dapat diuji atau dieksplorasi secara sistematis. Keduanya menjadi syarat utama bagi penelitian S1 dan S2 agar memiliki kontribusi akademik yang jelas, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada jenjang S3, kerangka teoretik dan konseptual tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai ruang untuk menunjukkan kebaruan ilmiah melalui pengembangan, sintesis, atau rekonstruksi teori yang relevan dengan konteks penelitian. Oleh karena itu, penelitian doctoral dituntut mampu melampaui penerapan teori yang ada dan menghasilkan kontribusi teoretis yang orisinal serta bermakna bagi pengembangan ilmu.

3.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang dirumuskan untuk diuji secara empiris melalui prosedur ilmiah. Dalam metodologi klasik, Kerlinger (1973) mendefinisikan hipotesis sebagai proposisi yang menyatakan hubungan antarvariabel dan dapat diuji secara objektif. Definisi ini kemudian diperkuat oleh Creswell (2018), yang menempatkan hipotesis sebagai turunan langsung dari teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka.

Secara epistemologis, penggunaan hipotesis berkaitan erat dengan tradisi deduktif dalam ilmu sosial, yaitu proses penalaran yang bergerak dari teori umum menuju pengujian empiris pada konteks spesifik (Popper, 1959; Neuman, 2014). Dalam kerangka ini, teori tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai sumber utama dalam merumuskan dugaan yang dapat diuji dan berpotensi dipatahkan (*falsifiable*).

Dalam penelitian administrasi publik, hipotesis sering disusun berdasarkan teori organisasi, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Misalnya, hubungan antara kepemimpinan dan kinerja pelayanan publik dapat diturunkan dari teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Burns (1978) dan Bass (1985), serta dari model kinerja organisasi sektor publik yang menekankan peran kapasitas manajerial terhadap efektivitas layanan (Boyne, 2002). Dari sintesis teori-teori tersebut, hipotesis seperti "*kualitas kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik*" memperoleh dasar konseptual yang kuat dan

dapat diuji melalui survei, indikator kinerja, serta analisis statistik.

Hipotesis yang baik tidak sekadar berupa dugaan intuitif, melainkan harus dirumuskan secara eksplisit, tidak ambigu, dan mengandung arah hubungan yang jelas. Menurut Babbie (2016), hipotesis ideal menunjukkan hubungan kausal atau asosiatif antarvariabel yang dapat dioperasionalkan ke dalam indikator terukur. Dengan kata lain, konsep abstrak seperti “kepemimpinan” atau “kinerja pelayanan” perlu diterjemahkan ke dalam dimensi empiris—misalnya gaya kepemimpinan, komunikasi internal, waktu layanan, atau kepuasan pengguna—sebelum diuji secara statistik.

Dalam praktik penelitian kuantitatif, hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), yang kemudian diuji menggunakan teknik inferensial seperti regresi, ANOVA, atau pemodelan struktural. Formulasi ini sejalan dengan pendekatan statistik modern yang berkembang sejak Fisher (1935) dan kemudian dikodifikasi dalam tradisi pengujian signifikansi (*null hypothesis significance testing*).

Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, hipotesis formal jarang digunakan pada tahap awal karena tujuan utama penelitian adalah mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika sosial secara mendalam. Glaser dan Strauss (1967), melalui pendekatan *grounded theory*, menekankan bahwa proposisi teoretis justru muncul dari proses analisis data secara induktif, bukan ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih

sering menggunakan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka sebagai panduan eksplorasi lapangan, meskipun konsep awal dari teori tetap dapat berfungsi sebagai *sensitizing concepts* (Blumer, 1954).

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian administrasi publik memainkan peran strategis sebagai jembatan antara teori dan data empiris, khususnya dalam studi kuantitatif dan mixed methods. Perumusannya menuntut pemahaman mendalam terhadap literatur, ketepatan operasionalisasi konsep, serta kesadaran terhadap paradigma metodologis yang digunakan, sehingga hasil penelitian tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga bermakna secara substantif bagi pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan.

3.6 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian (*research questions*) merupakan rumusan sentral yang berfungsi mengarahkan seluruh proses penelitian, mulai dari pemilihan desain metodologis, strategi pengumpulan data, hingga teknik analisis dan interpretasi temuan. Dalam metodologi kualitatif dan eksploratif, pertanyaan penelitian menggantikan peran hipotesis formal karena fokus utamanya bukan menguji hubungan kausal yang telah dirumuskan sebelumnya, melainkan memahami makna, proses, dan dinamika sosial dalam konteks tertentu (Creswell, 2018; Maxwell, 2012).

Secara epistemologis, penggunaan pertanyaan penelitian berkaitan dengan pendekatan induktif dalam ilmu sosial,

yakni penalaran yang bergerak dari pengamatan empiris menuju pengembangan konsep atau proposisi teoretis (Charmaz, 2014). Dalam tradisi interpretatif, peneliti berupaya menangkap perspektif aktor, praktik keseharian, serta struktur makna yang membentuk tindakan administratif, sebagaimana ditekankan oleh Geertz (1973) melalui konsep *thick description* dan oleh Schutz (1967) dalam fenomenologi sosial.

Pertanyaan penelitian yang baik tidak dirumuskan secara sempit atau tertutup, tetapi bersifat terbuka dan fleksibel agar memungkinkan peneliti menelusuri kompleksitas fenomena lapangan. Yin (2018) menegaskan bahwa dalam studi kasus kebijakan publik, pertanyaan penelitian umumnya diawali dengan kata “*bagaimana*” atau “*mengapa*”, karena bentuk ini mendorong eksplorasi mendalam terhadap mekanisme, strategi, dan konteks kelembagaan. Dalam administrasi publik, pendekatan ini sangat relevan untuk menelaah implementasi kebijakan, inovasi pelayanan, atau dinamika relasi antaraktor dalam tata kelola pemerintahan.

Selain bersifat eksploratif, pertanyaan penelitian harus tetap terfokus dan kontekstual, yakni selaras dengan tujuan penelitian serta ruang lingkup empiris yang ditetapkan. Menurut Maxwell (2012), pertanyaan yang terlalu luas akan menyulitkan pengumpulan data, sementara pertanyaan yang terlalu sempit berpotensi mengabaikan proses penting yang justru menjadi inti fenomena. Oleh karena itu, perumusan pertanyaan

penelitian menuntut keseimbangan antara keterbukaan analitis dan ketepatan fokus.

Dalam konteks administrasi publik, pertanyaan seperti “*Bagaimana strategi birokrasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan?*” dapat diturunkan dari teori implementasi kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1973), street-level bureaucracy (Lipsky, 1980), serta literatur tentang reformasi pelayanan publik dan governance lokal (Rhodes, 1997). Teori-teori tersebut tidak langsung menghasilkan hipotesis yang diuji secara statistik, tetapi menyediakan kerangka konseptual awal yang membantu peneliti mengidentifikasi aktor kunci, mekanisme koordinasi, serta faktor institusional yang relevan untuk dieksplorasi di lapangan.

Dalam pendekatan kualitatif kontemporer, pertanyaan penelitian juga dipahami sebagai konstruksi yang bersifat dinamis. Seiring dengan berkembangnya pengumpulan dan analisis data, pertanyaan awal dapat disempurnakan atau dipertajam agar lebih mencerminkan realitas empiris yang ditemukan, sebagaimana dianjurkan dalam tradisi *grounded theory* oleh Glaser dan Strauss (1967) serta pengembangannya oleh Charmaz (2014). Fleksibilitas ini tidak berarti kehilangan arah ilmiah, melainkan menunjukkan keterbukaan metodologis terhadap temuan baru yang relevan secara teoretis.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam studi administrasi publik berfungsi sebagai kompas analitis yang mengarahkan eksplorasi ilmiah terhadap praktik pemerintahan dan kebijakan. Perumusannya menuntut

dialog yang cermat antara teori, tujuan penelitian, dan konteks empiris, sehingga hasil penelitian tidak hanya memberikan deskripsi yang kaya, tetapi juga kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

3.7 Model Penelitian

Model penelitian merupakan representasi konseptual seringkali divisualisasikan dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan logis antara variabel, aktor, proses, dan konteks yang menjadi fokus studi. Dalam metodologi ilmu sosial, model dipahami sebagai penyederhanaan realitas yang bersifat analitis, yang bertujuan mengekspresikan asumsi teoretis penelitian secara eksplisit dan memudahkan pembaca memahami alur penalaran yang mendasari desain penelitian (Babbie, 2016; Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

Secara konseptual, model penelitian berakar pada gagasan bahwa teori ilmiah tidak hanya dinyatakan dalam bentuk proposisi verbal, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam struktur hubungan yang sistematis antarunsur analisis. Kerlinger (1973) menyatakan bahwa model berfungsi sebagai jembatan antara teori dan pengujian empiris, karena membantu peneliti mengklarifikasi variabel yang relevan, arah hubungan yang diasumsikan, serta mekanisme kausal yang hendak diuji atau dieksplorasi.

Dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, model penelitian sering dibangun berdasarkan teori implementasi kebijakan dan

governance. Model klasik Pressman dan Wildavsky (1973) menekankan pentingnya rantai keputusan dan koordinasi antaraktor dalam menentukan keberhasilan implementasi. Sabatier dan Mazmanian (1980) kemudian mengembangkan kerangka yang memasukkan karakteristik kebijakan, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial-ekonomi sebagai determinan hasil kebijakan. Pada tahap berikutnya, Lipsky (1980) memperluas analisis dengan menyoroti peran aktor lapangan (*street-level bureaucrats*) dan diskresi administratif dalam membentuk keluaran kebijakan.

Model-model tersebut menunjukkan bahwa hasil kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh desain formal, melainkan oleh interaksi kompleks antara aktor, proses implementasi, serta lingkungan institusional dan politik. Perspektif governance yang berkembang sejak 1990-an, misalnya melalui Rhodes (1997), semakin memperkaya model penelitian dengan memasukkan jaringan antarorganisasi, kolaborasi sektor publik–swasta, serta dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktik metodologis, model penelitian diturunkan dari kerangka teoretik dan kemudian disesuaikan dalam kerangka konseptual penelitian tertentu. Creswell (2018) menekankan bahwa model yang baik harus mencerminkan pertanyaan penelitian atau hipotesis secara koheren, sekaligus mengindikasikan bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian kuantitatif, model biasanya menampilkan variabel independen, dependen, mediator, dan moderator beserta arah hubungan yang akan diuji secara statistik. Dalam

penelitian kualitatif, model cenderung bersifat lebih terbuka dan heuristik, menggambarkan alur proses, interaksi aktor, atau tahapan implementasi yang akan dieksplorasi secara mendalam, dan dapat direvisi seiring berkembangnya temuan lapangan sebagaimana dianjurkan dalam tradisi *grounded theory* (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2014).

Dengan demikian, model penelitian berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen refleksif bagi peneliti untuk menilai konsistensi antara teori, tujuan penelitian, dan strategi metodologis. Dalam studi kebijakan publik, model yang dirumuskan secara matang memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan menghasilkan dampak, sekaligus membuka ruang untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan intervensi pemerintah dalam konteks pemerintahan modern.

BAB IV

DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Dalam desain operasional penelitian, penentuan populasi dan sampel merupakan tahap krusial karena berkaitan langsung dengan ruang lingkup generalisasi temuan serta validitas inferensi ilmiah yang dihasilkan. Populasi merujuk pada keseluruhan unit analisis yang relevan dengan tujuan penelitian, baik berupa individu, organisasi, dokumen, peristiwa, maupun wilayah administratif tertentu (Neuman, 2014). Dalam studi administrasi publik, populasi dapat mencakup aparatur sipil negara, pengguna layanan publik, unit kerja birokrasi, pemerintah daerah, atau komunitas kebijakan yang terlibat dalam suatu program publik.

Secara metodologis, konsep populasi berkaitan dengan prinsip inferensi statistik, yakni upaya menarik kesimpulan mengenai karakteristik keseluruhan kelompok berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebagian anggotanya (Cochran, 1977). Oleh karena itu, populasi harus didefinisikan secara jelas dalam batasan waktu, wilayah, serta karakteristik substantif agar penelitian memiliki fokus empiris yang terukur dan dapat direplikasi.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu untuk mewakili karakteristik populasi secara memadai. Menurut Kish (1965), kualitas suatu sampel tidak hanya ditentukan oleh ukurannya, tetapi juga oleh cara pemilihannya. Dalam penelitian kuantitatif, tujuan utama pengambilan sampel adalah memperoleh estimasi parameter populasi yang akurat dengan tingkat kesalahan yang dapat dikendalikan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara ilmiah.

Teknik sampling dalam penelitian kuantitatif secara klasik dibedakan ke dalam pendekatan probabilistik dan non-probabilistik. Probability sampling, yang berkembang seiring kemajuan statistik survei pada pertengahan abad ke-20 (Cochran, 1977), menempatkan setiap elemen populasi pada peluang terukur untuk terpilih, sehingga memungkinkan perhitungan galat sampling dan pengujian hipotesis secara inferensial. Variasi teknik ini—seperti pengambilan acak sederhana, stratifikasi berdasarkan karakteristik tertentu, atau pengelompokan wilayah—sering digunakan dalam survei pelayanan publik dan evaluasi program pemerintah.

Sebaliknya, non-probability sampling lebih menekankan pada pertimbangan substantif peneliti dalam memilih responden yang dianggap relevan atau mudah dijangkau, sebagaimana dijelaskan oleh Babbie (2016). Pendekatan ini lazim digunakan ketika kerangka sampel tidak tersedia atau ketika penelitian bersifat eksploratif, meskipun konsekuensinya adalah keterbatasan dalam melakukan generalisasi statistik.

Dalam penelitian kualitatif, istilah “sampel” sering digantikan dengan informan atau partisipan, karena tujuan utama penelitian bukan melakukan generalisasi numerik, melainkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses sosial dan makna yang dilekatkan oleh aktor terhadap praktik administratif. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria teoretis dan relevansi empiris, sejalan dengan konsep *theoretical sampling* yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss (1967) dalam pendekatan *grounded theory*. Proses ini memungkinkan peneliti menambah atau mengubah komposisi informan selama penelitian berlangsung untuk memperkaya kategori analitis yang sedang berkembang.

Dalam tradisi kualitatif kontemporer, Patton (2015) menekankan bahwa kualitas pemilihan informan terletak pada kedalaman informasi yang dapat diberikan, bukan pada jumlahnya semata. Prinsip ini sering dikaitkan dengan konsep saturasi data, yakni kondisi ketika wawancara atau observasi tambahan tidak lagi menghasilkan tema baru yang signifikan (Guest, Bunce & Johnson, 2006).

Dengan demikian, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian administrasi publik harus disesuaikan dengan paradigma metodologis yang digunakan. Pendekatan kuantitatif menekankan representativitas dan inferensi statistik, sedangkan pendekatan kualitatif menekankan relevansi teoretis, kedalaman pemahaman, dan dinamika proses. Keduanya merupakan strategi yang sah secara ilmiah sepanjang dirancang secara eksplisit, konsisten

dengan tujuan penelitian, dan dijustifikasi secara metodologis dalam laporan akademik.

4.2 Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep atau karakteristik yang dapat berubah dan dapat diukur atau diamati dalam suatu penelitian. Dalam metodologi klasik, Kerlinger (1973) mendefinisikan variabel sebagai sifat atau atribut dari individu, objek, atau peristiwa yang memiliki lebih dari satu nilai. Definisi ini kemudian dipertegas oleh Creswell (2018), yang menyatakan bahwa variabel adalah konstruk yang dioperasionalkan ke dalam indikator empiris agar dapat dianalisis secara sistematis.

Dalam penelitian administrasi publik, variabel sering kali merepresentasikan dimensi kebijakan dan organisasi pemerintahan, seperti kualitas implementasi kebijakan, kapasitas birokrasi, kepemimpinan publik, tingkat transparansi, akuntabilitas, atau kepuasan masyarakat terhadap layanan. Pemilihan variabel tidak bersifat arbitrer, melainkan harus diturunkan dari teori yang relevan serta temuan empiris sebelumnya, sebagaimana telah dibahas dalam kerangka teoretik dan konseptual penelitian.

Secara analitis, hubungan antarvariabel berakar pada tradisi penjelasan kausal dalam ilmu sosial yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20, terutama dalam riset-riset organisasi dan kebijakan publik (Blalock, 1964). Dalam pendekatan ini, variabel independen diposisikan sebagai faktor yang diasumsikan

memengaruhi perubahan pada variabel lain, sementara variabel dependen merupakan hasil atau keluaran yang ingin dijelaskan oleh penelitian. Sebagai contoh, dalam studi pelayanan publik, gaya kepemimpinan atau kapasitas organisasi dapat dirumuskan sebagai variabel independen, sedangkan kinerja layanan atau kepuasan pengguna sebagai variabel dependen.

Hubungan tersebut sering kali tidak bersifat langsung. Literatur metodologi modern mengakui keberadaan variabel intervening atau mediator, yakni mekanisme perantara yang menjelaskan bagaimana suatu pengaruh terjadi (Baron & Kenny, 1986). Dalam konteks administrasi publik, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan, misalnya, dapat dimediasi oleh motivasi pegawai, budaya organisasi, atau kualitas koordinasi antarunit. Selain itu, terdapat pula variabel moderator yang memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antarvariabel, seperti tingkat desentralisasi, kapasitas fiskal daerah, atau tekanan politik lokal, yang dapat memperkuat atau justru melemahkan efek suatu kebijakan terhadap hasil pelayanan.

Dalam pendekatan kuantitatif, variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara operasional melalui indikator yang terukur agar dapat dianalisis secara statistik. Konsep abstrak seperti “akuntabilitas” atau “transparansi”, misalnya, perlu diterjemahkan ke dalam ukuran empiris seperti ketersediaan laporan publik, mekanisme pengaduan, atau indeks persepsi, sejalan dengan prinsip operasionalisasi yang dikemukakan oleh Lazarsfeld (1955) dan Neuman (2014).

Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, istilah “variabel” sering digantikan dengan konsep, kategori, atau tema analitis yang bersifat lebih fleksibel dan berkembang selama proses penelitian. Tradisi ini dipengaruhi oleh pendekatan *grounded theory* yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss (1967), di mana konsep teoretis muncul secara induktif dari data lapangan melalui proses pengodean dan kategorisasi. Charmaz (2014) kemudian memperluas pendekatan ini dengan menekankan konstruksi makna antara peneliti dan partisipan, sehingga konsep-konsep utama tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, melainkan dimurnikan melalui analisis berulang.

Dengan demikian, variabel atau konsep penelitian berfungsi sebagai unit analisis utama yang menghubungkan teori dengan data empiris. Dalam penelitian administrasi publik, kejelasan dalam merumuskan dan mengoperasionalkan variabel sangat menentukan kekuatan analisis kausal dalam studi kuantitatif, sekaligus kedalaman pemahaman proses sosial dalam studi kualitatif, sehingga temuan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus relevansi praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

4.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan proses penerjemahan konsep abstrak ke dalam ukuran empiris yang dapat diamati dan dianalisis secara sistematis. Dalam tradisi metodologi klasik, Bridgman (1927) melalui pendekatan *operationalism* menegaskan bahwa makna suatu konsep ilmiah harus ditentukan oleh

prosedur operasional yang digunakan untuk mengukurnya. Gagasan ini kemudian diadaptasi dalam ilmu sosial oleh Lazarsfeld (1955), yang mengembangkan teknik pengukuran konsep-konsep laten seperti sikap, persepsi, dan nilai melalui seperangkat indikator terstruktur.

Dalam penelitian administrasi publik, definisi operasional menjadi sangat penting karena banyak variabel yang bersifat normatif dan abstrak—seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas kebijakan, atau kualitas pelayanan—yang tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, peneliti harus menguraikan dimensi konseptual variabel tersebut ke dalam indikator-indikator empiris yang dapat diobservasi, sejalan dengan prinsip konstruksi instrumen yang dikemukakan oleh DeVellis (2016) dalam pengembangan skala pengukuran.

Secara metodologis, definisi operasional biasanya mencakup penentuan indikator utama, skala pengukuran yang digunakan, serta alat ukur yang dipakai untuk mengumpulkan data. Indikator merujuk pada aspek-aspek spesifik dari suatu variabel yang mencerminkan konsep teoritisnya, sementara skala pengukuran—sebagaimana diklasifikasikan oleh Stevens (1946)—dapat berbentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio, tergantung pada sifat data dan teknik analisis yang akan digunakan. Alat ukur dapat berupa kuesioner terstruktur, pedoman wawancara, lembar observasi, atau dokumen administratif, yang semuanya harus dirancang sedemikian rupa agar konsisten dengan definisi konseptual variabel.

Sebagai ilustrasi, variabel kualitas pelayanan publik sering dirujuk pada model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), yang mengidentifikasi dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam penelitian administrasi publik, dimensi tersebut dapat diadaptasi ke dalam indikator yang lebih kontekstual, seperti kecepatan penyelesaian perizinan, keramahan petugas loket, kejelasan prosedur administratif, serta tingkat kepuasan pengguna layanan. Setiap indikator kemudian diukur melalui item pertanyaan berskala Likert atau melalui observasi terstruktur, sehingga memungkinkan analisis kuantitatif mengenai variasi kualitas layanan antarunit atau wilayah.

Dalam pendekatan kualitatif, definisi operasional tidak selalu dinyatakan dalam bentuk indikator kuantitatif sejak awal, tetapi diwujudkan dalam kategori analitis awal yang memandu proses pengumpulan data. Maxwell (2012) menyebut proses ini sebagai perumusan konsep kerja (*working concepts*), yang bersifat tentatif dan dapat disempurnakan seiring berkembangnya analisis lapangan. Prinsip ini sejalan dengan tradisi *grounded theory* (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2014), di mana kategori konseptual muncul melalui interaksi berulang antara data dan teori.

Dengan demikian, definisi operasional variabel berfungsi sebagai penghubung utama antara kerangka teoretik dan prosedur empiris penelitian. Kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan indikator, skala, serta alat ukur menentukan kualitas data yang diperoleh dan, pada

akhirnya, kekuatan inferensi ilmiah yang dapat ditarik dari penelitian administrasi publik.

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data empiris sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. Dalam metodologi ilmu sosial, instrumen dipahami sebagai sarana operasionalisasi konsep teoretis ke dalam bentuk pertanyaan, indikator, atau kategori observasi yang dapat menghasilkan informasi sistematis (Kerlinger, 1973; Neuman, 2014). Oleh karena itu, kualitas instrumen sangat menentukan mutu data yang diperoleh serta validitas kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian administrasi publik, instrumen dapat berbentuk kuesioner terstruktur untuk mengukur persepsi masyarakat atau aparatur, pedoman wawancara mendalam guna menggali proses implementasi kebijakan, lembar observasi untuk mencatat praktik pelayanan di lapangan, maupun format analisis dokumen untuk menelaah regulasi, laporan kinerja, atau arsip administratif. Pemilihan jenis instrumen harus konsisten dengan paradigma metodologis penelitian—apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods—serta dengan kerangka konseptual yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara teoretis, pengembangan instrumen kuantitatif berakar pada tradisi pengukuran psikometrik dan survei sosial yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Lazarsfeld (1955) menekankan pentingnya menurunkan

konsep abstrak ke dalam indikator yang dapat diobservasi, sementara DeVellis (2016) menguraikan prosedur sistematis dalam menyusun skala pengukuran, mulai dari penentuan dimensi konstruk, perumusan item, hingga pengujian empiris. Dalam konteks ini, instrumen tidak sekadar kumpulan pertanyaan, melainkan representasi formal dari teori yang diuji.

Instrumen yang baik harus disusun secara jelas, tidak ambigu, relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat dipahami oleh responden atau informan. Creswell (2018) menekankan bahwa bahasa yang digunakan dalam instrumen harus sesuai dengan konteks sosial dan administratif subjek penelitian, serta menghindari istilah teknis yang berpotensi menimbulkan bias pemahaman. Selain itu, struktur instrumen perlu dirancang logis—misalnya dari pertanyaan umum ke spesifik—agar memudahkan responden memberikan jawaban yang akurat.

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen wajib melalui proses pengujian validitas dan reliabilitas sebelum digunakan secara luas. Validitas berkaitan dengan sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, baik dalam bentuk validitas isi, konstruk, maupun kriteria (Cronbach & Meehl, 1955). Reliabilitas, di sisi lain, merujuk pada konsistensi hasil pengukuran apabila instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang relatif sama, sebagaimana dirumuskan oleh Cronbach (1951) melalui koefisien alpha yang hingga kini banyak digunakan dalam riset sosial. Uji coba lapangan (*pilot study*) sering dilakukan untuk menilai kualitas item,

mengidentifikasi pertanyaan yang bermasalah, serta memperbaiki redaksi sebelum pengumpulan data utama.

Dalam pendekatan kualitatif, instrumen seperti pedoman wawancara atau observasi tidak dirancang untuk menghasilkan ukuran numerik yang kaku, melainkan sebagai panduan fleksibel yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif aktor. Maxwell (2012) dan Charmaz (2014) menekankan bahwa instrumen kualitatif dapat berkembang selama penelitian berlangsung, seiring dengan munculnya tema-tema baru yang relevan secara teoretis. Meskipun demikian, konsistensi dalam penggunaan pedoman dan pencatatan sistematis tetap diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan transparansi analisis.

Dengan demikian, instrumen penelitian berfungsi sebagai penghubung utama antara kerangka konseptual dan data empiris. Dalam studi administrasi publik, ketepatan dalam merancang, menguji, dan menggunakan instrumen menjadi prasyarat penting agar temuan penelitian tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan bermanfaat bagi pengembangan praktik pemerintahan.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi empiris yang relevan dengan tujuan penelitian dan kerangka konseptual yang telah dirumuskan. Dalam metodologi ilmu sosial, teknik ini dipahami sebagai

jembatan antara desain penelitian dan analisis data, karena menentukan jenis bukti empiris yang dapat dikumpulkan serta kualitas inferensi yang dapat ditarik dari penelitian (Neuman, 2014; Creswell, 2018).

Pemilihan teknik pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh paradigma metodologis yang digunakan. Dalam pendekatan kuantitatif, teknik yang dominan adalah survei berbasis kuesioner terstruktur, yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20 seiring dengan kemajuan statistik sosial (Cochran, 1977). Survei memungkinkan pengumpulan data dari sampel besar secara efisien serta mendukung pengujian hipotesis melalui analisis inferensial. Kualitas survei sangat ditentukan oleh kejelasan item pertanyaan, skala pengukuran, dan prosedur administrasi kuesioner, sebagaimana ditekankan oleh Dillman, Smyth, dan Christian (2014) dalam teori desain survei modern.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi teknik utama untuk menggali pengalaman, persepsi, serta interpretasi aktor terhadap praktik administrasi dan kebijakan publik. Kvale dan Brinkmann (2009) memandang wawancara sebagai proses interaksi sosial yang menghasilkan pengetahuan melalui dialog terstruktur, semi-terstruktur, atau terbuka. Teknik ini sangat relevan dalam studi implementasi kebijakan, kepemimpinan birokrasi, dan tata kelola lokal, karena memungkinkan peneliti menelusuri logika tindakan serta dinamika institusional yang tidak selalu tampak dalam data kuantitatif.

Observasi, baik partisipatif maupun non-partisipatif, berakar pada tradisi antropologi dan sosiologi klasik, terutama dalam karya Malinowski pada awal abad ke-20 dan kemudian dikembangkan dalam studi organisasi (Spradley, 1980). Dalam administrasi publik, observasi digunakan untuk mencatat secara langsung praktik pelayanan di kantor pemerintah, interaksi antara petugas dan warga, atau proses rapat pengambilan keputusan. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap kesenjangan antara prosedur formal dan praktik aktual di lapangan, sehingga memperkaya pemahaman terhadap proses kebijakan.

Dokumentasi merupakan teknik yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis atau digital seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi, arsip anggaran, dan notulen rapat. Bowen (2009) menegaskan bahwa analisis dokumen merupakan bagian integral dari penelitian kualitatif dan kebijakan publik, karena dokumen tidak hanya menyajikan data faktual, tetapi juga mencerminkan nilai, prioritas, dan relasi kekuasaan dalam organisasi pemerintah.

Focus Group Discussion (FGD) berkembang dalam riset kebijakan dan komunikasi publik sejak 1980-an sebagai teknik untuk mengeksplorasi pandangan kolektif dan dinamika interaksi antarpartisipan (Morgan, 1997). Dalam administrasi publik, FGD sering digunakan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap layanan publik, menguji rancangan kebijakan baru, atau memetakan respons pemangku kepentingan terhadap reformasi birokrasi.

Secara metodologis, pemilihan teknik pengumpulan data harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, jenis pertanyaan riset atau hipotesis, karakteristik populasi atau informan, serta keterbatasan sumber daya penelitian. Dalam pendekatan mixed methods, Creswell dan Plano Clark (2018) menunjukkan bahwa berbagai teknik dapat dikombinasikan secara sekuensial atau konvergen untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, misalnya dengan mengawali survei kuantitatif dan kemudian memperdalam temuan melalui wawancara dan FGD.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian administrasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi merupakan pilihan metodologis strategis yang harus dijustifikasi secara teoretis dan praktis agar temuan penelitian memiliki validitas ilmiah serta relevansi kebijakan yang kuat.

4.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis yang menggambarkan proses pelaksanaan penelitian sejak perumusan masalah hingga pelaporan hasil. Kejelasan tahapan ini penting untuk menjaga konsistensi metodologis, transparansi proses, serta validitas ilmiah penelitian (Creswell, 2018; Neuman, 2014).

Tahapan umum dalam penelitian administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

4.6.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tahap ini mencakup pengamatan awal terhadap fenomena kebijakan atau praktik administrasi, penelaahan literatur ilmiah, serta pemetaan persoalan aktual di lapangan. King, Keohane, dan Verba (1994) menegaskan bahwa masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji secara empiris dan memiliki kontribusi teoretis. Dalam konteks administrasi publik, masalah sering muncul dari kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi, rendahnya kinerja pelayanan, atau dinamika tata kelola lokal.

4.6.2. Penyusunan Proposal Penelitian

Proposal berfungsi sebagai rancangan ilmiah penelitian yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka teoretik dan konseptual, hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta desain metodologis. Maxwell (2012) dan Creswell (2018) menekankan bahwa proposal juga harus menjelaskan alasan pemilihan pendekatan penelitian serta strategi pengumpulan dan analisis data. Pada tahap ini biasanya dilakukan pengurusan izin penelitian dan penilaian etik, terutama bila penelitian melibatkan responden manusia.

4.6.3. Pengumpulan Data

Pada fase ini peneliti melaksanakan survei, wawancara, observasi, FGD, atau studi dokumentasi sesuai desain penelitian. Yin (2018) menekankan pentingnya pencatatan sistematis selama kerja lapangan untuk

menjaga keandalan data dan memungkinkan proses audit metodologis. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan ini meliputi distribusi kuesioner dan pengendalian kualitas respon, sedangkan dalam penelitian kualitatif melibatkan interaksi intensif dengan informan kunci.

4.6.4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis kuantitatif mencakup statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis (Field, 2018), sementara analisis kualitatif dilakukan melalui proses pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema konseptual sebagaimana dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1998) serta Charmaz (2014). Dalam penelitian kebijakan publik, analisis diarahkan untuk mengaitkan temuan empiris dengan teori implementasi atau kinerja birokrasi.

4.6.5. Penarikan Kesimpulan dan Interpretasi Temuan

Tahap ini bertujuan menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian, pertanyaan riset, atau hipotesis, serta dengan kerangka teoretik yang digunakan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menekankan pentingnya proses verifikasi temuan melalui triangulasi sumber data atau metode agar kesimpulan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Peneliti juga perlu mengemukakan keterbatasan penelitian serta implikasi praktis bagi kebijakan publik.

4.6.6. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir adalah penulisan laporan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, atau laporan kebijakan. Laporan harus disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah, dengan penjelasan rinci mengenai metode, hasil, pembahasan, serta rekomendasi. Booth, Colomb, dan Williams (2016) menekankan bahwa penulisan ilmiah merupakan bagian integral dari proses penelitian karena di situlah kontribusi akademik peneliti dikomunikasikan kepada komunitas ilmiah.

4.7 Jadwal dan Anggaran Penelitian

Dalam penelitian terapan dan evaluasi kebijakan publik, penyusunan jadwal dan anggaran merupakan bagian integral dari desain metodologis karena menentukan kelayakan operasional serta efisiensi pelaksanaan penelitian. Secara konseptual, perencanaan waktu dan biaya berkaitan erat dengan prinsip manajemen proyek penelitian yang menekankan pengaturan sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan ilmiah dalam batasan tertentu (Kerzner, 2017). Dalam metodologi penelitian sosial, Creswell (2018) juga menegaskan bahwa rencana kerja yang realistis dan transparan merupakan indikator penting dari rancangan penelitian yang dapat dilaksanakan (*feasible*).

4.7.1. Penyusunan Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian menggambarkan urutan kegiatan yang akan dilakukan selama periode tertentu, mulai dari persiapan hingga pelaporan hasil. Dalam praktik akademik, jadwal sering disajikan dalam bentuk matriks kegiatan per bulan atau bagan Gantt yang memungkinkan visualisasi hubungan antaraktivitas dan estimasi durasi setiap tahap (Meredith & Mantel, 2012). Penyusunan jadwal harus memperhitungkan sifat penelitian—misalnya penelitian lapangan yang membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan studi dokumentasi—serta potensi hambatan administratif seperti perizinan atau akses ke lokasi penelitian.

Dalam konteks administrasi publik, jadwal penelitian biasanya mencakup kegiatan telaah literatur, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan data di instansi pemerintah atau masyarakat, analisis data, serta penulisan laporan akhir. Yin (2018) menekankan bahwa perencanaan waktu yang rinci juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, karena memungkinkan peneliti memonitor kemajuan penelitian dan melakukan penyesuaian apabila terjadi deviasi dari rencana awal.

4.7.2. Penyusunan Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian merupakan perincian biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Dalam perspektif metodologis, anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan strategi penelitian yang dipilih, misalnya jumlah lokasi studi kasus, ukuran sampel survei, atau intensitas kerja lapangan (Neuman, 2014). Oleh karena itu, setiap pos

biaya harus memiliki justifikasi ilmiah yang terkait langsung dengan desain penelitian.

Komponen anggaran dalam penelitian administrasi publik umumnya meliputi biaya transportasi dan akomodasi lapangan, penggandaan atau distribusi kuesioner, honor enumerator atau transkriptor wawancara, pengolahan dan analisis data, serta biaya publikasi atau diseminasi hasil. Dalam penelitian evaluatif, Patton (2015) menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kedalaman analisis dan keterbatasan sumber daya agar penelitian tetap menghasilkan temuan yang berguna bagi pengambil kebijakan.

4.7.3. Integrasi Jadwal dan Anggaran dalam Perencanaan Penelitian

Jadwal dan anggaran sebaiknya dipandang sebagai dua komponen yang saling terkait. Penambahan lokasi penelitian atau perluasan sampel, misalnya, akan berdampak langsung pada durasi penelitian dan besaran biaya yang diperlukan. Kerzner (2017) menunjukkan bahwa dalam manajemen proyek, integrasi antara ruang lingkup kegiatan, waktu, dan biaya merupakan prinsip dasar untuk memastikan proyek—termasuk proyek penelitian—dapat diselesaikan secara efektif.

Dengan demikian, penyusunan jadwal dan anggaran penelitian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian strategis dari desain metodologis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan studi. Perencanaan yang matang memungkinkan peneliti mengoptimalkan

sumber daya, meminimalkan risiko keterlambatan, serta memastikan bahwa penelitian administrasi publik dapat memberikan kontribusi ilmiah dan kebijakan secara maksimal.

BAB V

KUALITAS DATA DAN ETIKA PENELITIAN

5.1 Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas merupakan dua konsep fundamental dalam metodologi penelitian sosial, khususnya dalam pendekatan kuantitatif, karena keduanya menentukan tingkat kepercayaan terhadap data dan kesimpulan yang dihasilkan. Sejak karya klasik Campbell dan Stanley (1963) tentang desain eksperimen, kedua konsep ini diposisikan sebagai prasyarat utama bagi inferensi kausal yang sah. Dalam penelitian administrasi publik, isu validitas dan reliabilitas menjadi krusial mengingat temuan penelitian sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan atau evaluasi kinerja birokrasi.

5.1.1. Validitas Instrumen Penelitian

Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen atau prosedur pengukuran benar-benar mengukur konstruk teoretis yang dimaksud (Cronbach & Meehl, 1955). Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan ketepatan interpretasi terhadap skor atau data yang diperoleh, bukan semata-mata terhadap alat ukurnya. Dalam literatur metodologi modern, validitas dipahami sebagai konsep terpadu yang mencakup berbagai sumber bukti empiris (Messick, 1995).

Dalam praktik penelitian sosial dan administrasi publik, validitas biasanya dikaji melalui beberapa bentuk utama. Validitas isi berkaitan dengan derajat kesesuaian indikator atau item instrumen dengan domain konsep teoretik yang diukur, misalnya apakah seluruh dimensi “kualitas pelayanan publik” telah tercakup dalam kuesioner. Pendekatan ini lazim dilakukan melalui penilaian para ahli (*expert judgment*), sebagaimana disarankan oleh Haynes, Richard, dan Kubany (1995). Validitas konstruk menilai apakah struktur hubungan antarindikator sesuai dengan teori yang melandasi konstruk tersebut, sering kali diuji melalui analisis faktor eksploratori atau konfirmatori, yang berkembang pesat sejak karya Spearman dan kemudian diperluas dalam statistik multivariat modern (Hair et al., 2019). Sementara itu, validitas kriteria menguji kesesuaian hasil pengukuran dengan ukuran eksternal yang relevan—baik secara simultan (*concurrent validity*) maupun prediktif (*predictive validity*)—misalnya membandingkan skor persepsi kinerja pelayanan dengan data administratif resmi.

5.1.2. Reliabilitas Pengukuran

Reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi atau keterandalan hasil pengukuran apabila instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang relatif sama (Nunnally & Bernstein, 1994). Instrumen yang reliabel menghasilkan skor yang stabil, bebas dari kesalahan acak yang berlebihan, sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang lebih akurat. Salah satu ukuran reliabilitas yang paling banyak digunakan dalam

penelitian survei adalah koefisien alpha yang diperkenalkan oleh Cronbach (1951), yang mengukur konsistensi internal antaritem dalam suatu skala.

Selain konsistensi internal, reliabilitas juga dapat dinilai melalui pendekatan *test-retest*, yang menguji stabilitas skor dari waktu ke waktu, serta *inter-rater reliability*, yang menilai tingkat kesepakatan antarpenilai dalam observasi atau analisis dokumen—suatu aspek penting dalam penelitian administrasi publik yang melibatkan pengkodean kebijakan atau penilaian kinerja organisasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

5.1.3. Relevansi bagi Penelitian Administrasi Publik

Dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik, validitas dan reliabilitas memiliki implikasi langsung terhadap kualitas rekomendasi kebijakan. Pengukuran yang tidak valid terhadap kepuasan masyarakat, transparansi birokrasi, atau efektivitas program pemerintah dapat menghasilkan diagnosis masalah yang keliru dan berujung pada intervensi kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Creswell (2018) menekankan pentingnya pelaporan prosedur uji validitas dan reliabilitas secara eksplisit dalam laporan penelitian, agar pembaca dapat menilai kredibilitas temuan.

Dengan demikian, validitas dan reliabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kriteria teknis pengukuran, tetapi juga sebagai fondasi epistemologis bagi kepercayaan terhadap pengetahuan ilmiah yang dihasilkan penelitian administrasi publik.

5.2 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, instrumen penelitian perlu melalui proses pengujian empiris melalui uji coba terbatas atau *pilot study*. Dalam metodologi penelitian sosial, *pilot study* dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa instrumen telah memenuhi standar kejelasan, ketepatan pengukuran, serta konsistensi internal (van Teijlingen & Hundley, 2001). Dalam penelitian administrasi publik, tahap ini menjadi krusial karena instrumen sering digunakan untuk mengukur konstruk abstrak seperti akuntabilitas, kepercayaan publik, atau efektivitas kebijakan, yang sangat bergantung pada kualitas indikator yang digunakan.

Secara konseptual, pengujian instrumen bertujuan untuk menilai apakah item pertanyaan dapat dipahami oleh responden sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti, apakah variasi jawaban mencerminkan perbedaan empiris yang nyata, serta apakah struktur indikator sesuai dengan kerangka teoretik yang melandasi penelitian. DeVellis (2016) menekankan bahwa pengembangan instrumen merupakan proses iteratif, di mana hasil uji coba awal digunakan untuk merevisi, menghapus, atau menambah item agar konstruk yang diukur semakin presisi.

Dalam penelitian kuantitatif, beberapa teknik statistik lazim digunakan untuk mengevaluasi kualitas instrumen:

5.2.1. Uji Validitas Item

Uji validitas item bertujuan menilai sejauh mana setiap butir pertanyaan berkontribusi terhadap pengukuran konstruk secara keseluruhan. Secara klasik, teknik yang banyak digunakan adalah korelasi antara skor item dengan skor total skala (*item-total correlation*), sebagaimana dijelaskan oleh Nunnally dan Bernstein (1994). Item dengan koefisien korelasi rendah mengindikasikan bahwa pertanyaan tersebut kurang merepresentasikan konstruk yang dimaksud dan perlu direvisi atau dieliminasi. Dalam penelitian administrasi publik, uji ini penting untuk memastikan bahwa setiap indikator, misalnya tentang transparansi atau kualitas pelayanan, benar-benar sejalan dengan definisi teoretiknya.

5.2.2. Uji Reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha*

Reliabilitas instrumen biasanya diuji melalui koefisien *Cronbach's Alpha* yang diperkenalkan oleh Cronbach (1951) untuk mengukur konsistensi internal antaritem dalam satu skala. Nilai alpha yang tinggi menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen relatif homogen dan mengukur konstruk yang sama. Menurut Hair et al. (2019), nilai alpha di atas 0,70 umumnya dianggap memadai dalam penelitian sosial, meskipun pada tahap eksploratori nilai yang sedikit lebih rendah masih dapat ditoleransi. Hasil uji reliabilitas juga digunakan untuk mengidentifikasi item yang menurunkan konsistensi skala sehingga dapat diperbaiki atau dihapus.

5.2.3. Analisis Faktor Eksploratori

Analisis faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis/EFA*) digunakan untuk menguji struktur laten dari seperangkat item dan menilai apakah indikator-indikator tersebut mengelompok sesuai dengan dimensi teoretik yang diasumsikan (Fabrigar et al., 1999). Teknik ini sangat berguna dalam pengembangan instrumen baru atau adaptasi skala ke konteks administrasi publik di Indonesia, karena dapat mengungkap apakah konstruk seperti kinerja organisasi atau partisipasi publik memiliki dimensi empiris yang berbeda dari yang dilaporkan dalam literatur internasional.

Secara keseluruhan, hasil uji instrumen melalui *pilot study* menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penyempurnaan sebelum pengumpulan data utama. Creswell (2018) menekankan bahwa pelaporan prosedur uji instrumen dalam karya ilmiah merupakan bagian dari transparansi metodologis, karena memungkinkan pembaca menilai kualitas pengukuran yang digunakan. Dengan demikian, uji instrumen tidak hanya berfungsi sebagai tahap teknis, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian mutu ilmiah dalam penelitian administrasi publik dan kebijakan publik.

5.3 Trustworthiness dalam Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif, kualitas temuan tidak dinilai melalui uji statistik sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif, melainkan melalui konsep *trustworthiness* atau keterpercayaan hasil penelitian. Konsep ini diperkenalkan secara sistematis oleh Lincoln dan Guba (1985) sebagai alternatif terhadap

validitas dan reliabilitas positivistik, dengan tujuan menilai sejauh mana proses dan hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian administrasi publik, pendekatan ini menjadi penting karena banyak studi berfokus pada proses kebijakan, dinamika organisasi, dan makna subjektif aktor yang tidak dapat direduksi ke dalam angka semata.

Empat dimensi utama *trustworthiness* yang diajukan oleh Lincoln dan Guba (1985) meliputi:

5.3.1. *Credibility*

Credibility merujuk pada tingkat keyakinan bahwa temuan penelitian merepresentasikan secara akurat pengalaman dan perspektif partisipan. Dimensi ini sepadan dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Untuk meningkatkan *credibility*, peneliti dapat menggunakan strategi seperti triangulasi sumber atau metode, observasi berkelanjutan di lapangan (*prolonged engagement*), serta *member checking*, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan utama (Creswell & Poth, 2018). Dalam studi administrasi publik, misalnya, temuan tentang implementasi kebijakan dapat diverifikasi melalui perbandingan wawancara pejabat, dokumen resmi, dan pengamatan langsung terhadap praktik birokrasi.

5.2.2. *Transferability*

Transferability mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dibandingkan dengan konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Berbeda dengan generalisasi statistik, transferabilitas dicapai melalui penyediaan deskripsi konteks yang rinci (*thick description*), sebagaimana ditegaskan oleh Geertz (1973) dalam antropologi interpretatif. Dengan menyajikan latar institusional, sosial, dan kebijakan secara mendalam, peneliti memungkinkan pembaca atau peneliti lain menilai relevansi temuan untuk situasi berbeda.

5.3.3. Dependability

Dependability berkaitan dengan konsistensi dan keterlacakan proses penelitian dari awal hingga akhir, sehingga pihak lain dapat memahami bagaimana keputusan metodologis diambil. Dimensi ini sepadan dengan reliabilitas dalam pendekatan kuantitatif. Lincoln dan Guba (1985) menyarankan penggunaan *audit trail*, yaitu dokumentasi sistematis mengenai desain penelitian, perubahan fokus selama kerja lapangan, prosedur pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis. Dalam penelitian administrasi publik, hal ini penting mengingat studi sering berlangsung dalam lingkungan organisasi yang dinamis.

5.3.4. Confirmability

Confirmability merujuk pada sejauh mana temuan penelitian didasarkan pada data empiris dan bukan pada bias atau asumsi pribadi peneliti. Untuk meningkatkan dimensi ini, peneliti dapat melakukan refleksi diri

(*reflexivity*), menyimpan catatan analitis, serta melibatkan peneliti lain dalam proses penelaahan data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Praktik ini membantu memastikan bahwa interpretasi kebijakan atau perilaku birokrasi benar-benar berakar pada bukti lapangan.

5.3.5 Strategi Meningkatkan Trustworthiness

Untuk menguatkan keempat dimensi tersebut, berbagai strategi metodologis dapat diterapkan secara terpadu. Triangulasi baik data, metode, maupun peneliti berfungsi memperkaya perspektif terhadap fenomena yang diteliti (Denzin, 1978). *Member checking* memungkinkan klarifikasi makna temuan dengan partisipan, sementara *audit trail* menyediakan rekam jejak keputusan metodologis. Observasi berkelanjutan dan keterlibatan jangka panjang di lapangan juga membantu peneliti memahami konteks institusional secara lebih mendalam dan mengurangi kesalahan interpretasi awal.

Dengan demikian, *trustworthiness* merupakan fondasi epistemologis utama dalam penelitian kualitatif administrasi publik, yang memastikan bahwa temuan tidak hanya kaya secara deskriptif, tetapi juga dapat dipercaya, transparan, dan relevan bagi pengembangan teori serta praktik kebijakan publik

5.4 Etika Penelitian Administrasi Publik

Etika penelitian merupakan seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku peneliti dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan

data, analisis, hingga pelaporan hasil. Dalam bidang administrasi publik, isu etika memiliki posisi yang sangat strategis karena penelitian sering berhubungan dengan aktor negara, organisasi publik, kebijakan yang berdampak luas, serta kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar etika tidak hanya bertujuan melindungi partisipan penelitian, tetapi juga menjaga legitimasi ilmiah dan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian.

Salah satu prinsip fundamental dalam etika penelitian adalah informed consent, yakni persetujuan sadar yang diberikan oleh partisipan setelah memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi negatif. Prinsip ini banyak dirujuk dalam *Belmont Report* yang diterbitkan oleh National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research pada tahun 1979, yang menekankan penghormatan terhadap otonomi individu sebagai dasar hubungan etis antara peneliti dan responden. Dalam konteks administrasi publik, informed consent menjadi semakin penting ketika peneliti mewawancarai aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, atau warga yang terlibat dalam program kebijakan tertentu, karena posisi struktural dan relasi kekuasaan dapat memengaruhi kebebasan mereka dalam memberikan jawaban.

Selain persetujuan sadar, penelitian juga harus menjamin kerahasiaan dan anonimitas partisipan.

Kerahasiaan merujuk pada kewajiban peneliti untuk melindungi data pribadi yang diperoleh selama penelitian agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan, sedangkan anonimitas berarti identitas partisipan tidak dapat dikenali dalam laporan atau publikasi penelitian. Kode etik yang dikemukakan oleh American Sociological Association (ASA) dalam edisi 2018 menegaskan bahwa peneliti berkewajiban menyimpan data secara aman serta menghapus atau menyamarkan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi individu maupun institusi tertentu. Dalam studi administrasi publik, hal ini menjadi krusial ketika penelitian menyentuh isu korupsi, konflik kebijakan, atau evaluasi kinerja birokrasi, karena pengungkapan identitas dapat menimbulkan risiko profesional maupun sosial bagi informan.

Prinsip berikutnya adalah non-maleficence atau tidak menimbulkan kerugian bagi partisipan, yang juga tercantum dalam *Belmont Report* (1979) melalui asas *beneficence*. Peneliti berkewajiban meminimalkan potensi dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun administratif, yang mungkin dialami oleh responden akibat keterlibatan mereka dalam penelitian. Dalam penelitian kebijakan publik, misalnya, pertanyaan yang terlalu sensitif atau penyajian temuan yang tidak hati-hati dapat memicu tekanan psikologis, konflik internal organisasi, atau bahkan sanksi birokrasi bagi partisipan. Oleh sebab itu, peneliti harus melakukan penilaian risiko sejak tahap desain penelitian dan menyesuaikan metode pengumpulan data agar tetap menghormati keamanan dan kesejahteraan responden.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi tujuan dan proses penelitian. Creswell (2014) menekankan bahwa penelitian sosial yang etis harus dilakukan secara terbuka mengenai maksud studi, sumber pendanaan, serta bagaimana data akan digunakan. Transparansi ini berfungsi mencegah manipulasi informasi, penyamaran tujuan penelitian, atau eksploitasi partisipan untuk kepentingan tertentu. Dalam administrasi publik, transparansi juga berkaitan dengan akuntabilitas akademik, terutama ketika penelitian didanai oleh lembaga pemerintah atau digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Peneliti harus mampu menjaga independensi analisis dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas temuan.

Prinsip terakhir adalah integritas ilmiah, yang mengacu pada kejujuran dan tanggung jawab peneliti dalam mengelola data, melakukan analisis, serta melaporkan hasil penelitian. Menurut Merton (1973), norma universalitas dan disinterestedness dalam komunitas ilmiah menuntut agar peneliti tidak memalsukan data, tidak melakukan plagiarisme, serta tidak memanipulasi temuan demi mendukung hipotesis tertentu atau kepentingan pihak tertentu. Dalam ranah administrasi publik, integritas ilmiah menjadi sangat penting karena hasil penelitian sering dijadikan dasar perumusan kebijakan atau evaluasi program pemerintah. Penyimpangan etis dalam pelaporan hasil bukan hanya merusak kredibilitas akademik, tetapi juga berpotensi menyesatkan pengambil keputusan dan merugikan masyarakat luas.

Dengan demikian, etika penelitian dalam administrasi publik tidak sekadar menjadi seperangkat aturan prosedural, melainkan fondasi normatif yang memastikan bahwa proses pencarian pengetahuan dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati martabat manusia. Kepatuhan terhadap prinsip informed consent, perlindungan kerahasiaan, pencegahan kerugian, transparansi, serta integritas ilmiah merupakan syarat utama agar penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus sosial bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

5.5 Perlindungan Subjek Penelitian

Perlindungan terhadap subjek penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika penelitian sosial dan kebijakan publik. Peneliti memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin bahwa hak, martabat, serta keselamatan seluruh partisipan dihormati sepanjang proses penelitian. Perlindungan ini tidak hanya berlaku pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup penyimpanan, pengolahan, serta publikasi hasil penelitian. Dalam tradisi penelitian sosial, prinsip ini berakar pada pemikiran tentang penghormatan terhadap manusia sebagai subjek moral, sebagaimana ditegaskan dalam *Belmont Report* (1979) melalui prinsip *respect for persons* dan *beneficence*, yang menuntut agar individu diperlakukan sebagai agen yang otonom sekaligus dilindungi dari potensi bahaya.

Salah satu aspek utama dalam perlindungan subjek penelitian adalah perlindungan data pribadi. Data yang

diperoleh dari partisipan, baik berupa identitas, rekaman wawancara, dokumen internal organisasi, maupun informasi sensitif lainnya, harus disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik yang telah disepakati sebelumnya. Israel dan Hay (2006) dalam *Research Ethics for Social Scientists* menekankan bahwa pengelolaan data yang tidak hati-hati dapat menimbulkan risiko sosial, hukum, dan reputasional bagi responden, terutama ketika penelitian menyangkut birokrasi publik atau evaluasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti perlu menerapkan mekanisme pengamanan seperti penyandian identitas (coding), penyimpanan berlapis sandi, serta pembatasan akses terhadap data mentah.

Perlindungan juga berkaitan dengan penggunaan informasi secara bertanggung jawab. Data yang dikumpulkan tidak boleh dimanipulasi, disalahgunakan, atau dipublikasikan di luar tujuan yang telah diinformasikan kepada partisipan. Menurut Neuman (2014), penelitian sosial yang etis mensyaratkan bahwa setiap pemanfaatan lanjutan atas data—misalnya untuk publikasi lain atau penelitian lanjutan—harus tetap berada dalam kerangka persetujuan awal atau memperoleh izin baru dari partisipan bila diperlukan. Dalam konteks administrasi publik, kehati-hatian ini menjadi penting karena informasi yang diungkap dapat memengaruhi reputasi lembaga pemerintah, posisi profesional aparatur, atau persepsi publik terhadap suatu program kebijakan.

Hak partisipan untuk menarik diri dari penelitian kapan pun tanpa sanksi juga merupakan prinsip mendasar dalam

perlindungan subjek penelitian. Creswell (2014) menyatakan bahwa partisipasi dalam penelitian harus bersifat sukarela dan bebas dari tekanan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam penelitian administrasi publik, relasi hierarkis antara peneliti dan pejabat atau pegawai negeri dapat menciptakan situasi di mana responden merasa wajib berpartisipasi. Oleh karena itu, peneliti perlu menegaskan sejak awal bahwa keikutsertaan bersifat opsional, jawaban dapat dilewati, dan partisipan dapat menghentikan keterlibatan mereka tanpa konsekuensi administratif atau profesional.

Selain perlindungan langsung terhadap partisipan, banyak institusi akademik mensyaratkan adanya persetujuan dari komite etik penelitian atau lembaga berwenang sebelum penelitian dilaksanakan. Prosedur ini dikenal luas sebagai *ethical clearance* atau *Institutional Review Board (IRB)* dalam tradisi akademik internasional. Menurut Israel dan Hay (2006), fungsi utama komite etik adalah menilai potensi risiko penelitian, keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif, serta kecukupan prosedur perlindungan terhadap subjek penelitian. Dalam konteks pendidikan tinggi dan lembaga riset di Indonesia, mekanisme serupa dijalankan melalui komite etik universitas atau lembaga penelitian pemerintah yang bertugas memastikan bahwa penelitian mematuhi standar nasional maupun internasional.

Dengan demikian, perlindungan subjek penelitian dalam administrasi publik mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan akuntabilitas ilmiah. Upaya menjaga keamanan data,

penggunaan informasi secara bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak partisipan untuk menarik diri, serta kepatuhan terhadap prosedur persetujuan etik institusional merupakan prasyarat utama agar penelitian tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

5.6 Integritas Akademik dan Pencegahan Plagiarisme

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas penelitian ilmiah, termasuk dalam kajian administrasi publik yang kerap digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan evaluasi program pemerintah. Integritas ini mengacu pada komitmen peneliti terhadap kejujuran intelektual, tanggung jawab profesional, serta penghormatan terhadap karya ilmiah pihak lain. Menurut Macfarlane, Zhang, dan Pun (2014), integritas akademik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam menulis, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga publikasi temuan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi hasil, dan manipulasi sitasi, dapat merusak kredibilitas peneliti sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap dunia akademik.

Plagiarisme dipahami sebagai tindakan mengambil ide, data, atau ungkapan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada sumber aslinya. Fishman (2009) mendefinisikan plagiarisme sebagai penggunaan kata-kata, gagasan, atau struktur argumentasi pihak lain tanpa atribusi yang memadai, sehingga menimbulkan

kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil pemikiran sendiri. Dalam konteks penelitian administrasi publik, plagiarisme tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga berpotensi menyesatkan pembuat kebijakan apabila sumber asli dan konteks temuan sebelumnya tidak diungkap secara jujur.

Upaya pencegahan plagiarisme dilakukan melalui penerapan sitasi yang benar dan konsisten sesuai dengan gaya penulisan ilmiah yang diakui, seperti APA, Chicago, atau Harvard. American Psychological Association (2020) dalam edisi ketujuh *Publication Manual* menegaskan bahwa setiap penggunaan gagasan, kutipan langsung, data, atau tabel dari karya lain harus disertai rujukan yang jelas dalam teks dan daftar pustaka. Praktik sitasi yang tepat bukan sekadar formalitas teknis, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual serta cara menunjukkan posisi penelitian dalam peta keilmuan yang lebih luas.

Selain itu, banyak institusi pendidikan tinggi mendorong penggunaan perangkat lunak pendeteksi kemiripan naskah, seperti Turnitin atau iThenticate, sebagai bagian dari mekanisme penjaminan mutu akademik. Menurut Bretag (2016), teknologi pendeteksi kemiripan berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kesadaran penulis terhadap praktik penulisan yang etis, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman. Dalam kerangka ini, hasil pemeriksaan kemiripan seharusnya dimanfaatkan secara reflektif oleh peneliti untuk memperbaiki parafrase, memperjelas sitasi, dan memastikan bahwa seluruh sumber telah diakui dengan tepat.

Aspek penting lainnya dalam pencegahan plagiarisme adalah kemampuan melakukan parafrasa secara tepat. Menurut Roig (2015), parafrase yang etis tidak sekadar mengganti beberapa kata, melainkan mengekspresikan kembali gagasan orang lain dengan struktur kalimat baru dan pemahaman konseptual yang utuh, sambil tetap mencantumkan sumber aslinya. Dalam penelitian administrasi publik, parafrase yang baik membantu peneliti mengintegrasikan temuan terdahulu ke dalam kerangka analisis baru tanpa kehilangan konteks teoritis maupun kebijakan yang melatarinya.

Pencantuman sumber secara lengkap dalam daftar pustaka juga menjadi bagian dari integritas akademik. Neuman (2014) menekankan bahwa transparansi sumber memungkinkan pembaca untuk menelusuri kembali dasar argumen penelitian, mengevaluasi keandalan rujukan, serta mereplikasi atau mengembangkan studi lebih lanjut. Daftar pustaka yang akurat dan konsisten memperlihatkan bahwa penelitian dibangun di atas dialog ilmiah yang terbuka dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, integritas akademik tidak hanya berkaitan dengan plagiarisme, tetapi juga dengan larangan terhadap fabrikasi data—yakni menciptakan data yang sebenarnya tidak pernah dikumpulkan—serta falsifikasi hasil, yaitu memanipulasi atau menghilangkan sebagian temuan agar sesuai dengan hipotesis peneliti. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017) menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap etika riset karena merusak proses akumulasi pengetahuan ilmiah dan dapat

menimbulkan dampak kebijakan yang keliru apabila hasil penelitian digunakan dalam pengambilan keputusan publik.

Dengan demikian, integritas akademik dan pencegahan plagiarisme merupakan prasyarat mutlak bagi kualitas dan legitimasi penelitian administrasi publik. Melalui penerapan sitasi yang tepat, penggunaan teknologi pendeteksi kemiripan secara bijak, penguasaan teknik parafrase yang etis, pencantuman sumber yang lengkap, serta komitmen terhadap kejujuran dalam pengelolaan data dan pelaporan hasil, penelitian dapat memberikan kontribusi yang sah dan dapat dipercaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

BAB VI

TEKNIK ANALISIS DATA

6.1 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif merupakan proses sistematis dalam mengolah data berbentuk angka untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, serta menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Dalam bidang administrasi publik, pendekatan kuantitatif banyak digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, mengukur kinerja organisasi sektor publik, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi suatu program. Menurut Creswell dan Creswell (2018), analisis kuantitatif bertujuan menghasilkan generalisasi temuan melalui prosedur statistik yang terstandar dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Proses analisis data kuantitatif diawali dengan tahap editing data, yaitu pemeriksaan terhadap seluruh instrumen yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan jawaban, konsistensi antaritem, serta keterbacaan respon. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi kuesioner yang tidak lengkap, respons yang tidak logis, atau kesalahan pencatatan di lapangan. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa editing merupakan langkah awal dalam pengendalian kualitas

data agar informasi yang dianalisis benar-benar mencerminkan kondisi empiris.

Setelah itu dilakukan coding, yaitu pemberian kode numerik terhadap setiap kategori jawaban responden agar dapat diproses secara statistik. Misalnya, jawaban “sangat puas” hingga “sangat tidak puas” dapat dikodekan dalam skala Likert tertentu. Menurut Neuman (2014), proses coding memungkinkan data kualitatif terbatas dalam kuesioner tertutup diubah menjadi format kuantitatif yang siap dianalisis, sekaligus menjaga konsistensi pengukuran antarresponden.

Tahap berikutnya adalah entry data, yakni memasukkan seluruh data yang telah dikodekan ke dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, R, atau SmartPLS. Pada fase ini, peneliti harus memastikan bahwa struktur variabel, label nilai, serta tipe data telah disesuaikan dengan desain penelitian dan instrumen pengukuran. Hair et al. (2019) menekankan bahwa kesalahan dalam proses input data dapat berdampak signifikan pada hasil analisis lanjutan, sehingga diperlukan ketelitian tinggi dan prosedur pengecekan ulang.

Setelah data dimasukkan, dilakukan cleaning data atau pembersihan data, yang mencakup pendeteksian dan koreksi terhadap kesalahan input, data ganda, nilai ekstrem (*outliers*), maupun data yang hilang (*missing values*). Pada tahap ini, peneliti juga dapat melakukan keputusan metodologis, seperti apakah akan menghapus kasus tertentu atau menggunakan teknik imputasi data. Menurut Tabachnick dan Fidell (2019), pembersihan data

merupakan prasyarat penting sebelum analisis statistik dilakukan agar asumsi-asumsi statistik dapat terpenuhi dan hasil penelitian menjadi lebih akurat.

Tahap akhir dalam analisis kuantitatif adalah analisis statistik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, serta model konseptual yang digunakan. Analisis dapat bersifat deskriptif, seperti penghitungan rerata, persentase, dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik responden atau kecenderungan variabel, maupun inferensial, seperti uji *t*, ANOVA, korelasi, regresi linier, regresi logistik, atau *structural equation modeling* (SEM) untuk menguji hubungan kausal dan hipotesis penelitian. Field (2018) menegaskan bahwa pemilihan teknik statistik harus didasarkan pada skala pengukuran, distribusi data, serta jumlah sampel agar kesimpulan yang dihasilkan valid secara ilmiah.

Dengan demikian, analisis data kuantitatif dalam penelitian administrasi publik merupakan rangkaian prosedur terstruktur yang dimulai dari pengendalian kualitas data hingga penerapan teknik statistik yang tepat. Ketelitian dalam setiap tahapan—mulai dari editing, coding, entry, cleaning, hingga analisis statistik—menjadi kunci agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis serta memberikan kontribusi nyata bagi perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

6.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik utama suatu kumpulan data tanpa melakukan generalisasi ke populasi yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran awal mengenai pola, kecenderungan sentral, penyebaran, serta bentuk distribusi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian administrasi publik, statistik deskriptif sering dimanfaatkan untuk memaparkan profil responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, persepsi aparatur terhadap implementasi kebijakan, atau kondisi kinerja organisasi sektor publik. Menurut Gravetter dan Wallnau (2017), statistik deskriptif berfungsi sebagai langkah awal yang penting sebelum dilakukan analisis inferensial, karena membantu peneliti memahami struktur dasar data yang akan diuji lebih lanjut.

Ukuran yang paling umum digunakan dalam statistik deskriptif adalah ukuran pemusatan data, yang meliputi mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan modus (nilai yang paling sering muncul). Mean memberikan informasi mengenai kecenderungan umum data secara keseluruhan, median menunjukkan titik tengah distribusi ketika data diurutkan, sedangkan modus menggambarkan kategori atau nilai yang paling dominan. Field (2018) menjelaskan bahwa pemilihan ukuran pemusatan yang tepat bergantung pada karakteristik distribusi data; misalnya, median sering lebih representatif dibandingkan mean ketika data bersifat sangat menceng atau mengandung nilai ekstrem.

Selain ukuran pemusatan, statistik deskriptif juga mencakup ukuran penyebaran data, seperti rentang (*range*), varians, dan standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya, sehingga memberikan gambaran mengenai homogenitas atau heterogenitas responden. Menurut Tabachnick dan Fidell (2019), informasi mengenai penyebaran data sangat penting dalam penelitian sosial karena membantu menilai stabilitas temuan serta menjadi dasar dalam memilih teknik analisis lanjutan.

Statistik deskriptif juga digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi, yaitu sebaran jumlah kasus pada setiap kategori atau interval nilai tertentu. Distribusi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tabel persentase, maupun tabel silang (*cross-tabulation*) untuk membandingkan dua atau lebih variabel. Dalam studi administrasi publik, misalnya, tabel silang dapat digunakan untuk melihat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan wilayah, jenis layanan, atau karakteristik demografis. Neuman (2014) menyatakan bahwa penyajian distribusi frekuensi membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola awal serta kemungkinan adanya penyimpangan data yang perlu diperhatikan sebelum analisis inferensial dilakukan.

Untuk mempermudah interpretasi hasil, statistik deskriptif sering dilengkapi dengan visualisasi data dalam bentuk grafik dan diagram. Grafik batang, diagram lingkaran, histogram, maupun *boxplot* dapat digunakan untuk menampilkan distribusi, perbandingan antar kategori, serta keberadaan nilai ekstrem secara lebih

intuitif. Menurut Few (2012), visualisasi yang baik tidak hanya mempercantik penyajian data, tetapi juga berperan penting dalam mengomunikasikan temuan secara jelas dan akurat kepada pembaca, khususnya bagi pengambil kebijakan yang membutuhkan ringkasan informasi secara cepat dan mudah dipahami.

Dengan demikian, statistik deskriptif memiliki peran strategis dalam penelitian administrasi publik sebagai sarana untuk menyajikan gambaran empiris awal mengenai data yang dikumpulkan. Melalui penggunaan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, distribusi frekuensi, serta visualisasi yang tepat, peneliti dapat menjelaskan kondisi lapangan secara sistematis sekaligus menyiapkan dasar yang kuat bagi analisis inferensial dan penarikan kesimpulan lebih lanjut.

6.1.2 Statistik Inferensial

Statistik inferensial merupakan seperangkat teknik analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Melalui prosedur ini, peneliti tidak hanya menggambarkan data, tetapi juga menguji hipotesis, memperkirakan parameter populasi, serta menentukan apakah hubungan atau perbedaan yang ditemukan bersifat signifikan secara statistik. Dalam penelitian administrasi publik, statistik inferensial banyak dimanfaatkan untuk menilai dampak suatu kebijakan, membandingkan kinerja antarunit organisasi, menguji perbedaan persepsi masyarakat terhadap layanan publik, atau menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan implementasi program pemerintah. Menurut Gravetter dan Wallnau (2017), inti dari statistik inferensial adalah penggunaan teori probabilitas untuk membuat generalisasi yang terkontrol dari sampel ke populasi.

Beragam teknik statistik inferensial dapat digunakan sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik data. Uji t umumnya dipakai untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, misalnya tingkat kepuasan masyarakat sebelum dan sesudah penerapan suatu kebijakan atau perbedaan persepsi antara dua kelompok wilayah. Analisis varians (ANOVA) digunakan ketika perbandingan melibatkan lebih dari dua kelompok, seperti membandingkan kinerja pelayanan publik di beberapa kecamatan atau instansi. Field (2018) menjelaskan bahwa kedua teknik ini termasuk dalam uji parametrik yang mensyaratkan asumsi tertentu, seperti normalitas distribusi data dan homogenitas varians.

Untuk data yang berskala nominal atau kategorikal, teknik seperti uji chi-square sering digunakan guna mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel kategori, misalnya hubungan antara jenis layanan publik dengan tingkat kepuasan pengguna. Sementara itu, analisis korelasi dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kuantitatif, seperti hubungan antara tingkat transparansi anggaran dengan kepercayaan publik. Menurut Cohen, Cohen, West, dan Aiken (2013), korelasi memberikan informasi tentang asosiasi antarvariabel, namun tidak secara langsung menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Lebih lanjut, analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel terikat berdasarkan satu atau lebih variabel bebas serta menguji kontribusi relatif masing-masing faktor. Dalam administrasi publik, regresi sering diterapkan untuk menilai pengaruh kapasitas birokrasi, partisipasi masyarakat, atau kualitas layanan terhadap keberhasilan program kebijakan. Hair et al. (2019) menekankan bahwa regresi, baik linier maupun logistik, merupakan salah satu teknik inferensial yang paling luas digunakan dalam penelitian sosial karena fleksibilitasnya dalam menangani berbagai jenis variabel dan model penelitian.

Pemilihan teknik statistik inferensial harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jenis data, skala pengukuran, serta tujuan penelitian. Skala nominal dan ordinal umumnya dianalisis dengan teknik nonparametrik seperti chi-square atau uji Mann–Whitney, sedangkan data interval dan rasio lebih sesuai untuk teknik parametrik seperti uji *t*, ANOVA, dan regresi linier, selama asumsi-asumsi statistik terpenuhi. Tabachnick dan Fidell (2019) menegaskan bahwa pengujian asumsi, seperti normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas, merupakan langkah penting sebelum menarik kesimpulan inferensial agar hasil analisis tidak menyesatkan.

Dengan demikian, statistik inferensial memainkan peran krusial dalam penelitian administrasi publik sebagai alat untuk menghubungkan data empiris dengan teori serta memberikan dasar ilmiah bagi rekomendasi kebijakan. Melalui pemilihan teknik yang tepat dan penerapan

prosedur analisis yang sesuai dengan karakteristik data, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

6.1.3 Regresi dan Analisis Multivariat

Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistik inferensial yang paling banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus memprediksi perubahan nilai variabel terikat berdasarkan variasi faktor-faktor penjelasnya. Melalui regresi, peneliti dapat menilai kekuatan hubungan antarvariabel, arah pengaruh, serta signifikansi statistik dari setiap variabel bebas dalam suatu model analisis. Menurut Cohen et al. (2013), regresi memungkinkan peneliti menguji hipotesis teoritis secara empiris dengan mengendalikan pengaruh variabel lain yang turut berperan dalam fenomena yang diteliti.

Dalam praktiknya, regresi dapat berbentuk regresi linier sederhana ketika hanya melibatkan satu variabel independen, atau regresi linier berganda ketika terdapat lebih dari satu prediktor. Untuk variabel dependen yang bersifat dikotomis, seperti keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan, regresi logistik sering digunakan sebagai alternatif yang lebih tepat. Hair et al. (2019) menjelaskan bahwa penerapan regresi mensyaratkan pemenuhan sejumlah asumsi statistik, seperti linearitas hubungan, normalitas residual, tidak adanya multikolinearitas antarvariabel independen, serta

homoskedastisitas, sehingga hasil estimasi koefisien dapat dipercaya dan interpretasi temuan menjadi lebih akurat.

Di samping regresi, penelitian administrasi publik sering memanfaatkan analisis multivariat untuk mengkaji hubungan yang lebih kompleks antara banyak variabel secara simultan. Analisis multivariat mencakup berbagai teknik statistik yang dirancang untuk menangani lebih dari dua variabel dalam satu kerangka analisis, baik untuk tujuan eksploratif maupun konfirmatori. Tabachnick dan Fidell (2019) menyatakan bahwa pendekatan multivariat sangat berguna dalam penelitian sosial karena fenomena kebijakan dan organisasi publik umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berinteraksi.

Salah satu bentuk analisis multivariat yang bersifat eksploratif adalah analisis faktor, yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten di balik sejumlah besar indikator yang saling berkorelasi. Teknik ini sering diterapkan untuk menyederhanakan variabel, mengembangkan instrumen pengukuran, atau menemukan dimensi utama dari konsep abstrak seperti kualitas layanan publik, kepercayaan masyarakat, atau kapasitas institusional. Menurut Hair et al. (2019), analisis faktor membantu mereduksi kompleksitas data sekaligus memperkuat validitas konstruk dalam penelitian kuantitatif.

Teknik multivariat lainnya adalah cluster analysis, yang bertujuan mengelompokkan objek atau responden ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat kemiripan

karakteristik tertentu. Dalam administrasi publik, analisis kluster dapat digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe pengguna layanan, pola kinerja organisasi daerah, atau segmentasi wilayah berdasarkan indikator pembangunan. Everitt et al. (2011) menekankan bahwa cluster analysis berguna dalam studi kebijakan untuk memahami heterogenitas populasi dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Structural Equation Modeling (SEM) merupakan pendekatan multivariat yang lebih komprehensif karena menggabungkan analisis faktor dan regresi dalam satu kerangka model struktural. SEM memungkinkan peneliti menguji hubungan kausal antar konstruk laten sekaligus mengevaluasi kesesuaian model teoritis dengan data empiris. Dalam penelitian administrasi publik, SEM sering digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks antara kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, kinerja birokrasi, dan kepercayaan publik. Kline (2016) menjelaskan bahwa kekuatan utama SEM terletak pada kemampuannya menguji model teoritis yang rumit secara simultan, dengan mempertimbangkan kesalahan pengukuran pada setiap konstruk.

Dengan demikian, regresi dan analisis multivariat memberikan perangkat analisis yang kuat bagi peneliti administrasi publik untuk memahami dinamika hubungan antarvariabel secara lebih mendalam dan komprehensif. Melalui pemilihan teknik yang tepat, pengujian asumsi statistik yang memadai, serta interpretasi hasil yang hati-hati, peneliti dapat menghasilkan temuan empiris yang

tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga bermakna secara substantif bagi pengembangan teori dan perumusan kebijakan publik.

6.2 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif merupakan proses interpretatif yang bertujuan memahami makna, pola, dan dinamika sosial di balik data nonnumerik, seperti transkrip wawancara, catatan observasi lapangan, dokumen kebijakan, arsip organisasi, serta berbagai bentuk teks lainnya. Dalam penelitian administrasi publik, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan, perilaku aktor birokrasi, dinamika organisasi sektor publik, relasi antara pemerintah dan masyarakat, serta konteks sosial-politik yang memengaruhi suatu program. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis kualitatif bersifat siklikal dan berlangsung sepanjang proses penelitian, bukan hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, karena peneliti terus-menerus merefleksikan temuan lapangan untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

Tahap awal dalam analisis kualitatif adalah transkripsi data, yaitu mengubah rekaman wawancara atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) ke dalam bentuk teks tertulis secara verbatim. Proses ini memungkinkan peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap pernyataan informan, mengidentifikasi nuansa makna, serta menelusuri konteks sosial yang melatarinya. Poland (2002) menegaskan

bahwa ketelitian dalam transkripsi sangat menentukan kualitas analisis karena kesalahan penulisan atau penghilangan bagian tertentu dapat memengaruhi interpretasi hasil penelitian.

Setelah data tersedia dalam bentuk teks, peneliti melakukan open coding, yaitu tahap awal pengodean dengan cara mengurai data ke dalam unit-unit makna kecil dan memberi label konseptual terhadap potongan informasi yang dianggap relevan. Strauss dan Corbin (1998) menjelaskan bahwa open coding bertujuan membuka kemungkinan interpretasi seluas-luasnya dengan mengidentifikasi konsep, peristiwa, atau tindakan yang muncul dari data tanpa terlebih dahulu memaksakan kerangka teori tertentu. Dalam penelitian administrasi publik, tahap ini dapat menghasilkan kode-kode awal seperti “koordinasi antarlembaga,” “hambatan birokrasi,” atau “partisipasi masyarakat.”

Tahap berikutnya adalah axial coding, yaitu proses menghubungkan berbagai kategori yang telah dihasilkan pada tahap open coding untuk membentuk pola hubungan yang lebih sistematis. Pada fase ini, peneliti mulai menelusuri kondisi penyebab, konteks, strategi tindakan, serta konsekuensi dari suatu fenomena sosial atau kebijakan. Strauss dan Corbin (1998) menyatakan bahwa axial coding membantu peneliti membangun struktur analitis yang lebih koheren dengan mengaitkan kategori utama dan subkategori dalam satu kerangka konseptual.

Selanjutnya, peneliti melakukan selective coding, yakni tahap integrasi dan pemadatan analisis dengan memilih

kategori inti (*core category*) yang paling sentral dan menghubungkannya dengan kategori-kategori lain untuk membangun narasi teoritis atau cerita utama dari data. Pada tahap ini, fokus analisis tidak lagi pada pemecahan data menjadi bagian kecil, melainkan pada penyusunan penjelasan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Strauss dan Corbin (1998), *selective coding* merupakan langkah penting dalam menghasilkan teori substantif atau interpretasi mendalam yang berakar pada data empiris.

Tahap akhir dari analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Peneliti merumuskan pola-pola utama, proposisi analitis, atau implikasi kebijakan yang muncul dari hasil pengodean dan interpretasi data, sekaligus melakukan pengecekan ulang terhadap konsistensi temuan melalui berbagai strategi, seperti triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta diskusi sejawat. Miles et al. (2014) menekankan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus terus diuji selama proses analisis berlangsung agar tidak bersifat prematur atau bias peneliti.

Dengan demikian, analisis data kualitatif dalam penelitian administrasi publik merupakan proses reflektif dan sistematis yang melibatkan transkripsi, open coding, axial coding, selective coding, serta penarikan kesimpulan yang terverifikasi. Melalui tahapan-tahapan tersebut, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai proses kebijakan dan dinamika organisasi publik, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan

praktis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

6.2.1 Analisis Tematik

Analisis tematik merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola makna atau tema-tema utama yang muncul dari kumpulan data. Tema dipahami sebagai pola yang merepresentasikan sesuatu yang penting mengenai data dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Dalam kajian administrasi publik, analisis tematik sering digunakan untuk menelaah persepsi aparatur terhadap suatu kebijakan, pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik, dinamika koordinasi antarlembaga, atau faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program pemerintah. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik bersifat fleksibel dan dapat digunakan baik dalam penelitian yang berorientasi induktif—yakni tema muncul dari data lapangan—maupun deduktif, yaitu ketika peneliti menggunakan kerangka teori atau konsep tertentu sebagai panduan awal dalam pengodean.

Dalam pendekatan induktif, peneliti memulai analisis tanpa kategori yang kaku, membiarkan tema berkembang dari pembacaan berulang terhadap data empiris. Cara ini memungkinkan munculnya temuan-temuan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Sebaliknya, dalam pendekatan deduktif, analisis dilakukan dengan memanfaatkan konsep atau variabel

teoretis yang telah dirumuskan sejak awal, misalnya dimensi akuntabilitas, transparansi, atau kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Guest, MacQueen, dan Namey (2012), kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara komplementer, selama peneliti secara eksplisit menjelaskan posisi epistemologis dan strategi analisis yang dipilih.

Proses analisis tematik umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Peneliti terlebih dahulu melakukan pembacaan mendalam terhadap seluruh data untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, kemudian mengembangkan kode-kode awal yang merepresentasikan unit-unit makna penting. Kode-kode ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas dan dikembangkan menjadi tema-tema sementara. Braun dan Clarke (2006) menekankan bahwa tema tidak sekadar merupakan topik yang sering muncul, melainkan harus memiliki relevansi analitis terhadap tujuan penelitian dan mampu menjelaskan aspek penting dari fenomena yang diteliti.

Tahap berikutnya adalah peninjauan dan pematapan tema, yaitu dengan mengevaluasi apakah data yang terkumpul dalam setiap tema benar-benar koheren secara internal serta berbeda secara jelas dari tema lainnya. Pada fase ini, peneliti dapat menggabungkan, memisahkan, atau menghapus tema tertentu agar struktur analisis menjadi lebih kuat dan logis. Setelah itu, setiap tema didefinisikan dan diberi nama secara jelas, disertai deskripsi konseptual mengenai cakupan dan batasannya. Menurut Saldaña (2016), pendefinisian tema secara

eksplisit membantu meningkatkan transparansi proses analisis dan memudahkan pembaca memahami bagaimana peneliti sampai pada kesimpulan tertentu.

Dalam penelitian administrasi publik, hasil analisis tematik biasanya disajikan dalam bentuk narasi analitis yang didukung oleh kutipan langsung dari informan atau cuplikan dokumen sebagai bukti empiris. Penyajian semacam ini tidak hanya memperkuat validitas interpretasi, tetapi juga memberikan suara kepada partisipan penelitian. Miles et al. (2014) menegaskan bahwa penggunaan kutipan data secara selektif dan kontekstual merupakan bagian penting dari praktik pelaporan kualitatif yang kredibel.

Dengan demikian, analisis tematik merupakan pendekatan yang sistematis dan fleksibel untuk menafsirkan data kualitatif dalam penelitian administrasi publik. Melalui pengelompokan tema secara induktif maupun deduktif, serta proses pengodean, peninjauan, dan pendefinisian tema yang transparan, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai proses kebijakan dan dinamika organisasi publik, sekaligus memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan teori dan praktik pemerintahan.

6.2.2 Analisis Naratif

Analisis naratif merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita, kisah hidup, dan pengalaman subjektif partisipan untuk memahami bagaimana individu atau aktor organisasi memaknai

peristiwa, kebijakan, serta praktik administrasi yang mereka alami. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa manusia membangun pemahaman tentang dunia sosial melalui narasi, yakni dengan menyusun pengalaman mereka ke dalam alur cerita yang memiliki struktur, aktor, konflik, dan makna tertentu. Dalam konteks administrasi publik, analisis naratif sangat berguna untuk menelaah bagaimana pejabat publik, pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, atau warga penerima layanan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan, perubahan organisasi, maupun interaksi dengan birokrasi. Riessman (2008) menyatakan bahwa analisis naratif memungkinkan peneliti menggali bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut diceritakan dan dimaknai oleh para aktor yang terlibat.

Berbeda dengan analisis tematik yang cenderung memecah data ke dalam kategori-kategori, analisis naratif menaruh perhatian pada keseluruhan alur cerita dan konteks di mana pengalaman itu dikisahkan. Peneliti mengkaji struktur narasi, urutan peristiwa, peran aktor, serta cara partisipan meringkai keberhasilan, kegagalan, atau dilema yang mereka hadapi dalam praktik administrasi. Menurut Clandinin dan Connelly (2000), pendekatan ini menempatkan pengalaman sebagai pusat analisis dan memandang cerita sebagai sarana utama untuk memahami realitas sosial dalam penelitian pendidikan dan kebijakan publik.

Proses analisis naratif umumnya diawali dengan pengumpulan kisah melalui wawancara mendalam, biografi, atau dokumen pribadi, yang kemudian

ditranskripsikan secara rinci. Peneliti selanjutnya membaca data secara holistik untuk menangkap garis besar cerita sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap bagian-bagian tertentu. Riessman (2008) mengemukakan bahwa peneliti dapat memfokuskan analisis pada berbagai aspek, seperti struktur narasi (bagaimana cerita disusun), konten tematik (apa yang diceritakan), maupun performativitas (bagaimana cerita disampaikan kepada pendengar).

Dalam penelitian administrasi publik, analisis naratif dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana aktor kebijakan membingkai peran mereka, menafsirkan aturan formal, atau menjelaskan keputusan yang diambil dalam situasi kompleks. Misalnya, kisah petugas lapangan tentang kendala distribusi bantuan sosial dapat memperlihatkan ketegangan antara prosedur birokrasi dan kebutuhan masyarakat, sementara narasi pejabat daerah mengenai reformasi pelayanan publik dapat mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dan budaya organisasi yang dianut. Czarniawska (2004) menekankan bahwa analisis naratif dalam studi organisasi membantu mengungkap makna simbolik dan logika tindakan yang sering kali tidak tertangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Hasil analisis naratif biasanya disajikan dalam bentuk rekonstruksi cerita atau kutipan panjang yang dipilih secara cermat untuk menggambarkan pengalaman partisipan, disertai interpretasi analitis dari peneliti. Penyajian ini memungkinkan pembaca memahami perspektif subjek penelitian secara lebih mendalam

sekaligus menilai bagaimana peneliti membangun argumennya dari data empiris. Miles et al. (2014) menegaskan bahwa transparansi dalam proses interpretasi serta keterkaitan yang jelas antara data dan kesimpulan merupakan syarat penting agar analisis kualitatif memiliki kredibilitas.

Dengan demikian, analisis naratif memberikan kontribusi penting dalam penelitian administrasi publik dengan membuka ruang untuk memahami dimensi subjektif dari kebijakan dan praktik birokrasi. Melalui penelaahan cerita dan pengalaman aktor, peneliti dapat mengungkap cara-cara individu menafsirkan realitas administratif, menghadapi dilema implementasi, serta membangun makna atas perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

6.3 Integrasi Data dalam *Mixed Methods*

Dalam penelitian *mixed methods*, integrasi data merupakan inti dari desain metodologis karena pendekatan ini bertujuan mengombinasikan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti. Integrasi tidak sekadar menempatkan dua jenis data secara berdampingan, melainkan menyatukan temuan dari kedua pendekatan tersebut secara sistematis sehingga mampu memberikan penjelasan yang saling melengkapi, memperkuat, atau bahkan mengoreksi satu sama lain. Dalam kajian administrasi publik, *mixed methods* sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau program pemerintah, misalnya dengan mengukur capaian kinerja secara kuantitatif sekaligus menggali

pengalaman aktor pelaksana dan penerima manfaat secara kualitatif. Creswell dan Plano Clark (2018) menegaskan bahwa nilai utama *mixed methods* terletak pada kemampuan integrasinya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks.

Integrasi data dalam *mixed methods* dapat dilakukan pada berbagai tahap penelitian, mulai dari perancangan studi, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Salah satu bentuk integrasi yang umum digunakan adalah merging, yaitu menggabungkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif pada tahap interpretasi untuk dibandingkan dan disintesis. Dalam praktiknya, peneliti dapat menyajikan temuan statistik bersamaan dengan tema-tema kualitatif dalam satu matriks atau narasi terpadu, sehingga terlihat bagaimana kedua jenis data saling mendukung atau menunjukkan perbedaan tertentu. Menurut Fetters, Curry, dan Creswell (2013), teknik merging membantu peneliti melakukan triangulasi temuan dan meningkatkan kekuatan inferensi penelitian.

Bentuk integrasi lainnya adalah connecting, yakni menggunakan hasil dari satu pendekatan untuk merancang atau memandu pelaksanaan pendekatan berikutnya. Misalnya, hasil survei kuantitatif dapat digunakan untuk memilih informan kunci dalam studi kualitatif lanjutan atau menentukan aspek kebijakan tertentu yang perlu digali lebih mendalam melalui wawancara. Dalam desain sekuensial semacam ini, temuan awal berfungsi sebagai dasar logis bagi tahap penelitian berikutnya. Creswell dan Plano Clark (2018) menjelaskan bahwa strategi connecting sangat efektif

untuk memperdalam penjelasan atas pola-pola statistik yang ditemukan pada fase kuantitatif.

Selain itu, integrasi juga dapat dilakukan melalui *embedding*, yaitu menyisipkan satu jenis data ke dalam desain penelitian lain yang dominan. Sebagai contoh, sebuah studi eksperimen atau survei besar dapat dilengkapi dengan wawancara kualitatif singkat untuk memberikan konteks terhadap hasil numerik, atau sebaliknya, studi kualitatif mendalam dapat memasukkan data kuantitatif deskriptif untuk memperkuat deskripsi empiris. Menurut Greene (2007), pendekatan *embedded* memungkinkan peneliti menangkap dimensi yang mungkin terlewat apabila hanya menggunakan satu metode saja.

Hasil akhir dari integrasi dalam *mixed methods* adalah terbentuknya interpretasi komprehensif yang menggabungkan penjelasan berbasis angka dengan pemahaman kontekstual mengenai proses sosial dan kebijakan publik. Dalam administrasi publik, integrasi ini dapat membantu menjawab tidak hanya apakah suatu kebijakan berhasil secara statistik, tetapi juga mengapa dan bagaimana keberhasilan atau kegagalan tersebut terjadi di lapangan. Fetters et al. (2013) menekankan bahwa integrasi yang dilakukan secara eksplisit dan transparan memperkuat validitas temuan serta meningkatkan relevansi penelitian bagi perumusan kebijakan.

Dengan demikian, integrasi data dalam penelitian *mixed methods* merupakan strategi analitis yang krusial untuk

menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai fenomena administrasi publik. Melalui praktik *merging*, *connecting*, dan *embedding* yang dirancang secara sistematis, peneliti dapat menyatukan keunggulan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga menghasilkan temuan yang lebih kaya, mendalam, dan bermakna secara teoritis maupun praktis.

6.4 Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Interpretasi merupakan tahap analitis yang krusial dalam proses penelitian karena pada fase inilah peneliti memberikan makna terhadap hasil pengolahan data dengan mengaitkannya pada kerangka teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta konteks kebijakan publik yang melingkupi fenomena yang dikaji. Hasil statistik, tema-tema kualitatif, maupun sintesis *mixed methods* tidak memiliki arti substantif tanpa penafsiran yang cermat dan reflektif. Dalam penelitian administrasi publik, interpretasi berfungsi menjembatani temuan empiris dengan perdebatan teoretis serta kebutuhan praktis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menekankan bahwa proses interpretasi berlangsung secara iteratif, di mana peneliti terus-menerus membandingkan data, pola, dan proposisi teoretis untuk menghasilkan pemahaman yang koheren.

Dalam melakukan interpretasi, peneliti perlu menempatkan temuan penelitian dalam dialog dengan literatur yang relevan, baik untuk mendukung, memperluas, maupun mengkritisi teori yang sudah ada. Creswell dan Creswell (2018) menyatakan bahwa

penafsiran hasil penelitian harus menjawab pertanyaan utama studi serta menunjukkan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks administrasi publik, misalnya, hasil analisis mengenai efektivitas suatu program dapat dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, tata kelola kolaboratif, atau kinerja sektor publik, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat bagi kesimpulan yang diambil.

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan bukti empiris yang tersedia. Kesimpulan tidak boleh melampaui kapasitas data atau desain penelitian, misalnya dengan mengklaim hubungan kausal yang kuat dari studi korelasional atau menggeneralisasi temuan kualitatif secara berlebihan. Menurut Yin (2018), terutama dalam penelitian studi kasus dan evaluasi kebijakan, kesimpulan harus disusun berdasarkan rantai bukti yang jelas (*chain of evidence*) sehingga pembaca dapat menelusuri bagaimana peneliti sampai pada pernyataan tertentu.

Selain merumuskan kesimpulan akademik, penelitian administrasi publik juga diharapkan menghasilkan implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis. Implikasi kebijakan menjelaskan arti temuan bagi perbaikan desain program, mekanisme implementasi, atau sistem pengawasan publik, sedangkan rekomendasi praktis menawarkan langkah-langkah konkret yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan dan praktisi di lapangan. Patton (2015) menegaskan bahwa penelitian evaluatif yang baik tidak hanya berhenti pada deskripsi

atau penjelasan, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti (*actionable knowledge*).

Dalam merumuskan implikasi dan rekomendasi, peneliti perlu mempertimbangkan konteks institusional, keterbatasan sumber daya, serta dinamika politik-administratif yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi sebaiknya disusun secara realistis, berbasis bukti, dan disertai penjelasan mengenai prasyarat keberhasilannya. Di samping itu, peneliti juga dianjurkan untuk mengungkapkan keterbatasan penelitian sebagai bagian dari transparansi akademik, sehingga pembaca memahami ruang lingkup temuan dan peluang untuk penelitian lanjutan. Creswell dan Plano Clark (2018) menekankan bahwa refleksi atas keterbatasan studi merupakan elemen penting dalam menjaga integritas ilmiah dan mendorong akumulasi pengetahuan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, interpretasi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian administrasi publik merupakan proses sintesis yang menghubungkan data empiris, teori, dan praktik kebijakan secara sistematis. Melalui penafsiran yang hati-hati, kesimpulan yang proporsional, serta perumusan implikasi dan rekomendasi yang kontekstual, penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu administrasi publik sekaligus peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

BAB VII

PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

7.1 Penulisan Proposal Penelitian

Proposal penelitian merupakan dokumen akademik yang disusun sebelum pelaksanaan penelitian sebagai pernyataan sistematis mengenai rencana, arah, serta kelayakan suatu studi ilmiah. Proposal berfungsi sebagai pedoman kerja utama bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung, sekaligus sebagai instrumen evaluasi bagi dosen pembimbing, komite etik, maupun lembaga pendanaan untuk menilai relevansi topik, ketepatan metodologi, serta potensi kontribusi ilmiah dan praktis dari penelitian yang diajukan. Dalam bidang administrasi publik, proposal penelitian memiliki karakteristik khusus karena umumnya berangkat dari persoalan kebijakan aktual, tantangan tata kelola pemerintahan, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Creswell dan Creswell (2018), proposal yang baik harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara masalah penelitian, kerangka teori, serta desain metodologis yang akan digunakan.

Salah satu unsur awal dalam proposal adalah judul penelitian, yang harus dirumuskan secara ringkas, jelas, dan mencerminkan variabel atau fokus utama studi. Judul yang baik memberikan gambaran awal mengenai lokasi penelitian, pendekatan metodologis, atau konteks

kebijakan yang dikaji. Kerlinger dan Lee (2000) menekankan bahwa judul sebaiknya informatif tanpa berlebihan, sehingga pembaca dapat langsung memahami ruang lingkup penelitian.

Bagian latar belakang berisi uraian mengenai kondisi empiris dan persoalan kebijakan yang melatarbelakangi penelitian, dilengkapi dengan data pendukung, laporan resmi, atau temuan penelitian terdahulu. Dalam administrasi publik, latar belakang biasanya menyoroti kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasinya, permasalahan kinerja birokrasi, atau tantangan pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), latar belakang harus mampu menunjukkan adanya masalah nyata sekaligus peluang kontribusi ilmiah yang dapat diisi oleh penelitian.

Selanjutnya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian disusun secara fokus dan operasional agar dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Rumusan ini menjadi fondasi bagi keseluruhan desain penelitian, termasuk pemilihan metode dan teknik analisis. Creswell (2014) menjelaskan bahwa pertanyaan penelitian harus selaras dengan pendekatan yang dipilih, apakah kuantitatif, kualitatif, atau *mixed methods*, serta mencerminkan tujuan utama studi.

Bagian tujuan dan manfaat penelitian menguraikan apa yang ingin dicapai melalui studi tersebut serta kontribusi teoretis dan praktis yang diharapkan. Dalam konteks administrasi publik, manfaat praktis sering dikaitkan

dengan perbaikan desain kebijakan, peningkatan efektivitas implementasi program, atau penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah. Patton (2015) menekankan pentingnya merumuskan manfaat penelitian secara realistis dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Proposal juga harus memuat tinjauan pustaka dan kerangka teoretik yang merangkum konsep, model, serta temuan empiris terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi memetakan posisi penelitian dalam perdebatan akademik, sedangkan kerangka teoretik membantu menjelaskan hubungan antarvariabel atau kategori analisis yang akan digunakan. Menurut Neuman (2014), kajian literatur yang baik tidak sekadar merangkum penelitian sebelumnya, tetapi juga mengkritisnya dan menunjukkan celah penelitian yang akan diisi.

Komponen berikutnya adalah metodologi penelitian, yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, strategi sampling atau pemilihan informan, prosedur analisis, serta pertimbangan etika penelitian. Bagian ini menjadi kunci penilaian kelayakan ilmiah suatu proposal karena menunjukkan apakah tujuan penelitian dapat dicapai secara metodologis. Creswell dan Plano Clark (2018) menekankan bahwa metodologi harus dirancang secara logis, transparan, dan konsisten dengan pertanyaan penelitian.

Selain aspek substantif, proposal juga mencakup jadwal penelitian dan rencana anggaran biaya sebagai bentuk perencanaan operasional. Jadwal biasanya disajikan dalam bentuk diagram waktu atau *Gantt chart* yang menunjukkan tahapan kegiatan penelitian dari awal hingga akhir, sedangkan anggaran merinci kebutuhan biaya untuk pengumpulan data, perjalanan lapangan, pengolahan data, serta penulisan laporan. Menurut Saunders, Lewis, dan Thornhill (2019), perencanaan waktu dan biaya yang realistis meningkatkan kredibilitas proposal di mata evaluator dan sponsor penelitian.

Terakhir, proposal harus dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber yang dirujuk dalam teks, disusun sesuai dengan gaya sitasi akademik yang berlaku. Daftar pustaka mencerminkan keluasan literatur yang dikuasai peneliti serta menjadi bagian dari integritas akademik dalam penulisan ilmiah. American Psychological Association (2020) menegaskan bahwa konsistensi dalam sitasi dan referensi merupakan aspek penting dalam komunikasi ilmiah.

Dengan demikian, penulisan proposal penelitian dalam administrasi publik merupakan proses strategis yang menggabungkan analisis masalah kebijakan, kerangka teoritis yang kuat, serta desain metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Proposal yang disusun secara sistematis dan argumentatif tidak hanya memandu pelaksanaan penelitian, tetapi juga meningkatkan peluang studi tersebut untuk memperoleh persetujuan akademik, etik, maupun pendanaan.

7.2 Penyusunan Skripsi

Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa strata satu (S1) sebagai syarat penyelesaian studi dan bentuk pembuktian kemampuan melakukan penelitian secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing. Melalui penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan masalah penelitian secara jelas, menelaah literatur secara kritis, memilih dan menerapkan metode yang tepat, menganalisis data secara sistematis, serta menyusun argumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks administrasi publik, skripsi sering diarahkan pada kajian kebijakan publik, kinerja organisasi pemerintahan, pelayanan publik, atau tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Creswell (2014), karya ilmiah mahasiswa harus menunjukkan koherensi antara pertanyaan penelitian, kerangka teoretis, desain metodologi, serta interpretasi hasil.

Secara umum, struktur skripsi di perguruan tinggi di Indonesia mengikuti sistematika yang relatif baku, meskipun dapat disesuaikan dengan pedoman masing-masing institusi. Bagian awal skripsi biasanya mencakup halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, serta daftar tabel dan gambar. Isi utama skripsi terdiri atas beberapa bab pokok. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi memperkenalkan pembaca

pada konteks studi dan urgensi akademik maupun praktis dari penelitian yang dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi pembahasan mengenai konsep-konsep utama, teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran atau hipotesis (jika penelitian kuantitatif). Dalam bab ini, mahasiswa dituntut menunjukkan kemampuan membaca literatur secara kritis dan menempatkan penelitiannya dalam peta keilmuan yang lebih luas. Neuman (2014) menekankan bahwa tinjauan pustaka yang baik tidak sekadar merangkum sumber-sumber terdahulu, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang akan diisi oleh studi yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau objek studi, teknik pengumpulan data, prosedur analisis, serta pertimbangan etika penelitian. Bab ini menunjukkan bagaimana penelitian dilaksanakan secara operasional dan menjadi dasar penilaian terhadap validitas temuan. Creswell dan Plano Clark (2018) menegaskan bahwa metodologi harus disusun secara transparan agar pembaca dapat memahami serta mengevaluasi proses penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan empiris yang diperoleh dari analisis data, baik dalam bentuk tabel, grafik, kutipan wawancara, maupun narasi analitis, serta mendiskusikannya dengan mengaitkan pada teori dan penelitian terdahulu. Pada bagian ini, mahasiswa tidak hanya melaporkan hasil, tetapi juga menafsirkan

makna temuan tersebut dalam konteks administrasi publik dan implikasinya terhadap praktik kebijakan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menyatakan bahwa pembahasan yang baik mengintegrasikan data dengan kerangka konseptual secara argumentatif.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi memuat ringkasan temuan utama penelitian, jawaban atas pertanyaan penelitian, keterbatasan studi, serta saran untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Bagian ini menegaskan kontribusi penelitian sekaligus menunjukkan kesadaran metodologis peneliti terhadap ruang lingkup dan batasan temuannya. Patton (2015) menekankan bahwa rekomendasi sebaiknya bersifat aplikatif dan didasarkan secara langsung pada hasil penelitian.

Dalam keseluruhan proses penulisan skripsi, mahasiswa wajib mematuhi kaidah bahasa ilmiah yang formal, jelas, dan objektif, menggunakan sistematika penulisan yang konsisten sesuai pedoman institusi, serta menerapkan teknik sitasi dan penulisan daftar pustaka yang benar. American Psychological Association (2020) menegaskan bahwa konsistensi gaya sitasi dan kejujuran akademik merupakan bagian penting dari komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, penyusunan skripsi dalam administrasi publik merupakan latihan akademik yang komprehensif untuk membangun kemampuan riset mahasiswa secara utuh. Melalui struktur yang sistematis, analisis yang berbasis data, serta penulisan yang memenuhi standar

ilmiah, skripsi diharapkan tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan.

7.3 Penyusunan Tesis

Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa strata dua (S2) sebagai syarat penyelesaian pendidikan magister dan sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian secara mandiri dengan tingkat kedalaman teoritis dan metodologis yang lebih tinggi dibandingkan skripsi. Pada jenjang ini, mahasiswa tidak hanya dituntut mampu menerapkan teori dan metode penelitian, tetapi juga mengembangkan analisis kritis, sintesis konseptual, serta argumentasi ilmiah yang menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu, khususnya dalam bidang administrasi publik. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian pada tingkat magister harus memperlihatkan penguasaan literatur yang luas, kejelasan posisi teoretis, serta konsistensi antara pertanyaan penelitian, desain metodologis, dan interpretasi temuan.

Secara struktural, tesis pada umumnya memiliki kerangka dasar yang serupa dengan skripsi, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan rekomendasi. Namun, setiap bagian dalam tesis diharapkan disajikan dengan tingkat elaborasi dan kedalaman yang lebih tinggi. Pada bagian pendahuluan, mahasiswa harus mampu mengemukakan persoalan kebijakan atau administrasi yang kompleks, merumuskan

pertanyaan penelitian yang tajam, serta menjelaskan signifikansi teoretis dan praktis dari studi yang dilakukan. Tinjauan pustaka tidak hanya merangkum teori dan penelitian terdahulu, melainkan juga memetakan perdebatan akademik mutakhir dan mengidentifikasi celah konseptual yang hendak diisi oleh penelitian. Neuman (2014) menekankan bahwa pada penelitian tingkat lanjut, tinjauan literatur berfungsi sebagai arena dialog kritis antara peneliti dan tradisi keilmuan yang relevan.

Dalam aspek metodologis, tesis sering kali menggunakan desain penelitian yang lebih kompleks, seperti *mixed methods*, studi komparatif lintas daerah atau institusi, analisis kebijakan mendalam, atau pemodelan statistik lanjutan. Pemilihan metode harus disertai justifikasi teoretis yang kuat serta penjelasan rinci mengenai prosedur pengumpulan dan analisis data, termasuk pertimbangan etika penelitian. Creswell dan Plano Clark (2018) menegaskan bahwa penelitian pada tingkat magister dan doktoral menuntut transparansi metodologis yang tinggi agar hasil studi dapat dinilai secara akademik dan direplikasi secara konseptual.

Ciri penting tesis adalah adanya kontribusi konseptual, baik dalam bentuk pengembangan model analitis, pengujian kerangka teori dalam konteks baru, maupun sintesis kritis atas pendekatan kebijakan tertentu. Dalam administrasi publik, kontribusi tersebut dapat berupa reinterpretasi teori implementasi kebijakan, pengembangan indikator kinerja sektor publik, atau analisis tata kelola kolaboratif dalam konteks lokal. Yin

(2018) menyebutkan bahwa penelitian tingkat lanjut seharusnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penjelasan analitis yang memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, tesis diharapkan menampilkan analisis kritis terhadap kebijakan publik atau praktik administrasi, dengan mempertimbangkan aspek politik, institusional, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi proses pemerintahan. Analisis ini harus berbasis data empiris yang kuat serta didukung oleh literatur akademik yang relevan. Patton (2015) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang reflektif dan kontekstual agar rekomendasi yang dihasilkan tidak bersifat normatif semata, melainkan dapat ditindaklanjuti secara realistis.

Sebagai puncak argumentasi ilmiah, bagian simpulan dan rekomendasi dalam tesis perlu dirumuskan secara strategis. Rekomendasi tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga mencerminkan pemikiran kebijakan jangka menengah dan panjang, serta mempertimbangkan implikasi institusional dan keberlanjutan program. Di samping itu, mahasiswa perlu secara eksplisit mengemukakan keterbatasan penelitian dan peluang studi lanjutan sebagai bentuk refleksi akademik dan integritas ilmiah. American Psychological Association (2020) menekankan bahwa pengungkapan batasan studi merupakan bagian penting dari komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, penyusunan tesis dalam administrasi publik merupakan proses akademik yang menuntut

kedalaman analitis, ketajaman konseptual, serta ketelitian metodologis yang tinggi. Melalui penelitian yang terancang secara matang, analisis yang kritis, dan rekomendasi strategis yang berbasis bukti, tesis diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu administrasi publik sekaligus praktik tata kelola pemerintahan.

7.4 Penyusunan Disertasi

Penyusunan disertasi merupakan tahapan akhir dalam pendidikan doktoral yang mencerminkan kemampuan akademik peneliti dalam mengembangkan ilmu administrasi publik. Disertasi harus disusun secara sistematis, logis, dan berbasis metodologi ilmiah yang kuat, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengembangan teori maupun praktik administrasi dan kebijakan publik.

Secara umum, disertasi disusun dalam struktur baku yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teoretis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Struktur tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan pedoman akademik perguruan tinggi, namun tetap menjaga keterpaduan antarbagian.

Prinsip utama dalam penyusunan disertasi adalah konsistensi dan koherensi ilmiah antara rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretis, metode, serta temuan penelitian. Konsistensi ini menjadi dasar dalam membangun argumentasi ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selain itu, disertasi wajib memuat unsur kebaruan yang jelas, baik dalam bentuk pengembangan teori, pendekatan metodologis, maupun temuan empiris dalam konteks administrasi dan kebijakan publik. Unsur kebaruan tersebut harus dinyatakan secara eksplisit agar kontribusi ilmiah disertasi dapat diidentifikasi dengan jelas.

Penyusunan disertasi juga harus menjunjung tinggi etika akademik dan integritas ilmiah, terutama dalam penggunaan sumber rujukan, pengelolaan data, serta penyajian hasil penelitian. Dengan demikian, disertasi tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga memiliki nilai keilmuan dan kebermanfaatannya bagi pengembangan administrasi publik.

7.5 Teknik Sitasi dan Referensi

Sitasi merupakan praktik akademik yang digunakan untuk mengakui secara eksplisit sumber ide, konsep, data, atau temuan penelitian yang dimanfaatkan dalam penulisan karya ilmiah. Melalui sitasi yang tepat, peneliti menunjukkan kejujuran intelektual, menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain, serta memungkinkan pembaca menelusuri kembali sumber asli yang dijadikan rujukan. Dalam tradisi akademik modern, sitasi juga berfungsi sebagai bagian dari dialog ilmiah yang menghubungkan suatu penelitian dengan khazanah pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Menurut American Psychological Association (2020), pemberian rujukan yang akurat merupakan unsur fundamental dalam komunikasi ilmiah yang etis dan bertanggung jawab.

Berbagai gaya sitasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan disiplin ilmu dan tradisi penerbitan yang berbeda. Gaya APA (American Psychological Association) banyak digunakan dalam ilmu sosial dan administrasi publik karena menekankan kejelasan tahun publikasi dan keterkaitan temuan empiris dengan perkembangan teori. Chicago Style menyediakan dua sistem utama, yakni *author–date* dan *notes–bibliography*, yang lazim digunakan dalam ilmu sosial maupun humaniora. Harvard Style dikenal dengan format penulis–tahun yang mirip dengan APA dan banyak digunakan di lingkungan akademik internasional, sementara Vancouver Style lebih umum dipakai dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan dengan sistem penomoran rujukan. Turabian (2018) menjelaskan bahwa pemilihan gaya sitasi biasanya ditentukan oleh kebijakan institusi, jurnal ilmiah, atau lembaga pendanaan, sehingga peneliti perlu mematuhi pedoman yang berlaku secara konsisten.

Selain memilih gaya sitasi yang sesuai, peneliti juga harus memastikan bahwa setiap sumber yang dikutip dalam teks tercantum secara lengkap dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. Konsistensi format penulisan, ketepatan ejaan nama penulis, tahun terbit, judul karya, serta informasi penerbit menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas karya ilmiah. Booth, Colomb, dan Williams (2016) menegaskan bahwa rujukan yang disusun secara sistematis tidak hanya mencegah tuduhan plagiarisme, tetapi juga meningkatkan keterbacaan dan keandalan suatu tulisan akademik.

Dalam praktik kontemporer, penggunaan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan EndNotes sangat dianjurkan untuk membantu peneliti mengelola sumber pustaka, menyimpan dokumen, menghasilkan sitasi otomatis dalam berbagai gaya, serta menjaga konsistensi daftar referensi sepanjang proses penulisan. Menurut Pritchard (2019), pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan referensi tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja peneliti, tetapi juga mengurangi kesalahan teknis dalam sitasi dan penyusunan bibliografi.

Dengan demikian, teknik sitasi dan referensi merupakan bagian integral dari integritas akademik dalam penelitian administrasi publik. Melalui pemilihan gaya sitasi yang tepat, penerapan format yang konsisten, serta pemanfaatan perangkat lunak pendukung, peneliti dapat memastikan bahwa karya ilmiahnya memenuhi standar etika dan profesionalisme ilmiah sekaligus berkontribusi secara transparan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

7.6 Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah merupakan tahap akhir yang penting dalam siklus penelitian karena berfungsi menyebarkan temuan kepada komunitas akademik, praktisi pemerintahan, serta pembuat kebijakan. Melalui publikasi, hasil penelitian tidak hanya terdokumentasi secara permanen, tetapi juga dapat diuji, dikritisi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Dalam administrasi publik, publikasi ilmiah memiliki peran

strategis karena dapat memengaruhi diskursus kebijakan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta memperkuat hubungan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan. Menurut King, Keohane, dan Verba (1994), penyebarluasan temuan secara terbuka merupakan bagian integral dari metode ilmiah karena memungkinkan replikasi dan akumulasi pengetahuan.

Bentuk publikasi ilmiah sangat beragam dan disesuaikan dengan tujuan komunikasi serta audiens yang dituju. Artikel jurnal ilmiah merupakan medium utama untuk menyampaikan hasil penelitian secara mendalam dan terstandar melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*), yang bertujuan menjamin kualitas metodologis dan kontribusi teoretis suatu karya. Prosiding konferensi biasanya memuat ringkasan atau versi awal dari penelitian yang dipresentasikan dalam forum ilmiah dan berfungsi sebagai sarana memperoleh masukan awal dari komunitas akademik. Sementara itu, *policy brief* dirancang secara ringkas dan aplikatif untuk menyampaikan implikasi penelitian kepada pembuat kebijakan, dengan menekankan rekomendasi strategis yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti. Buku akademik atau monograf memungkinkan peneliti mengelaborasi hasil studi secara komprehensif, termasuk pengembangan kerangka teoretis yang lebih luas dan analisis kebijakan yang mendalam. Patton (2015) menegaskan bahwa format diseminasi hasil penelitian sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar pengetahuan yang dihasilkan benar-benar berdampak.

Dalam konteks administrasi publik, publikasi pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional memiliki arti penting karena menjadi indikator kualitas riset sekaligus wahana utama untuk memengaruhi perdebatan ilmiah dan kebijakan publik. Jurnal bereputasi umumnya menerapkan standar ketat dalam seleksi naskah, mencakup orisinalitas, relevansi kebijakan, ketepatan metodologi, serta kontribusi terhadap teori dan praktik pemerintahan. Menurut Creswell dan Creswell (2018), keberhasilan publikasi di jurnal bereputasi juga bergantung pada kemampuan peneliti mengkomunikasikan temuan secara jelas, argumentatif, dan sesuai dengan fokus serta ruang lingkup jurnal yang dituju.

Proses publikasi ilmiah biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan jurnal atau penerbit yang sesuai, penyesuaian naskah dengan pedoman penulisan (*author guidelines*), pengiriman manuskrip, proses penilaian sejawat, revisi berdasarkan masukan penelaah, hingga keputusan akhir penerimaan atau penolakan. Tahapan ini menuntut ketekunan, keterbukaan terhadap kritik, serta komitmen terhadap standar etika publikasi, seperti penghindaran plagiarisme, pengungkapan konflik kepentingan, dan kejelasan kepengarangan. Committee on Publication Ethics (COPE) (2019) menekankan bahwa integritas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam publikasi ilmiah yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, publikasi ilmiah dalam administrasi publik bukan sekadar sarana memenuhi kewajiban akademik, melainkan mekanisme strategis untuk

mentransformasikan hasil penelitian menjadi pengetahuan yang berdampak bagi pengembangan ilmu dan perbaikan praktik kebijakan. Melalui pemilihan media publikasi yang tepat, penulisan yang berkualitas, serta kepatuhan pada etika penerbitan, peneliti dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

7.7 Etika Publikasi

Etika publikasi merupakan seperangkat prinsip normatif yang mengatur perilaku peneliti dalam menyebarkan hasil penelitian kepada publik ilmiah. Prinsip ini mencakup kejujuran dalam pelaporan temuan, pengakuan yang adil terhadap kontribusi setiap penulis, transparansi mengenai potensi konflik kepentingan, serta larangan terhadap praktik duplikasi publikasi atau *redundant publication*. Dalam bidang administrasi publik, kepatuhan terhadap etika publikasi menjadi sangat penting karena hasil penelitian sering kali berimplikasi langsung terhadap perumusan kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan kepentingan masyarakat luas. Menurut Committee on Publication Ethics (COPE) (2019), integritas dalam proses publikasi merupakan fondasi utama kepercayaan komunitas akademik terhadap pengetahuan ilmiah yang dihasilkan.

Kejujuran pelaporan hasil menuntut peneliti untuk menyajikan data dan analisis secara apa adanya, tanpa melakukan fabrikasi, falsifikasi, atau seleksi temuan yang menyesatkan. Semua prosedur metodologis, keterbatasan penelitian, serta hasil yang tidak mendukung hipotesis

awal tetap harus dilaporkan secara terbuka. Resnik (2015) menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan merupakan bagian penting dari *responsible conduct of research* karena memungkinkan pembaca menilai validitas dan reliabilitas temuan secara independen.

Pengakuan kontribusi penulis berkaitan dengan penentuan kepengarangan (*authorship*) yang adil dan proporsional. Hanya individu yang memberikan kontribusi substansial terhadap perancangan penelitian, pengumpulan atau analisis data, serta penulisan atau revisi naskah yang layak dicantumkan sebagai penulis. Praktik seperti *gift authorship* (mencantumkan nama tanpa kontribusi nyata) atau *ghost authorship* (menghilangkan pihak yang berkontribusi signifikan) bertentangan dengan etika publikasi. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (2019) mengemukakan bahwa kejelasan kriteria kepengarangan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas ilmiah, prinsip yang juga relevan dalam disiplin ilmu sosial dan administrasi publik.

Transparansi konflik kepentingan mengharuskan peneliti mengungkapkan hubungan finansial, kelembagaan, atau personal yang berpotensi memengaruhi interpretasi hasil penelitian. Pengungkapan ini tidak serta-merta mendiskreditkan penelitian, tetapi memberikan konteks bagi pembaca untuk menilai independensi analisis yang dilakukan. Menurut COPE (2019), deklarasi konflik kepentingan merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penerbitan ilmiah.

Larangan duplikasi publikasi mencakup praktik menerbitkan hasil penelitian yang sama atau sangat mirip di lebih dari satu jurnal tanpa pemberitahuan yang jelas, serta *salami slicing*, yaitu memecah satu studi menjadi beberapa artikel kecil tanpa justifikasi ilmiah yang memadai. Praktik semacam ini dianggap merugikan integritas literatur ilmiah dan dapat menyesatkan pembaca mengenai bobot bukti empiris yang tersedia. Resnik (2015) menegaskan bahwa orisinalitas dan kejelasan kontribusi merupakan syarat utama dalam publikasi yang etis.

Selain mematuhi prinsip-prinsip tersebut, peneliti juga wajib mengikuti pedoman etika penerbitan yang ditetapkan oleh jurnal atau penerbit, termasuk kebijakan tentang plagiarisme, *data sharing*, proses penelaahan sejawat, serta koreksi atau penarikan artikel (*retraction*) apabila ditemukan pelanggaran serius. Dengan menjunjung tinggi etika publikasi, peneliti tidak hanya menjaga reputasi pribadi dan institusional, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kredibilitas ilmu administrasi publik sebagai disiplin akademik yang melayani kepentingan masyarakat luas.

BAB VIII

PENDEKATAN DAN TREN METODOLOGI PENELITIAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

8.1 Penelitian Kebijakan Publik

Penelitian kebijakan publik merupakan salah satu bidang sentral dalam disiplin administrasi publik yang berfokus pada pengkajian sistematis terhadap proses perumusan, pelaksanaan, serta dampak kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas keputusan publik agar lebih rasional, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam tradisi *evidence-based policy*, riset kebijakan dipandang sebagai instrumen penting untuk menjembatani analisis akademik dengan praktik pemerintahan sehari-hari. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga ruang lingkup penelitian kebijakan mencakup berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Secara konseptual, penelitian kebijakan publik sering dikaitkan dengan pendekatan *policy cycle* atau siklus kebijakan, yang memandang kebijakan sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan mulai dari munculnya masalah publik hingga evaluasi dampaknya. Anderson (2015) mengemukakan bahwa siklus kebijakan meliputi

tahap pengenalan masalah (*agenda setting*), formulasi alternatif kebijakan, adopsi keputusan, implementasi, serta evaluasi. Meskipun model ini bersifat heuristik dan tidak selalu menggambarkan realitas politik yang kompleks, kerangka tersebut tetap berguna sebagai alat analitis untuk mengklasifikasikan fokus penelitian dan merumuskan pertanyaan riset yang sistematis.

Pada tahap agenda setting, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana suatu isu sosial memperoleh perhatian pemerintah, aktor-aktor apa yang berperan dalam mendorong isu tersebut ke ranah kebijakan, serta bagaimana persepsi publik dan media memengaruhi prioritas pemerintah. Kingdon (2011) melalui teori *multiple streams* menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sering terjadi ketika aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu pada momen tertentu yang disebut *policy window*. Pada tahap formulasi kebijakan, penelitian menelaah proses penyusunan alternatif kebijakan, pertimbangan teknokratis dan politis yang memengaruhi pilihan pemerintah, serta peran lembaga legislatif, birokrasi, dan kelompok kepentingan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan berfokus pada bagaimana keputusan formal diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, termasuk hambatan administratif, kapasitas organisasi, koordinasi antarinstansi, serta respons masyarakat sasaran. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, dukungan politik, serta sumber daya implementor dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu,

Lipsky (2010) melalui konsep *street-level bureaucracy* menunjukkan bahwa aparat pelaksana di garis depan memiliki diskresi yang besar dalam membentuk hasil kebijakan, sehingga perilaku individu dan konteks organisasi menjadi faktor penting dalam analisis implementasi.

Tahap evaluasi kebijakan mengkaji sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta konsekuensi yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Dunn (2018) memandang evaluasi kebijakan sebagai proses sistematis untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program atau perumusan kebijakan baru. Selain itu, penelitian kebijakan juga mencakup analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik kebijakan, seperti perubahan kesejahteraan masyarakat, distribusi manfaat dan beban, legitimasi politik pemerintah, serta implikasi jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan.

Dari sisi metodologis, penelitian kebijakan publik bersifat pluralistik dan dapat memanfaatkan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi keduanya. Analisis kuantitatif sering digunakan untuk mengukur dampak kebijakan melalui survei, eksperimen alamiah, atau analisis data administratif, sedangkan pendekatan kualitatif berguna untuk memahami proses pengambilan keputusan, dinamika aktor, serta konteks institusional melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Pendekatan *mixed methods* memungkinkan

peneliti mengintegrasikan kedua jenis data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kebijakan. Creswell dan Plano Clark (2018) menegaskan bahwa penggunaan berbagai metode secara terpadu dapat meningkatkan kekuatan inferensi dalam penelitian kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian kebijakan publik dalam administrasi publik merupakan upaya ilmiah yang bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan dirancang, dijalankan, dan berdampak pada masyarakat. Melalui pemanfaatan kerangka teoretis yang kuat, analisis empiris yang ketat, serta pendekatan metodologis yang beragam, penelitian kebijakan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus perbaikan praktik pemerintahan dan pelayanan publik.

8.2 Evaluasi Program Pemerintah

Evaluasi program pemerintah merupakan bentuk penelitian terapan dalam administrasi publik yang bertujuan menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bagaimana proses pelaksanaannya, serta apa saja dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Evaluasi berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus sebagai dasar pembelajaran organisasi dan perbaikan kebijakan di masa depan. Dalam kerangka *results-based management*, evaluasi dipandang sebagai komponen penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga negara.

Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) mendefinisikan evaluasi program sebagai penerapan metode penelitian sosial secara sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan hasil suatu intervensi.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya dalam siklus kebijakan, evaluasi dapat dilakukan pada beberapa tahap. Evaluasi *ex-ante* dilaksanakan sebelum program dijalankan dan bertujuan menilai kelayakan rancangan program, kebutuhan sasaran, serta alternatif kebijakan yang tersedia. Evaluasi ini sering menggunakan analisis kebutuhan (*needs assessment*), studi kelayakan, atau analisis biaya-manfaat untuk membantu pembuat kebijakan memilih desain intervensi yang paling tepat. Dunn (2018) menekankan bahwa analisis kebijakan pada tahap awal sangat penting untuk meminimalkan risiko kegagalan program dan memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan masalah publik yang hendak diatasi.

Evaluasi *on-going* atau evaluasi proses dilakukan ketika program sedang berlangsung, dengan fokus pada bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan, tingkat kepatuhan terhadap pedoman operasional, koordinasi antarinstansi, serta respons kelompok sasaran. Jenis evaluasi ini memungkinkan penyesuaian kebijakan secara cepat apabila ditemukan hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan. Patton (2015) melalui pendekatan *developmental evaluation* menekankan pentingnya evaluasi formatif yang bersifat adaptif dalam lingkungan kebijakan yang kompleks dan dinamis.

Sementara itu, evaluasi ex-post dilaksanakan setelah program selesai atau telah berjalan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan menilai capaian hasil dan dampak kebijakan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup pengukuran output, outcome, dan impact, serta analisis keberlanjutan manfaat program dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, metode kuasi-eksperimental, analisis sebelum–sesudah, atau perbandingan dengan kelompok kontrol sering digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan secara lebih meyakinkan. Rossi, Lipsey, dan Henry (2019) menekankan bahwa evaluasi dampak memerlukan desain metodologis yang kuat agar kesimpulan kausal dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dibedakan berdasarkan waktu, evaluasi program pemerintah juga menggunakan sejumlah kriteria normatif untuk menilai kinerja kebijakan. Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan program, sedangkan efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Relevansi menilai kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, sementara keberlanjutan mengkaji kemungkinan manfaat program bertahan setelah dukungan pendanaan atau intervensi utama berakhir. Dampak mencakup perubahan sosial, ekonomi, atau institusional yang dihasilkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak terduga. Kerangka kriteria ini sejalan dengan pendekatan evaluasi yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019), yang banyak digunakan

dalam penilaian program pembangunan dan kebijakan publik.

Dengan demikian, evaluasi program pemerintah merupakan instrumen strategis dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong pembelajaran berkelanjutan dalam sektor publik. Melalui penerapan berbagai jenis evaluasi pada setiap tahap siklus kebijakan dan penggunaan kriteria penilaian yang komprehensif, penelitian evaluatif dapat memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengambilan keputusan dan reformasi tata kelola pemerintahan.

8.3 Penelitian Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Pendekatan *evidence-based policy* menekankan penggunaan data empiris dan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar utama dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam paradigma ini, keputusan pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan politik, tekanan kelompok kepentingan, atau intuisi pembuat kebijakan, melainkan didukung oleh analisis sistematis terhadap informasi yang dapat diverifikasi. Konsep ini berkembang dari tradisi *evidence-based practice* di bidang kesehatan dan kemudian diadaptasi ke dalam studi kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Davies, Nutley, dan Smith (2000) mendefinisikan kebijakan berbasis bukti sebagai proses pengambilan keputusan yang diinformasikan oleh pengetahuan terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan pertimbangan profesional dan nilai-nilai publik.

Dalam kerangka administrasi publik, penelitian berbasis bukti mencakup berbagai bentuk kegiatan riset, mulai dari evaluasi program, analisis dampak kebijakan, studi komparatif lintas daerah, hingga pemanfaatan data administratif dan survei nasional. Jenis bukti yang digunakan dapat bersifat kuantitatif, seperti statistik kinerja dan hasil eksperimen kebijakan, maupun kualitatif, seperti wawancara dengan pelaksana kebijakan dan penerima manfaat, yang memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan dan konteks institusional. Head (2016) menekankan bahwa kebijakan yang baik jarang bergantung pada satu jenis bukti saja, melainkan pada sintesis berbagai sumber informasi yang relevan dan dapat dipercaya.

Proses penerapan *evidence based policy* biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain identifikasi masalah publik secara berbasis data, pengumpulan dan penilaian kualitas bukti yang tersedia, analisis alternatif kebijakan beserta konsekuensinya, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan setelah kebijakan diimplementasikan. Dalam tahap ini, kualitas metodologis penelitian menjadi faktor kunci, karena bukti yang lemah atau bias dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menyesatkan. Nutley, Walter, dan Davies (2007) menegaskan bahwa kapasitas institusional untuk memahami dan menggunakan hasil penelitian merupakan prasyarat penting agar pendekatan berbasis bukti dapat berjalan secara efektif.

Peran peneliti administrasi publik dalam kerangka ini menjadi sangat strategis sebagai penyedia pengetahuan

ilmiah yang kredibel dan relevan bagi pembuat kebijakan. Peneliti tidak hanya bertugas menghasilkan data, tetapi juga menerjemahkan temuan akademik ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan aplikatif, seperti *policy brief*, laporan evaluasi, atau rekomendasi strategis. Hubungan yang konstruktif antara peneliti, birokrasi, dan aktor politik diperlukan agar bukti ilmiah dapat benar-benar memengaruhi proses pengambilan keputusan. Cairney (2016) menyoroti bahwa penggunaan bukti dalam kebijakan publik merupakan proses yang bersifat politis dan kontekstual, sehingga peneliti perlu memahami dinamika institusional dan kepentingan yang terlibat tanpa mengorbankan independensi ilmiah.

Meskipun demikian, penerapan *evidence-based policy* menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, perbedaan kepentingan politik, tekanan waktu dalam pengambilan keputusan, serta kesenjangan komunikasi antara dunia akademik dan birokrasi. Oleh karena itu, pendekatan ini semakin berkembang ke arah *evidence-informed policy*, yang mengakui bahwa bukti ilmiah merupakan komponen penting, tetapi harus dipadukan dengan pertimbangan nilai publik, konteks sosial, dan realitas politik. Head (2016) menekankan bahwa integrasi antara riset, pengalaman praktis, dan aspirasi masyarakat merupakan kunci bagi kebijakan yang demokratis dan efektif.

Dengan demikian, penelitian berbasis bukti dalam administrasi publik merupakan landasan penting bagi tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Melalui produksi riset yang berkualitas, mekanisme diseminasi

yang efektif, serta interaksi yang produktif antara peneliti dan pembuat kebijakan, pendekatan *evidence-based policy* diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

8.4 Metodologi Partisipatif

Metodologi partisipatif merupakan pendekatan penelitian yang secara sadar melibatkan masyarakat, kelompok sasaran, serta berbagai pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi dan pemanfaatan hasil. Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap model penelitian konvensional yang menempatkan peneliti sebagai pihak yang dominan dalam menentukan agenda riset, sekaligus dari upaya untuk menjadikan penelitian sebagai sarana pemberdayaan sosial dan pembelajaran kolektif. Dalam administrasi publik, metodologi partisipatif semakin relevan seiring berkembangnya paradigma tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dan demokrasi partisipatoris yang menekankan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Cornwall dan Jewkes (1995) menyatakan bahwa partisipasi dalam penelitian tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari temuan yang dihasilkan.

Secara konseptual, metodologi partisipatif mencakup berbagai pendekatan, seperti *participatory action research* (PAR), *community-based research*, dan *co-*

production of knowledge. Dalam *participatory action research*, peneliti dan masyarakat bekerja bersama sebagai mitra setara untuk mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, serta merefleksikan perubahan yang terjadi sebagai bagian dari siklus aksi dan pembelajaran. Kemmis dan McTaggart (2005) menjelaskan bahwa PAR bertujuan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui refleksi kritis dan tindakan kolektif.

Dalam konteks tata kelola kolaboratif, metodologi partisipatif juga sejalan dengan gagasan bahwa kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa proses kolaboratif yang efektif mensyaratkan dialog inklusif, kepercayaan antaraktor, serta pembagian peran yang jelas, prinsip-prinsip yang juga tercermin dalam desain penelitian partisipatif. Dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih kontekstual, relevan secara praktis, dan berpeluang lebih besar untuk diadopsi dalam praktik kebijakan.

Metodologi partisipatif banyak digunakan dalam penelitian pembangunan lokal, pelayanan publik, perencanaan wilayah, serta program pemberdayaan masyarakat. Dalam studi-studi tersebut, warga tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga berperan sebagai informan kunci, fasilitator lokal, bahkan ko-peneliti yang turut menentukan fokus riset dan

menafsirkan hasilnya. Chambers (1997) melalui pendekatan *participatory rural appraisal* menunjukkan bagaimana teknik partisipatif dapat menggali pengetahuan lokal dan perspektif kelompok marginal yang sering terabaikan dalam proses perencanaan pembangunan konvensional.

Dari sisi metodologis, penerapan pendekatan partisipatif menuntut kepekaan etis dan keterampilan fasilitasi yang tinggi dari peneliti. Proses partisipasi harus dirancang secara inklusif agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu, serta memperhatikan relasi kuasa yang ada di dalam komunitas. Selain itu, transparansi tujuan penelitian, pengelolaan ekspektasi peserta, serta mekanisme umpan balik menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kolaborasi. Israel et al. (2010) menekankan bahwa penelitian berbasis komunitas yang etis harus memastikan adanya manfaat timbal balik bagi peserta dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Dengan demikian, metodologi partisipatif dalam administrasi publik merupakan pendekatan yang menggabungkan produksi pengetahuan dengan praktik demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan, penelitian tidak hanya menghasilkan data yang lebih kaya dan kontekstual, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal, legitimasi kebijakan, serta kualitas tata kelola pemerintahan dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks.

8.5 Penelitian Digital dan Big Data dalam Administrasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam praktik pemerintahan sekaligus dalam metode penelitian administrasi publik. Digitalisasi layanan publik, penggunaan platform daring, serta keterbukaan data pemerintah menciptakan volume informasi yang sangat besar dan beragam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian. Data digital tersebut meliputi interaksi warga di media sosial, basis data administratif dalam sistem informasi pemerintah, *open government data*, serta data yang dihasilkan oleh sensor, aplikasi seluler, dan berbagai platform digital lainnya. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep *digital government* dan *data-driven governance*, yang menekankan pemanfaatan teknologi dan analitik data untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik (Janssen et al., 2012).

Dalam penelitian administrasi publik, data digital membuka peluang untuk mengamati perilaku masyarakat dan kinerja birokrasi secara lebih luas dan real time dibandingkan pendekatan survei atau wawancara konvensional. Analisis media sosial, misalnya, dapat digunakan untuk mengkaji sentimen publik terhadap kebijakan tertentu, memetakan wacana kebijakan di ruang daring, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang berpengaruh dalam jaringan komunikasi kebijakan. Sistem informasi pemerintah memungkinkan peneliti menelusuri pola penggunaan layanan publik, distribusi bantuan sosial, atau variasi kinerja antarwilayah secara

longitudinal. Kitchin (2014) mendefinisikan *big data* sebagai kumpulan data yang memiliki karakteristik volume besar, kecepatan tinggi, dan keragaman format, yang memerlukan teknik analisis komputasional khusus untuk menghasilkan pengetahuan yang bermakna.

Pemanfaatan *big data* dalam administrasi publik biasanya melibatkan metode analisis lanjutan, seperti *text mining*, *sentiment analysis*, *machine learning*, dan analisis jaringan sosial (*social network analysis*). Teknik-teknik tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola perilaku publik, hubungan antaraktor kebijakan, serta dinamika implementasi kebijakan dalam skala besar. Lazer et al. (2009) menekankan bahwa integrasi antara teori ilmu sosial dan analitik komputasional membuka peluang baru dalam memahami proses sosial dan pemerintahan secara lebih komprehensif.

Meskipun menawarkan potensi besar, penelitian digital dan *big data* juga menghadapi berbagai tantangan metodologis dan etis. Isu perlindungan data pribadi, keamanan informasi, bias algoritmik, serta representativitas data menjadi perhatian utama. Data media sosial, misalnya, tidak selalu mencerminkan keseluruhan populasi, sementara data administratif pemerintah dapat mengandung kesalahan pencatatan atau dipengaruhi oleh prosedur birokrasi tertentu. boyd dan Crawford (2012) mengingatkan bahwa *big data* bukanlah sumber informasi yang sepenuhnya netral, melainkan dibentuk oleh proses teknis dan institusional yang perlu dikritisi secara reflektif oleh peneliti.

Selain itu, penerapan penelitian digital menuntut kapasitas baru dalam administrasi publik, baik dari sisi keterampilan peneliti maupun infrastruktur organisasi. Kolaborasi lintas disiplin antara ilmuwan kebijakan, analis data, dan pakar teknologi informasi menjadi semakin penting dalam mengolah dan menafsirkan data digital secara bertanggung jawab. Janssen et al. (2012) menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan data digital dalam sektor publik sangat bergantung pada tata kelola data yang baik, standar interoperabilitas, serta budaya organisasi yang mendukung penggunaan bukti berbasis data.

Dengan demikian, penelitian digital dan *big data* dalam administrasi publik merupakan salah satu tren metodologis kontemporer yang paling signifikan. Melalui pemanfaatan sumber data digital, penerapan teknik analitik lanjutan, serta penguatan kerangka etika dan tata kelola data, pendekatan ini berpotensi memperkaya pemahaman tentang perilaku publik, proses kebijakan, dan kinerja pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola publik yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis bukti.

8.6 Artificial Intelligence dalam Penelitian Kebijakan

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) dalam dua dekade terakhir telah membuka peluang baru dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. AI merujuk pada seperangkat teknik komputasional yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya

membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran dari data, serta pengambilan keputusan prediktif. Dalam konteks kebijakan publik, teknologi ini mulai dimanfaatkan untuk pemodelan kebijakan, simulasi dampak intervensi pemerintah, analisis teks otomatis terhadap dokumen kebijakan atau media sosial, serta prediksi kebutuhan layanan publik berdasarkan data historis dan real time. Russell dan Norvig (2021) mendefinisikan AI sebagai studi tentang agen cerdas yang mampu bertindak secara rasional dalam lingkungan tertentu, sebuah definisi yang relevan bagi penerapannya dalam analisis kebijakan yang kompleks.

Dalam penelitian kebijakan, AI memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dan beragam dengan kecepatan yang sulit dicapai oleh pendekatan analitik konvensional. Teknik *machine learning* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data administratif pemerintah, memprediksi risiko kegagalan program, atau memodelkan perilaku penerima layanan publik. Pemrosesan bahasa alami (*natural language processing* atau NLP) memungkinkan analisis otomatis terhadap ribuan dokumen kebijakan, laporan publik, atau komentar warga di platform daring untuk mengekstraksi tema, argumen, dan sentimen yang berkembang. Wirtz, Weyerer, dan Geyer (2019) mencatat bahwa penerapan AI dalam sektor publik semakin meluas, terutama dalam bidang perencanaan kebijakan, pelayanan publik digital, dan pengawasan administratif.

Selain untuk analisis empiris, AI juga digunakan dalam simulasi kebijakan melalui *agent-based modeling* atau sistem pendukung keputusan berbasis data, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai skenario kebijakan dan konsekuensinya sebelum intervensi nyata diterapkan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya penguatan *anticipatory governance*, yaitu kemampuan pemerintah untuk memproyeksikan dampak kebijakan di masa depan dan merespons ketidakpastian secara lebih adaptif (Taeihagh, 2021). Dengan demikian, AI berpotensi memperkuat kapasitas analitis negara dalam menghadapi persoalan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Namun demikian, penggunaan AI dalam penelitian kebijakan juga menimbulkan sejumlah tantangan serius, khususnya dalam aspek etika, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Algoritma dapat mereproduksi atau memperkuat bias yang terdapat dalam data pelatihan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu. Selain itu, kompleksitas model AI sering kali menyulitkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan, fenomena yang dikenal sebagai *black box problem*. O'Neil (2016) memperingatkan bahwa penggunaan algoritma tanpa pengawasan kritis dapat memperkuat ketimpangan sosial dan menghasilkan dampak kebijakan yang merugikan.

Isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi juga menjadi perhatian utama, terutama ketika AI memanfaatkan data administratif sensitif atau jejak digital

warga negara. Oleh karena itu, penelitian kebijakan berbasis AI perlu dilengkapi dengan kerangka tata kelola yang kuat, termasuk prinsip *privacy by design*, audit algoritmik, mekanisme akuntabilitas publik, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Floridi et al. (2018) mengusulkan prinsip-prinsip etika AI yang mencakup transparansi, keadilan, non-maleficence, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap otonomi manusia, yang semakin relevan dalam konteks administrasi publik.

Dengan demikian, artificial intelligence dalam penelitian kebijakan publik menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas analisis, prediksi, dan perencanaan kebijakan berbasis data. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati, reflektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, serta perlindungan hak warga negara. Integrasi antara inovasi teknologi, kerangka regulasi yang memadai, dan pengawasan akademik yang ketat menjadi kunci agar AI dapat berkontribusi positif bagi pengembangan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

8.7 Tren Metodologi Penelitian Kontemporer

Perkembangan kompleksitas persoalan publik, kemajuan teknologi digital, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah mendorong evolusi metodologi penelitian dalam administrasi publik. Penelitian kontemporer tidak lagi bergantung pada satu pendekatan metodologis tunggal, melainkan semakin

mengadopsi desain yang bersifat lintas disiplin, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Tren ini mencerminkan upaya untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif, relevan bagi praktik kebijakan, serta responsif terhadap dinamika sosial dan institusional yang cepat berubah. Menurut Creswell dan Plano Clark (2018), perkembangan desain penelitian modern menunjukkan peningkatan penggunaan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif.

Salah satu tren utama adalah semakin meluasnya penggunaan mixed methods dan desain penelitian adaptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggabungkan data numerik dengan narasi kualitatif untuk menjelaskan fenomena kebijakan secara lebih utuh, sekaligus menyesuaikan desain penelitian seiring berkembangnya temuan di lapangan. Dalam konteks kebijakan publik yang dinamis, desain adaptif memungkinkan peneliti merespons perubahan lingkungan kebijakan atau kebutuhan pemangku kepentingan tanpa mengorbankan ketelitian metodologis (Creswell & Plano Clark, 2018).

Participatory action research (PAR) juga semakin banyak digunakan, terutama dalam studi pembangunan lokal, pelayanan publik, dan inovasi sosial. Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan pelaksana kebijakan sebagai mitra penelitian yang terlibat dalam siklus refleksi dan aksi, sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial secara langsung. Kemmis dan McTaggart (2005)

menekankan bahwa PAR merupakan sarana penting untuk mengintegrasikan riset dengan praktik demokratis dan pemberdayaan warga.

Tren lain yang menonjol adalah penggunaan analisis jaringan (*network analysis*) untuk mempelajari hubungan antaraktor dalam proses kebijakan, seperti kolaborasi antarinstansi, kemitraan publik–swasta, atau jejaring advokasi kebijakan. Dengan memetakan pola interaksi dan aliran informasi, analisis jaringan membantu peneliti memahami struktur kekuasaan, koordinasi, serta difusi inovasi kebijakan. Borgatti, Everett, dan Johnson (2018) menunjukkan bahwa pendekatan jaringan semakin penting dalam studi tata kelola kolaboratif dan pemerintahan berbasis kemitraan.

Konsep *experimental governance* atau eksperimen kebijakan juga berkembang pesat, seiring meningkatnya penggunaan *policy labs*, uji coba kebijakan (*pilot projects*), dan *randomized controlled trials* dalam sektor publik. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menguji intervensi dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara luas, sehingga risiko kebijakan dapat diminimalkan dan pembelajaran berbasis bukti diperkuat. Ansell dan Bartenberger (2016) menyebut eksperimen kebijakan sebagai instrumen penting dalam inovasi sektor publik dan pembelajaran institusional.

Selain itu, gerakan *open science* dan keterbukaan data semakin memengaruhi praktik penelitian administrasi publik. Prinsip ini mendorong transparansi dalam desain penelitian, berbagi data dan kode analisis, serta akses

terbuka terhadap publikasi ilmiah, sehingga meningkatkan replikasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap riset. Fecher dan Friesike (2014) menegaskan bahwa *open science* merepresentasikan perubahan paradigma dalam produksi pengetahuan ilmiah yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Integrasi artificial intelligence dan *machine learning* dalam analisis kebijakan juga menjadi tren yang semakin menonjol, khususnya dalam pengolahan data berskala besar, prediksi kebutuhan layanan publik, serta simulasi kebijakan. Seperti dibahas sebelumnya, pemanfaatan teknologi ini menuntut kehati-hatian etis dan tata kelola yang kuat agar inovasi tidak mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan data warga (Floridi et al., 2018).

Secara keseluruhan, tren metodologi penelitian kontemporer dalam administrasi publik menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang semakin lintas disiplin, kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi. Perkembangan ini menuntut peningkatan kapasitas metodologis peneliti, kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta penguatan kerangka etika penelitian agar inovasi metodologis dapat berkontribusi secara positif terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

PENUTUP

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai metodologi penelitian dalam administrasi publik, mulai dari landasan filosofis dan perumusan desain penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, hingga etika akademik, publikasi ilmiah, dan perkembangan metodologi kontemporer. Dalam dunia pemerintahan yang semakin kompleks, dinamis, dan terdigitalisasi, kemampuan melakukan penelitian yang sistematis, kritis, dan bertanggung jawab menjadi kompetensi esensial bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi administrasi publik.

Berbagai pendekatan yang dibahas baik kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods* menunjukkan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang mampu menjawab seluruh persoalan kebijakan publik. Setiap metode memiliki kekuatan dan keterbatasan yang perlu dipahami secara reflektif, sehingga peneliti dapat memilih strategi penelitian yang paling sesuai dengan tujuan studi, konteks kebijakan, serta karakteristik masalah publik yang diteliti. Penekanan pada etika penelitian, integritas akademik, dan etika publikasi diharapkan memperkuat kesadaran bahwa kegiatan ilmiah bukan sekadar proses teknis, melainkan praktik moral yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kepentingan publik.

Perhatian khusus terhadap penelitian kebijakan publik, evaluasi program pemerintah, pendekatan berbasis bukti, metodologi partisipatif, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan menunjukkan arah

perkembangan disiplin administrasi publik di era kontemporer. Tren-tren ini menuntut keterbukaan terhadap inovasi metodologis, kolaborasi lintas disiplin, serta kesiapan menghadapi tantangan baru, terutama terkait perlindungan data, keadilan algoritmik, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi untuk kepentingan publik.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan metodologis bagi mahasiswa dalam menyusun proposal, skripsi, dan tesis, tetapi juga menjadi sumber refleksi bagi peneliti dan praktisi kebijakan dalam meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan publik. Dengan mengintegrasikan ketelitian ilmiah, sensitivitas etis, dan orientasi pada pemecahan masalah nyata, penelitian administrasi publik dapat berperan sebagai kekuatan strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan sosial.

Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia serta menginspirasi lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.
- Fishman, T. (2009). “*We know it when we see it*” is not good enough: *Toward a standard definition of plagiarism*. International Center for Academic Integrity.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The public administration theory primer* (3rd ed.). Westview Press.
- Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. *Educational Researcher*, 5(10), 3–8.
- Hart, C. (1998). *Doing a literature review*. Sage Publications.
- Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2010). *Methods in community-based participatory research for health*. Jossey-Bass.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data

- and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of behavioral research* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic integrity: A review of the literature. *Studies in Higher Education*, 39(2), 339–358.
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). Sage Publications.
- Merton, R. K. (1973). *The sociology of science*. University of Chicago Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering integrity in research*. The National Academies Press.

- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- O'Toole, L. J. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 263–288.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences*. Blackwell Publishing.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Raadschelders, J. C. N. (2011). *Public administration: The interdisciplinary study of government*. Oxford University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance*. Open University Press.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative behavior*. Macmillan.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research* (2nd ed.). Sage Publications.

- Taylor, F. W. (1911). *The principles of scientific management*. Harper & Brothers.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation*. Prentice Hall.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Sage Publications.

Tentang Penulis



Prof. Dr. H. Didin Muhafidin., M.Si.

adalah Guru Besar dalam bidang Administrasi Publik.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan (1993), Magister Administrasi Publik (2002), dan Doktor Administrasi Publik (2006) di Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Karier akademiknya diawali di FISIP UNPAD sebagai Wakil Koordinator Bidang Akademik Kelas Khusus, kemudian mengemban amanah sebagai Sekretaris serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah LPPM UNPAD.

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Sejak tahun 2015 hingga kini, Prof. Didin menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Ghifari.

Sebagai akademisi dan praktisi kebijakan publik, Prof. Didin aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah dan kontribusinya dalam pengembangan kebijakan publik mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
